



**VOL 4 NO 6 NOV-DES 2019**  
LITBANG.KEMENDAGRI.GO.ID  
MAJALAH DWI BULANAN  
P-ISSN 2503 3352  
E-ISSN 2528 4181

**RAKORNAS KELITBANGAN  
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI 2019**

**INOVASI DI ERA DISRUPSI**

@litbangkemendagri  
Litbang Kemendagri  
@LitbangK

# MEDIA BPP

J E N D E L A I N F O R M A S I K E L I T B A N G A N



**SEIRAMA  
MENYUSUN  
RENSTRA**





BPP  
KEMENDAGRI

Nomor Akreditasi  
14/E/KPT/2019 (SINTA 3)



# Call for Papers

## MATRA PEMBARUAN

Mengundang para peneliti, dosen, mahasiswa, dan masyarakat umum untuk mempublikasikan hasil-hasil riset mutakhir di Jurnal Matra Pembaruan Volume 2020, yang akan diterbitkan pada dua edisi yaitu Mei dan November.

Naskah merupakan karya ilmiah orisinal yang belum pernah dipublikasikan dan tidak memuat unsur plagiat



Naskah yang dikirimkan berupa resume hasil penelitian, bagian dari skripsi, tesis, atau disertasi yang telah mengalami penyesuaian untuk standar jurnal ilmiah. Artikel mengandung unsur temuan baru, yang merespons isu-isu dan wacana kontemporer terkait inovasi kebijakan

Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris sebanyak 38.000 s.d 40.000 karakter (tanpa spasi) sudah termasuk referensi, daftar pustaka, dan tabel (jika ada). Naskah dalam Bahasa Indonesia disertai abstrak Bahasa Inggris, dan sebaliknya.



Sumber referensi minimal 10 sumber yang berasal dari jurnal ilmiah yang bisa diakses melalui daring (*online*).

Karena berbasis OJS, maka naskah akan dipublikasikan setiap awal bulan terbit setelah melalui review dan editing.



Sistematika penulisan terdiri dari empat pembabakan: Pendahuluan, Metode, Hasil dan Pembahasan, dan Kesimpulan. Sedangkan gaya gaya APA (*American Psychological Association*) Lampirkan alamat korespondensi dan penulisan referensi dan kutipan MP menggunakan nomor telepon penulis.

Google Scholar

MORAREF

neliti

GARUDA  
GARUDA BUJURAN DIGITAL

Crossref

Registrasi dan submit artikel anda di  
<http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/mp>

Jl. Kramat Raya, No 132, Senen, Jakarta Pusat  
082111393927 (Whatsapp Only)  
matrapembaruan@gmail.com

SALAM REDAKSI

**M**EMASUKI masa pemerintahan baru periode 2019-2024, kementerian dan lembaga termasuk komponennya, tengah disibukkan dengan agenda penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra). Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri) beberapa kali terlibat dalam forum penyusunan dokumen lima tahunan tersebut bersama seluruh komponen Kemendagri. Tidak hanya menyoal arah strategis di tingkat kementerian, forum itu juga membahas arah kebijakan strategis masing-masing komponen—termasuk BPP Kemendagri.

Secara substansi Renstra BPP Kemendagri periode 2020-2024, disebutkan tidak banyak mengalami perubahan, tetapi lebih mengarah pada pendalaman target Renstra sebelumnya. BPP Kemendagri juga akan menekankan pada upaya menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang berkualitas yang mampu melahirkan kebijakan-kebijakan inovatif terutama di lingkungan Kemendagri.

Guna menghasilkan kerja-kerja yang berkualitas tersebut, tentu tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia (SDM), sebagai motor penggerak organisasi. Asumsinya, SDM yang berkualitas akan berbanding lurus dengan kerja-kerja yang berkualitas.

Menghadirkan SDM yang berkualitas ten-

tu akan sulit tercapai jika tidak didukung oleh komponen lain, terutama yang bertugas menangani penguatan SDM di lingkungan Kemendagri. Karenanya, menjadi keniscayaan setiap komponen saling bersinergi dalam meningkatkan penguatan SDM yang dimiliki. Kebutuhan itu misalnya pendidikan bagi para peneliti BPP Kemendagri. Merujuk pada Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia No 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti, setiap jabatan peneliti wajib minimal bergelar magister. Jika tidak dipenuhi, 8 tahun dari aturan itu terbit para peneliti harus melepaskan jabatannya.

Terkait itu, pada edisi Desember 2019, Media BPP berupaya menghadirkan informasi terkait Renstra BPP Kemendagri periode 2020-2024. Selain itu, juga berusaha mengulas bagaimana ikhtiar Kemendagri dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Informasi menarik lainnya telah disiapkan dalam aneka rubrik. Berbagai informasi yang disuguhkan, merupakan komitmen Media BPP dalam menghadirkan wacana konstruktif untuk mementingkan peran ke-litbangan kepada publik. Melalui upaya ini, diharapkan BPP Kemendagri dapat semakin terpacu untuk menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang berkualitas, sebagai upaya membangun kemajuan bangsa.

Redaksi...



## MEDIA BPP

PELINDUNG MENTERI DALAM NEGERI, TITO KARNAVIAN  
PENANGGUNG JAWAB DODI RIYADMADJI

PEMIMPIN REDAKSI	LITA DEWI WULANTIKA
REDAKTUR PELAKSANA	MOH. ILHAM A. HAMUDY
REDAKTUR	KURNIASIH ACHMAD JANI RIVAI YUSUF HORAS MAURITZ PANJAITAN MATHEOS TAN LITA DEWI WULANTIKA AJI NUR CAHYO
PENYUNTING	FRISCA NATALIA
PELIPUTAN	MUJAENI SAIDI RIFKY
PENATA LETAK DAN GRAFIS	SAIDI RIFKY

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

ALAMAT REDAKSI  
JALAN KRAMAT RAYA NO. 132, JAKARTA PUSAT  
PID@LITBANGKEMENDAGRI.COM

### Tata Kelola BUMD

Mengutip laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ada 1.097 BUMD di Indonesia dengan total aset Rp340,118 triliun. Namun, laba yang dicapai baru mencapai Rp10,372 triliun, sehingga perbandingan laba terhadap aset baru sekitar 3,05 persen. Beberapa waktu lalu, Kemendagri juga menemukan 70 persen BUMD masih mengalami kerugian. Apa yang sudah dilakukan Kemendagri untuk mendorong peningkatan kinerja BUMD selama ini.

#### - Pembaca Media BPP-

*Otonomi daerah memberikan konsekuensi yang cukup besar bagi peran dan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Laba yang dihasilkan BUMD diharapkan dapat berkontribusi pada penerimaan PAD yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal itu, tentu BUMD yang sehat menjadi salah satu kuncinya. Mendagri telah menugaskan Dirjen Keuangan Daerah melakukan evaluasi terhadap keberadaan BUMD. Untuk BUMD yang terus merugi dan membebankan APBD sebaiknya di merger atau dibubarkan. Perlu didorong tatakelola BUMD yang sehat yang mampu mendukung pemda menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kementerian Dalam Negeri mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sehat sehingga dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tak hanya itu, Pemerintah Daerah juga diminta untuk memiliki jiwa entrepreneur sehingga dapat menggali dan memberikan nilai tambah bagi PAD. Meski demikian, penyehatan BUMD maupun upaya peningkatan PAD tak lantas membuat regulasi yang justru menghambat investasi. Dengan penyehatan BUMD sebagai salah satu upaya meningkatkan PAD, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.*

Redaksi

### Berpacu dengan Era Disrupsi

Perubahan selalu menghinggapinya dalam setiap waktu serta sisi kehidupan manusia. Prof. Clayton Christensen dari Harvard University menjelaskan, perubahan dengan teori

disrupsi, menjadikan teknologi digital sebagai faktor dan instrumen guna memfasilitasi perubahan. Begitu juga penelitian dan pengembangan (Litbang) yang hadir untuk menjawab ketidakpastian masa depan. Tentunya, Litbang beradaptasi dengan menggunakan *platfom knowledge management*, yang menjadikan pengetahuan sebagai rujukan dalam menghadapi perubahan yang akan datang. Terdapat empat dimensi *knowledge management* yang menjadi pengeraknya yaitu: 1) *Knowledge Creation*; 2) *Knowledge Sharing*; 3) *Knowledge Implementing*; dan 4) *Knowledge Repository*. Dimensi tersebut selanjutnya menyempurnakan pendekatan *managing think thaks* yang menjadi pendekatan Litbang saat ini untuk menghadapi era disrupsi. Penting bagi para pengelola Litbang, sesegera mungkin mengadopsi *knowledge management* menjadi “nyawa” organisasinya, sehingga dapat lebih generatif dalam memenuhi berbagai tuntutan perubahan yang dihadapi.

#### - Imam Radianto Anwar Setia Putra Peneliti Muda BPP-Kemendagri-

*Masukan dari Saudara sangat bermanfaat bagi kami sebagai lembaga kelitbangan. Ini menjadi catatan penting untuk kemajuan Litbang saat ini dan di masa mendatang. Semua itu harus dapat diwujudkan jika sumber daya manusia yang ada di dalamnya bersinergi. Kami berharap masukan saudara bisa didengar oleh pimpinan dan pemangku kepentingan di Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri. Semoga apa yang kita cita-citakan bersama demi kemajuan lembaga Litbang bisa terwujud...*

Redaksi

Opini dan Cerpen dapat dikirim melalui email [pid@litbangkemendagri.com](mailto:pid@litbangkemendagri.com) atau melalui whatsapp di 085813258250

# MEDIA BPP

VOLUME 4 NO 6 | NOVEMBER-DESEMBER 2019

DAERAH 33  
MELANCONG KE TANAH MINANG

LAPORAN KHUSUS 12  
RAKORNAS KELITBANGAN  
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI 2019

JENDELA BPP 6-16  
AKTIVITAS 17  
KILAS BERITA 41  
GAYA HIDUP 42  
SAINS DAN  
TEKNOLOGI 44  
RESENSI BUKU 45  
RESENSI FILM 48  
SASTRA 50  
KOMIK 53  
OPINI  
INOVASI  
DI ERA DISRUPSI 54  
PENGEMBANGAN WISATA  
SUPER PRIORITAS 56  
CATATAN 58  
INFOGRAFIS 59

DAERAH 30  
SETAHUN PASCA GEMPA  
LOMBOK BARAT

LEBIH DEKAT 38  
MOHAMMAD HELMI ABIDIN,  
Koordinator Pengurangan Risiko Bencana dan  
Ketahanan Bencana UCLG Aspac

MENUNTUN DAERAH  
PAHAM BENCANA



### LAPORAN UTAMA 18-29

## SEIRAMA MENYUSUN RENSTRA

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BPP KEMENDAGRI PERIODE 2020-2024 TENGAH DISUSUN. ARAH DOKUMEN ITU AKAN MEMPERDALAM LANJUTAN KEBIJAKAN YANG SUDAH TERTUANG PADA RENSTRA PERIODE SEBELUMNYA. KOMITMEN PERANGKAT KERJA DIBUTUHKAN UNTUK MEWUJUDKANNYA.



## Mengevaluasi Data Indeks Inovasi



■ Kepala Puslitbang Inovda Matheos Tan Saat memaparkan materi dalam acara Rakornas Kelitbang di Hotel Bidakara Jakarta beberapa waktu lalu.

**P**USAT Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah (Puslitbang Inovda) BPP Kemendagri, akhir tahun ini tengah mengevaluasi konten unggahan yang terhimpun dalam sistem indeks inovasi daerah. Konten itu berisi berbagai perangkat inovasi yang diunggah pemerintah daerah dalam mengisi indeks inovasi. Evaluasi ini untuk memberikan catatan rekomendasi perbaikan kepada pemerintah daerah ihwal unggahannya.

Kepala Puslitbang Inovda Matheos Tan mengatakan, evaluasi penting karena tidak menutup kemungkinan, pemerintah daerah mengunggah konten yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sedangkan mesin aplikasi tidak dapat menilai secara detail konten unggahan tersebut. Akibatnya, skor indeks inovasi yang didapat jumlahnya akan sama dengan daerah yang kontennya sudah sesuai ketentuan. “Misalnya Perda tentang inovasi, ternyata yang di-*upload* Perda APBD, nilai skor tetap dihitung oleh mesin aplikasi,” kata Matheos, Senin (4/11).

Proses evaluasi dilakukan secara manual oleh perangkat kerja Puslitbang Inovda. Kata Matheos tenaga kerja yang dikerahkan sekira 30 orang. Jumlah itu diakuinya terlalu sedikit dibandingkan banyaknya unggahan pada sistem. Dia mengatakan, saat ini unggahan inovasi yang terhimpun sebanyak 8047. Sehingga keterbatasan itu menjadi tantangan tersendiri dalam menjalankan evaluasi. Di sisi lain, proses

tersebut juga berbarengan dengan pengerjaan kegiatan lainnya, seperti penyusunan modul untuk bimbingan teknis Pusat Jejaring Inovasi Daerah. Matheos menargetkan, evaluasi itu akan rampung pada akhir Desember 2019. “Kita akan kirim surat ke daerah, pemberitahuan ini loh bahwa Anda punya masalah,” tutur Matheos.

Jika proses evaluasi selesai, bukan tak mungkin berdampak pada pengurangan nilai indeks inovasi yang didapat pemerintah daerah. Sebab, bagi daerah yang unggahannya tidak sesuai ketentuan, nilai yang dikantongi juga bakal turut disesuaikan. “Dari 35 indikator ternyata yang masuk 12 indikator masih sekian indikator yang belum terinput,” katanya.

Dari data evaluasi itu juga akan terlihat daerah mana saja yang belum mengisi indeks inovasi daerah. Selanjutnya, data ini akan dimanfaatkan Puslitbang Inovda dalam membuat peta pembinaan untuk meningkatkan daerah berinovasi. Matheos menyebutkan, saat ini ada sejumlah daerah yang belum mengisi indeks inovasi. Padahal pelaporan inovasi yang dilakukan daerah, lanjut Matheos, sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. “Bahwa kepala daerah wajib melaporkan inovasi kepada Kementerian Dalam Negeri,” katanya. Karenanya sosialisasi itu terus digencarkan, salah satu upayanya dengan mengirimkan surat kepada daerah terkait.

Seperti diketahui, indeks inovasi menjadi bagian penting dalam memberikan penghargaan kepada daerah yang dinilai terinovasi. Penilaian itu dilakukan melalui beberapa tahapan penilaian, mulai dari skor penilaian indeks, *cross check* inovasi ke daerah masing-masing, sampai paparan kepala daerah di depan tim juri. Saban tahunnya penghargaan itu diberikan melalui ajang *Innovative Government Awards* (IGA). Pada tahun ini gelaran itu berlangsung pada Juli kemarin. Sejumlah daerah baik provinsi, kabupaten/kota berhasil menyabet penghargaan dengan sejumlah kategori, seperti kategori daerah perbatasan terinovatif, daerah tertinggal terinovatif, kabupaten terinovatif, kota terinovatif, dan provinsi terinovatif.

■ MUJAENI

## Menghimpun Saran Penilaian Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah



**B**ADAN Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri), melalui Puslitbang Otonomi Daerah, Politik, dan Pemerintahan Umum (Otda Pol-PUM) menggelar forum pembahasan hasil kajian indeks kepemimpinan kepala daerah, di Aula BPP Kemendagri, Jumat (15/11). Forum itu melibatkan sejumlah pihak, baik dari internal BPP Kemendagri maupun lainnya. Hadir pula mantan Kepala BPP Kemendagri, Affriyadi S. Hasi-buan, sebagai orang yang turut terlibat dalam penyusunan indeks tersebut.

Plt Kepala Puslitbang Otda Pol-PUM, Achmad Jani Rivai Yusuf, menyebutkan kajian itu merupakan tugas lanjutan dari kepemimpinan periode sebelumnya, dan menjadi kebutuhan mendesak untuk segera diselesaikan. Dirinya optimis, dapat merampungkan tugas tersebut. Kajian itu juga menjadi bahan masukan untuk menyusun Permendagri, sebagai payung hukum indeks penilaian kepemimpinan kepala daerah, yang muaranya sebagai landasan pemberian penghargaan. “Saya yakin teman-teman yang ada di sini mampu menyelesaikan,” ujar Jani.

Pemberian penghargaan kepada kepala daerah dinilai penting dan strategis untuk memotivasi kepala daerah dalam memimpin. Hal ini supaya berdampak pada langkah kebijakannya seperti mempercepat pembangunan, meningkatkan kinerja dan pengabdian, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kemajuan suatu daerah itu dinilai tidak dapat terlepas dari peran pemimpin yang berkualitas.

Pada kesempatan itu, Ketua Tim Peneliti, Arif Sulasdiyono, memaparkan dua konsep penilaian indeks kepemimpinan

kepala daerah. Forum itu untuk menemukan sekaligus menentukan formula yang tepat dalam mengukur indeks kepemimpinan kepala daerah.

Arif menjelaskan kedua konsep penilaian indeks yang saat ini dikantongi telah lengkap dengan sejumlah variabelnya. Dia juga memaparkan rancangan Permendagri yang bakal menjadi payung hukum indeks penilaian kepemimpinan kepala daerah. Dirinya terbuka terhadap berbagai masukan, baik konsep pengukuran indeks maupun rancangan Permendagri. “Mana yang terbaik Bapak Ibu sekalian, kami membutuhkan masukan dan tanggapan,” tutur Arif.

Merespons paparan Arif, para peserta memberikan masukan terkait isu yang sedang dibahas. Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Puslitbang Administrasi Kewilayahan, Kependudukan, dan Pemerintahan Desa, Gatot Tri Laksono, menyarankan agar rancangan Permendagri tersebut segera diproses untuk disahkan. Sebab, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sudah memberikan peringatan untuk segera diselesaikan.

Selain itu, terkait metode pengukuran indeks, menurut Gatot tidak perlu dimasukkan ke dalam Permendagri. Sebab, indeks sebagai alat ukur bersifat dinamis dan berkembang sesuai dengan kebutuhan. Oleh karenanya, metode pengukuran itu, cukup menjadi pedoman teknis setelah payung hukum terbit. “Saran saya Permendagri itu dibuat simpel, dan terkait indeks pengukuran menjadi petunjuk teknis atau pedoman pelaksanaan,” ujar Gatot.

Gatot juga menyarankan, agar Puslitbang Otda Pol-PUM dapat berkoordinasi dengan Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah yang saat ini juga tengah membangun indeks pengelolaan keuangan daerah. “Mereka sudah *running draf* Permendagrinya hampir selesai,” katanya.

Sementara itu, Affriyadi mengamini jika Permendagri memuat hal-hal yang sederhana. Artinya, indeks penilaian itu termuat dalam lampiran. Namun, lanjutnya, ketidak-tahuan indikator penilaian yang digunakan juga akan membingungkan penyusunan Permendagri. “Kalau saran saya kita buat dulu indikatornya itu, lalu kita susun Permendagri secara simpel,” tutur Affriyadi. Menurutnya, di rancangan Permendagri sudah tertera beberapa poin yang dibutuhkan. Hanya saja perlu menghapus beberapa poin yang tidak perlu dan juga segera menentukan metode pengukuran yang digunakan.

■ MUJAENI

## Akurasi Data Kependudukan untuk Menyongsong Bonus Demografi

**I**NDONESIA digadang-gadang akan mengalami bonus demografi. Kondisi ini diyakini membawa berkah bagi pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain juga menjadi ancaman jika tidak dipersiapkan secara baik. Seperti diketahui, masa bonus demografi ialah saat jumlah masyarakat produktif lebih dominan ketimbang penduduk usia tidak produktif.

Persiapan menghadapi bonus demografi salah satunya dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang sehat, berpendidikan, dan berketerampilan. Upaya itu dapat dicapai melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dengan mengacu pada data kependudukan yang akurat. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan data kependudukan yang dihimpun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebagai salah satu penyedia data yang valid, andal, dan dinamis. Namun sayangnya, saat ini pemanfaatan data itu terutama oleh pemerintah daerah dinilai masih belum maksimal.

Persoalan inilah yang berusaha disingkap oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri, melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, dan Kependudukan (Puslitbang Adwil, Pemdes, dan Kependudukan). Belum lama ini unit tersebut mengkaji ihwal “Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Perencanaan Pembangunan Menyongsong Bonus Demografi”. Kajian dilakukan di tiga provinsi, yakni Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Hasil kajian itu dipaparkan kepada sejumlah per-

wakilan pemerintah daerah, di Hotel Travellers, Jakarta Pusat, Selasa (19/11).

Persoalan keakuratan data penduduk menjadi sandungan dalam melakukan pembangunan. Kepala BPP Kemendagri, Dodi Riyadmadji, dalam sambutannya menyebutkan masyarakat merupakan subjek penting yang masuk dalam rencana pembangunan. Oleh karenanya, data terkait itu tidak boleh dimasukkan secara sembarangan. Ia mencontohkan sebuah program yang tidak tepat sasaran akibat data penduduk yang tak akurat. “Misalnya, dalam memberikan bantuan sosial di Papua itu ternyata banyak yang tidak cocok dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan), ini baru contoh di Papua,” kata Dodi.

Dodi mengaku, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menginginkan agar dokumen perencanaan disusun secara detail. Supaya saat menemui DPR dalam pembahasan anggaran, dapat memaklumi sekaligus memahami kegiatan dan sasaran hasil yang sudah diagendakan.

Selain itu, di era revolusi industri 4.0, bonus demografi juga mendapat tantangan tersendiri. Saat tenaga kerja Indonesia belum meningkat kualitasnya, justru pemanfaatan teknologi seperti robotisasi dalam proses produksi kian masif. “Pembangunan sumber daya manusia di Indonesia, ini akan menghadapi persoalan besar,” katanya.

Kepala Puslitbang Adwil, Pemdes, dan Kependudukan, Kurniasih, mengamini maraknya penggunaan teknologi di sejumlah pabrik. Ia mencontohkan salah satu pabrik di Sidoarjo Jawa Timur yang mempekerjakan segelintir orang



karena ditunjang penggunaan robot. Selain itu, beberapa profesi seperti pengacara, dokter, supir di beberapa negara maju sudah tergantikan teknologi. Perubahan ini mesti disiapkan oleh pemerintah termasuk di tingkat daerah, terutama dalam penguatan SDM. “Siapkah kita menyongsong industri saat ini 4.0 menuju 5.0, ini tantangan besar,” tutur Kurniasih. Dia berharap dengan kajian ini, dapat memberikan masukan kepada Menteri Dalam Negeri dalam memanfaatkan bonus demografi.

### Hasil kajian

Ketua tim peneliti, Hari Prasetyo, menjelaskan kajiannya menyoroti tiga persoalan terkait data kependudukan sebagai bekal menyongsong bonus demografi. Pertama, mengulas dukungan kebijakan pemerintah daerah terkait administrasi kependudukan. Kedua, persoalan pendidikan dan kesehatan yang dialami pemerintah daerah. Ketiga, menyoal upaya pemanfaatan data kependudukan untuk perencanaan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.

Dalam kajiannya, Hari menemukan peraturan terkait administrasi kependudukan belum dimiliki semua lokus kajian. Hal itu dialami Banten, yang

berbeda dengan dua daerah lainnya yang sudah mengantongi aturan tersebut. Belum meratanya kepemilikan aturan itu, menunjukkan penerbitan data kependudukan sebagai acuan rencana pembangunan belum menjadi prioritas. Selain itu, meski dua daerah lainnya memiliki regulasi, akan tetapi muatannya beragam antara satu dengan lainnya. “Kami melihat belum adanya standar penyajian data kependudukan yang terstruktur dari tingkat pusat, sehingga masing-masing daerah membuat sendiri bentuk penyajian, mengatur sendiri bagaimana pemanfaatannya,” katanya.

Di samping itu, lanjut Hari, unit yang mengelola urusan kependudukan dan pencatatan sipil di masing-masing lokus kajian juga beragam. Di Jawa Barat misalnya, urusan itu dikelola oleh unit setingkat eselon II. Berbeda dengan Banten dan Jawa Tengah yang masih dikelola oleh level unit eselon III. Padahal, tingkatan itu memengaruhi jumlah perangkat kerja dan anggaran, yang dampaknya pada kemampuan penyajian sekaligus pemanfaatan data secara maksimal.

Hari mengusulkan, pengelolaan urusan kependudukan dan catatan sipil mestinya dilakukan pada level unit kerja eselon II dan tidak digabungkan dengan unit lain. Guna menjadikan data Kemen-

dagri yang berkualitas, ia menyarankan adanya penguatan infrastruktur teknologi dan SDM.

Sementara itu, untuk persoalan masyarakat pada bidang pendidikan dan kesehatan, Hari menemukan isu-isu yang disusun lokus kajian hampir serupa. Isu itu misalnya, terkait kualitas kehidupan, daya saing SDM, kemiskinan, pengangguran, tata kelola pemerintahan, dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan pada aspek pendidikan, misalnya masih rendahnya mutu kelulusan, belum optimalnya tata kelola dan akses pendidikan, belum optimalnya sinergi pendidikan dan tenaga kerja, rendahnya partisipasi sekolah. Sedangkan bidang kesehatan, Hari mendapati masih banyaknya kasus kematian ibu dan anak, belum optimalnya pencegahan dan pengendalian penyakit, perilaku bersih dan sehat, masih ditemuinya gizi buruk, dan sejumlah persoalan lainnya.

Jika persoalan itu terus berlangsung, maka akan berdampak pada makin rendahnya kualitas SDM. Akibatnya, suplai tenaga kerja produktif menjadi terbatas. Daya saing daerah tersebut menjadi rendah, dan terkalahkan oleh daerah lain yang lebih produktif. Situasi ini bakal menimbulkan angka kemiskinan kian meningkat, dan maraknya kriminalitas. “Secara berlanjut hal ini

juga akan berakibat pada perekonomian nasional,” katanya.

Menurut Hari, pemerintah provinsi harusnya mampu mengantisipasi isu-isu yang dapat memengaruhi bonus demografi, melalui perencanaan yang matang. Salah satu langkahnya, dengan membuat desain besar persiapan bonus demografi. Hari menemukan memang belum semua provinsi menyiapkan desain tersebut. Meski begitu, kesiapan menghadapi bonus demografi direspons dengan kebijakan yang beragam. Misalnya, lewat regulasi pembangunan kepemudaan, desain besar pembangunan kependudukan, dan sebagainya.

Selain itu, terkait data kependudukan di tingkat provinsi memang belum tersaji dan tersosialisasi secara luas, baik potensi maupun manfaatnya. Kondisi ini akibat pengelolaan masih terkendala infrastruktur teknologi dan SDM. Di samping itu, belum terbinanya kerja sama antar-instansi dalam mengakses data. Akibatnya, data kependudukan belum tersebar dengan mudah, cepat, dan tepat kepada instansi terkait sebagai modal perencanaan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan. Padahal keberhasilan bonus demografi perlu didukung banyak pihak. Oleh karenanya, Hari mengusulkan, agar sosialisasi lebih gencar dilakukan dengan didukung kepala daerah, supaya pemanfaatan data lebih optimal.

Hadir sebagai narasumber, Dosen Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama), Triyuni Soemarsono, mengapresiasi hasil penelitian yang disuguhkan. Meski ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Seperti penyusunan rekomendasi yang akurat, di mana harus mampu menunjukkan aspek penting yang mesti dibenahi. Hal itu dibutuhkan agar Kemendagri atau pemangku kepentingan terkait, dapat melakukan intervensi kebijakan secara tepat. “Secara teknis seluruh pertanyaan penelitian dan tujuan sudah dijawab,” katanya.

■ MUJAENI

## BPP Kemendagri Kaji Kawasan Ekonomi Khusus

UNTUK menguatkan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah menerapkan kebijakan pengembangan zonasi seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Namun 10 tahun kebijakan tersebut bergulir, KEK tidak serta merta memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi. Dari 13 KEK yang sudah diresmikan pemerintah saat ini, belum ada satu pun yang benar-benar dikatakan maju dan menjadi percontohan. Progres pengembangan dan pembangunan 13 KEK masih berjalan lambat, ini tercermin dari rendahnya serapan tenaga kerja serta realisasi investasi untuk proyek-proyek tersebut.

Problematika tersebut menjadi isu menarik yang didiskusikan dalam Forum Diskusi Aktual (FDA), terkait Kolaborasi Pusat-Daerah dalam Mengoptimalkan Kawasan Ekonomi Khusus sebagai Stimulus Perekonomian Daerah. FDA tersebut diinisiasi oleh Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri, dan dilaksanakan pada Kamis (31/10).

Hadir sebagai Narasumber di antaranya Peneliti Senior CSIS Jakarta Raymond Atje, Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara Kemendagri Thomas Umu Pati, dan Humas Kemenko Perekonomian Ahmad Buchori. FDA juga dihadiri oleh para peserta dari berbagai OPD di daerah terkait pengelolaan KEK.

Permasalahan KEK seperti tidak pernah selesai. Salah satu yang paling nampak di hadapan publik adalah dualisme pengelolaan KEK di Batam yang dinaungi permasalahan ketidakjelasan garis kewenangan. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah hingga kini juga belum terlihat progress dan hasilnya.

Masih banyaknya permasalahan KEK selama ini juga diakui oleh Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara Kemendagri Thomas Umu Pati. Menurutnya solusinya adalah, pemerintah daerah harus mengevaluasi menyeluruh terkait pembentukan KEK di daerahnya. Pemerintah daerah juga harus berani mengatakan bahwa KEK tersebut gagal. Ia juga mengakui sulitnya koordinasi antar-lembaga pengelola. "Kita sering menemukan fakta-fakta di lapangan, seperti contoh ada Badan Otorita pengelola tidak saling kenal," tuturnya.

### Infrastruktur dan regulasi



Menurut Thomas, permasalahan KEK selanjutnya, adalah terkait infrastruktur. Banyak KEK seperti lambat beroperasi karena tidak didukung infrastruktur yang memadai. Sebagai contoh KEK Tanjung Lesung tidak didukung oleh keberadaan infrastruktur seperti jalan tol.

Pernyataan Thomas juga diakui oleh salah seorang peserta yang menangani KEK Tanjung Lesung. Menurutnya solusi yang paling rasional adalah pemerintah pusat harus mendukung pembangunan infrastruktur seperti rel kereta api, bandara, dan juga tol. "Itu sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan selama beberapa tahun sejak diresmikan," ucapnya.

Terkait infrastruktur, Bappeda Maluku Utara Dedi menyayangkan belum tepatnya regulasi dalam hal pengembangan KEK terutama dalam pembangunan infrastruktur dan perizinan investasi. Misalnya KEK Morotai tidak didukung dengan infrastruktur memadai seperti keberadaan bandara internasional, dan infrastruktur penunjang di daerah sekitarnya. "Maka jangan berharap Morotai layaknya Mandalika yang dibiayai negara. Morotai dibiayai oleh swasta. Kita tidak bisa berkembang, padahal harapan kita semua ada pusat pertumbuhan baru di sana," terangnya.

Dedi juga menyayangkan banyaknya regulasi yang membuat investor lari. Selain tidak ada bandara internasional karena harus ada syarat-syarat khusus, juga terkait regulasi antar-kementerian. "Misalnya investor banyak lari karena ada regulasi yang tidak mereka terima. Pernah ada perusahaan Taiwan akan membangun perusahaan ikan. Mereka tidak diperbolehkan membawa kapal dari negaranya, akhirnya mereka tidak jadi," keluhnya.

### Layak secara komersil

Beberapa fakta-fakta yang terjadi dalam pengelolaan KEK

menjadi perhatian khusus Raymod Atje Peneliti CSIS. Menurut Atje, banyak KEK tidak begitu moncer, salah satunya dikarenakan pemerintah kurang memerhatikan *commercially viable* (layak secara komersial) sebuah kawasan ketika daerah mengusulkan. Pemerintah menurut Atje harus bisa memastikan perusahaan dan kawasan bisa untung dalam jangka panjang.

Atje juga menilai kawasan seperti Morotai dan Bitung adalah kawasan yang kelayakan komersilnya diragukan. Ia menekankan pada letak geografis yang jauh dengan jumlah penduduk yang sedikit. Begitu juga dengan Bitung yang hanya memiliki jumlah penduduk sekira 2 juta jiwa. "Jangan sampai terjadi seperti Batam. Artinya KEK di kawasan bersangkutan harus punya peluang besar untuk berhasil. Artinya, dalam jangka panjang kawasan yang dimaksud bisa menarik investasi dalam jumlah besar, sehingga perekonomian di sana akan tumbuh secara berkesinambungan," ungkapnya.

Humas Kemenko Perekonomian Ahmad Buchori mengatakan permasalahan pengelolaan KEK bukan hanya masalah kelayakan komersil, tetapi juga kemampuan kepala daerah. Misalnya menurut Buchori, banyak kepala daerah yang mengusulkan, namun tidak mampu menarik investor. Selain itu juga banyak kepala daerah yang tidak mampu menguasai lahan. "Penguasaan lahan juga menjadi kendala, KEK yang ada belum berhasil. Mereka mengajukan tetapi mereka juga tidak bisa menguasai lahan," terangnya.

Selain itu, kompetensi pengelola KEK juga menjadi permasalahan. Patologi birokrasi dianggap masih menjadi beban kelembagaan KEK selama ini. Bahkan menurut Thomas, banyak KEK yang masih dikelola pejabat daerah yang tidak profesional. "Ketika tidak profesional mereka tidak akan berorientasi kepada keuntungan tapi lebih mempertimbangkan sosial politik sebagai pejabat publik. Ini juga menjadi contoh

banyak perusahaan daerah tidak pernah maju," ucapnya.

### Rekomendasi kajian

Terkait dengan kajian KEK tersebut, Pusat Litbang Pembangunan dan Keuda BPP Kemendagri memberikan beberapa poin rekomendasi. Horas Maurits Panjaitan Kepala Puslitbang Pembangunan dan Keuda BPP Kemendagri mengatakan, perlu ada peningkatan kolaborasi antara Kementerian Dalam Negeri dengan Dewan Nasional KEK dalam memanfaatkan KEK sebagai stimulasi perekonomian daerah.

Menurut Mauritz peningkatan kolaborasi perlu dititikberatkan pada aspek-aspek seperti; a) peningkatan kualitas dan jangkauan peraturan terkait; b) penegasan kedudukan SDM Administrator; c) akselerasi kebijakan insentif dalam KEK; d) penentuan batas-batas kekhususan kebijakan KEK terutama hubungan antara investor dengan *stakeholders* dan implementasi OSS; e) tata kelola penyusunan studi pendukung yang menyesuaikan karakteristik daerah, dan; f) inisiasi penyusunan *omnibus law* untuk menyederhanakan dan menyinergikan ragam substansi yang tersebar dalam paket peraturan mengenai kebijakan KEK.

Selain itu, menurut Maurits menyarankan agar Kementerian Dalam Negeri cq. Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan mengupayakan langkah-langkah seperti; a) Menguatkan kebijakan kewilayahan dalam rangka mendukung Kawasan Ekonomi Khusus; b) Menguatkan partisipasi aktif Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan sebagai anggota tim pelaksana Dewan Nasional KEK; c) Meningkatkan kualitas dan intensitas sosialisasi paket peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan KEK di daerah; d) Mengintegrasikan substansi UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta turunannya dengan peraturan lain dalam satu paket peraturan mengenai KEK; e) Berkoordinasi dengan Ditjen Otonomi Daerah dalam menentukan derajat kekhususan otonomi kawasan dalam pelaksanaan fungsi KEK;

"Selanjutnya Bina Adwil perlu berkoordinasi dengan Ditjen Bina Keuangan Daerah dalam mengakselerasi kebijakan insentif daerah, mekanisme investasi, penguatan struktur modalan (KPBU dan sumber pendanaan lain), dan penyesuaian OSS dalam mendukung kebijakan KEK di daerah," tambah Maurits.

Saat ini usulan KEK terus bertambah, data terbaru dari Kemenko Perekonomian ada beberapa usulan baru. Berdasarkan data Dewan KEK, dari 13 proyek KEK yang ditargetkan beroperasi pada 2019, baru 6 yang berhasil diresmikan. Padahal, tahun ini menjadi penentuan bagi pemerintah untuk memenuhi salah satu target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), yaitu mengoperasikan 12 KEK. Ada pun, realisasi investasi di 12 proyek tersebut baru Rp 17,7 triliun per November 2018 dari komitmen yang ditargetkan senilai Rp 104,54 triliun. Sementara itu, serapan tenaga kerjanya hanya 10.700 orang per November 2018 dari estimasi kebutuhan sebanyak 695.783 orang.

SAIDI RIFKY

## Inovasi Daerah dan Pengembangan Iptek Menjadi Fokus Rakornas Kelitbangan 2019

Pentingnya menghadirkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan persoalan bangsa menjadi tantangan bagi pemerintah saat ini. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada, harus berbasis pada sumber daya domestik dan membuka peluang lebih luas bagi anak bangsa untuk berpartisipasi. Untuk itu, pengembangan iptek yang demikian menjadi modal dasar untuk mewujudkan hasil kelitbangan dan sistem inovasi di semua sektor pembangunan pemerintahan dalam negeri. Pernyataan tersebut dikatakan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri Dodi Riyadmadji saat membuka acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kelitbangan Pemerintahan Dalam Negeri di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis, (21/11).

**R**AKORNAS Kelitbangan kali ini mengusung tema Penguatan Lembaga Litbang Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Kebijakan dan Memacu Inovasi Daerah. Rakornas juga mengangkat isu terkait UU Sisnas Iptek dan juga keberadaan lembaga baru seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Sebagai Kepala BPP Kemendagri, Dodi mengapresiasi kinerja Lembaga kelitbangan di daerah selama ini. Tidak sedikit lembaga litbang daerah yang melakukan pengembangan iptek sehingga berujung pada inovasi yang dilakukan pemerintah daerah, sehingga secara rutin BPP Kemendagri memberikan penghargaan tinggi berupa *Innovative Government Award (IGA)*. “IGA ini berawal dari indeks inovasi yang dicatat dan diinput oleh BPP Daerah. Jadi, kolaborasi dan kerja sama keduanya sudah cukup baik,” ucap Dodi.

Namun di sisi lain, Dodi juga masih menyayangkan citra lembaga litbang baik di pusat (BPP Kemendagri) dan daerah (BPP Daerah) saat ini masih belum positif. Hasil kelitbangan yang diproduksi pun masih dianggap kurang mampu memberikan kontribusi yang nyata dan signifikan bagi perumusan kebijakan dan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat guna memajukan peradaban bangsa. “Kenyataan ini terkait dengan isu yang sangat fundamental dan tidak kunjung tuntas sampai hari ini, yakni masalah minimnya sumber daya (baik orang, uang, maupun alat) dan orientasi riset yang belum terfokus pada penyediaan solusi bagi persoalan nyata yang dihadapi masyarakat, pemerintah, atau dunia usaha,” terangnya.

### Penguatan lembaga

Dalam Rakornas tersebut, Dodi juga memberikan arahan untuk memperkuat eksistensi lembaga litbang daerah.

Menurutnya untuk memperkuat eksistensi tersebut setiap lembaga harus memiliki kapasitas untuk menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi yang berasal dari luar (*sourcing capacity*). Selain itu, litbang juga harus memiliki kapasitas melakukan riset dan pengembangannya, serta memiliki kapasitas untuk mendiseminasikan pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan (*disseminating capacity*).

“Oleh karenanya, pembenahan dan penguatan lembaga litbang memang harus segera dilakukan. Dan, karena

kelemahan lembaga litbang terdeteksi hampir di semua lini, maka upaya pembenahan wajib dilakukan dengan berpegang pada prinsip *good governance*,” tuturnya.

Penguatan kelitbangan menurut Dodi merupakan jalan mutlak. “Lembaga litbang harus diperkuat, tanpa beberapa hal yang telah saya sampaikan, tema rakornas yang sangat penting ini hanya akan menjadi kemubaziran. Kita tentu tidak ingin persoalan kelitbangan hanya berputar-putar pada tema penguatan, penguatan, dan penguatan

lagi. Saya berharap, tahun depan dan pada rakornas-rakornas litbang yang akan datang tema penguatan litbang tidak lagi menjadi tema rakornas, karena kita sudah mulai menguat,” katanya.

### Menyoal BRIN

Rakornas Kelitbangan juga menyinggung isu Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Isu BRIN mengemuka setelah pemerintah menerbitkan UU No 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas Iptek). UU tersebut me-

munculkan kekhawatiran bagi lembaga kelitbangan yang berada di bawah Kementerian/Lembaga, juga lembaga kelitbangan yang ada di daerah. Beberapa peserta menganggap regulasi tersebut bisa menghapuskan eksistensi lembaga mereka dan melebur dalam naungan Kemenristek sebagai koordinator BRIN.

Terkait hal ini Muhammad Dimiyati, Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ BRIN dalam Rapat Pleno dengan tema penguatan lembaga lit-



bang daerah, mengatakan para peserta agar tidak perlu khawatir. Menurutnya kehadiran BRIN justru akan memperkuat keberadaan lembaga kelitbangan baik di pusat dan di daerah.

“Keberadaan BRIN untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Inovasi dan Inovasi. BRIN juga sebagai upaya untuk mengarahkan dan menyinergikan antara lain dalam penyusunan perencanaan, program, anggaran, dan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi bidang penelitian, pengembangan, pengkajian,” ucapnya.

Kehadiran BRIN, tambah Dimiyati, bisa memastikan agar target prioritas riset nasional tercapai secara bersama sesuai yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, serta memastikan tidak ada anggaran yang tercecer. Selama ini menurut Dimiyati, banyak kegiatan riset tumpang tindih yang dilakukan baik oleh Kementerian/Lembaga juga oleh swasta. Dan riset tersebut dibiayai oleh negara.

Ia mencontohkan penelitian varietas padi dan pohon jati yang dikembangkan oleh banyak K/L. Beberapa temuan tersebut tidak memberikan dampak signifikan terhadap produktivitas yang diharapkan. Padahal, jika dilakukan dengan terintegrasi, dan melakukan kajian dari berbagai sisi, maka bisa dipastikan produktivitas padi dengan target 10 ton/hektar bisa tercapai, dengan efisien dan bernutrisi tinggi.

“Prinsip dasar yang paling penting adalah BRIN memiliki kewenangan untuk mengoordinasikan pelaksanaan riset baik yang dilakukan oleh lembaga non-pemerintah maupun yang di bawah kementerian dan lembaga pemerintah lainnya. Khusus untuk fungsi koordinasi lembaga pemerintah, BRIN akan memiliki kewenangan memastikan jumlah pagu anggaran dan kesesuaian penelitian dan pengembangan dengan rencana induk pemajuan iptek nasional,” ucapnya.



### Inovasi Banyuwangi

Dalam kesempatan yang sama, Rakornas Kelitbangan juga menghadirkan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Dalam kesempatan tersebut Anas bercerita tentang strateginya mengangkat Banyuwangi menjadi daerah yang paling berhasil di Indonesia sejauh ini. Banyak penghargaan dari dalam dan luar negeri yang didapatkan Anas selama memimpin Banyuwangi karena inovasi yang dilakukannya.

Anas memaparkan pentingnya langkah terobosan bagi pemerintah daerah. “Kita di daerah punya keterbatasan dana, SDM, dan waktu. Maka harus berinovasi, bikin langkah *antimainstream*. Kalau tidak, ya pengembangan daerah bakal *flat*,” ujar Anas.

Dalam kesempatan itu, Anas juga memaparkan beberapa pelayanan publik *anti-mainstream* yang sudah dikerjakan di Banyuwangi. Mulai dari Setiap Dinas adalah Dinas Pariwisata, Dari Kota Santet Menuju Kota Internet, Semakin Terbawah Semakin Prioritas Teratas, Semakin Misteri Semakin Diminati, Semakin Tersembunyi Semakin Dicari, hingga Rumah Sakit Bukan Tempat Orang Sakit.

“Contoh langkah *anti-mainstream* adalah paradigma kita bahwa setiap dinas adalah dinas pariwisata adalah

wujud dari *tourism centered economy*, ekonomi yang bersumbu pada pariwisata. Maka contohnya, sektor perindustrian bergerak ke pariwisata dengan mendorong pengembangan Museum Kereta Api saat PT INKA dalam proses membangun pabrik kereta terbesar se-ASEAN di Banyuwangi,” jelas Anas.

Dalam hal pelayanan publik, Anas juga menekankan proses transformasi berdasarkan pendekatan ‘Dari Kota Santet Menuju Kota Internet’. Pendekatan ini mengubah Banyuwangi yang dulu dikenal dengan citra klenik, kini menuju daerah dengan pelayanan publik berbasis digital. Terbukti, sebanyak 189 desa kini sudah teraliri *fiber optic* untuk menunjang pelayanan publik.

■ SAIDI RIFKY

“**SETIAP DINAS (SKPD) ADALAH DINAS PARIWISATA**”



## MEMACU DAERAH AGAR MAU BERINOVASI

**B**ADAN PENELITIAN dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri), terus berupaya meningkatkan daerah agar berinovasi. Melalui Puslitbang Inovasi Daerah, BPP Kemendagri meluncurkan berbagai kebijakan untuk sukseskan misi tersebut. Kebijakan itu seperti, membangun indeks inovasi daerah, membuat layanan Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah), memberi penghargaan bagi daerah yang berinovasi (*Innovative Government Award*), dan beberapa program lainnya.

Hal itu diungkapkan Kepala Puslitbang Inovasi Daerah, Matheos Tan, saat menjadi narasumber pada gelaran Rakornas Litbang Pemerintahan Dalam Negeri 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (21/11). Kegiatan ini diinisiasi BPP Kemendagri sebagai ba-

gian dari pembinaan sekaligus penyerapan aspirasi litbang daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota. Adapun tema yang diusung yakni Penguatan Lembaga Litbang Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Kebijakan dan Memacu Inovasi Daerah.

Matheos menjelaskan, bagaimana peran indeks inovasi daerah dalam meningkatkan daerah berinovasi. Indeks merupakan himpunan inovasi yang diunggah oleh daerah. Melalui unggahan itu akan melahirkan kategori daerah paling berinovasi yang bakal diganjar dengan pemberian penghargaan. Lewat indeks pula, BPP Kemendagri dapat mengetahui daerah mana saja yang perlu didampingi karena tingkat inovasinya dinilai masih rendah. “Kami akan membantu Bapak dan Ibu untuk bagaimana melakukan inovasi maupun replikasi terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat tata

kelola pemerintahan, pelayanan publik, maupun bentuk inovasi lainnya,” katanya.

Namun sayangnya, saat ini tidak sedikit daerah yang belum mengisi indeks inovasi daerah. Matheos menjelaskan kondisi itu dialami daerah baik provinsi, kabupaten/kota yang belum perhatian terhadap layanan tersebut. “Kalau liat grafik, di provinsi ada yang sangat inovatif, ada yang inovatif dan kurang inovatif. Yang paling parah adalah belum mengisi data,” kata Matheos sambil menunjukkan data. Ia menyarankan, agar pemerintah daerah terutama provinsi merespons program tersebut. Terutama daerah bagian tengah dan timur yang tingkat pengisiannya masih rendah.

Adapun alur penilaian penghargaan daerah terinovasi itu, yakni data yang sudah diunggah ke dalam aplikasi

indeks inovasi daerah akan dinilai berdasar sistem komputerisasi. Data itu kemudian merangking skor pemerintah yang memunculkan nominator penghargaan. Untuk memastikan data yang diunggah valid, tim penilai juga mengecek ke masing-masing daerah nominator. Pada ujung penilaian, kepala daerah diminta memaparkan berbagai capaian inovasi sekaligus komitmennya di depan tim penilai yang terdiri dari sejumlah pihak.

### Tingkatkan inovasi

Untuk meningkatkan daerah berinovasi, daerah dapat mereplikasi layanan berbasis aplikasi yang ada di Puja Indah. Saat ini layanan itu berisi tujuh urusan berbasis aplikasi, seperti perizinan, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, administrasi kependudukan, perdagangan, dan aplikasi penyerapan aspirasi untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Layanan itu, kata Matheos, dibangun untuk membantu daerah yang masih tertinggal. Ia tidak memungkiri ada sejumlah daerah yang telah memiliki layanan berbasis aplikasi yang sistemnya dibangun lebih baik dari Puja Indah. “Kalau Bapak dan

Ibu punya uang Rp. 300 juta itu bisa membuat satu atau dua aplikasi, tetapi dengan Puja Indah bisa mendapat aplikasi dengan cuma-cuma,” ujarnya

Matheos menambahkan sejumlah masukan yang perlu dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan inovasi. Menurutnya, pemerintah daerah perlu mendorong ide-ide kreatif untuk mendorong munculnya berbagai inovasi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), atau yang dikenal dengan istilah *one innovation one agency*. Selain itu, perlu juga membentuk tim kerja pembina inovasi daerah untuk memasukkan data inovasi daerah ke dalam aplikasi indeks inovasi daerah. Pemerintah daerah juga dianjurkan menyediakan berbagai data dukung pengisian indeks inovasi daerah. “Perlu diperhatikan kelengkapan data dukung, berupa Perda/Perkada, video inovasi, manfaat inovasi, survei kepuasan, layanan pengaduan dan sebagainya,” kata Matheos.

Sementara itu, untuk penerapan layanan Puja Indah, Puslitbang Inovasi Daerah memiliki sejumlah daerah yang menjadi *pilot project*. Pada forum itu,

hadir dua daerah yang sudah mereplikasi layanan yang ada di Puja Indah sebagai narasumber. Kedua daerah itu yakni Kabupaten Musi Rawas yang langsung diwakili Bupatiya, Hendra Gunawan, dan Kabupaten Labuhanbatu yang diwakili Kepala Litbang, Hobol Zulkiffi.

Mereka banyak bercerita terkait ikhtiar yang dilakukan dalam meningkatkan inovasi di daerahnya masing-masing. Termasuk peran replikasi inovasi yang termuat dalam layanan Puja Indah. Hobol mengaku, layanan Puja Indah telah memberikan dampak baik bagi laju inovasi di daerahnya. Dirinya juga terbuka untuk mereplikasi inovasi dari daerah lain. Meski ia juga memberi sejumlah masukan perbaikan bagi layanan Puja Indah agar semakin baik. Masukan itu seperti adanya keintegrasian data dengan pangkalan data yang ada di nasional agar pengisiannya tak berulang, perlunya unit khusus yang disediakan BPP Kemendagri dalam melayani usulan perbaikan aplikasi, serta bantuan promosi secara nasional dengan memanfaatkan kanal-kanal iklan.

■ MUJAENI



## Kaji Penanganan Sampah, Maurits Raih Gelar Doktor

**K**EPALA Pusat Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Puslitbang Pembangunan dan Keuda), Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri), Horas Maurits Panjaitan, mendapat gelar Doktor di bidang ilmu pemerintahan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Maurits lulus usai mempertahankan disertasinya dalam ujian terbuka, Rabu (6/11).

Disertasi yang membawa Maurits berhasil menyandang gelar doktor itu berjudul “Tata Kelola Kolaboratif Penanganan Sampah di Provinsi DKI Jakarta”. Kajian itu berangkat dari keberadaan sampah yang masih menjadi permasalahan serius di kota-kota besar seperti Jakarta. Semakin bertambah jumlah penduduk dan padatnya aktivitas, berdampak pula pada meningkatnya volume sampah. Misalnya, pada 2016 penduduk DKI Jakarta sekira 10,25 juta dengan produksi sampah sekira 7.099,08 meter kubik. Angka itu meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 7046,39 meter kubik. “Di luar kepadatan penduduk, tingginya produksi sampah ini juga disebabkan banyaknya industri yang berkembang di kota tersebut,” kata Maurits.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sempat mengalami pengalaman kurang baik dalam menjalankan kebijakan kolaborasi ihwal tata kelola sampah. Saat itu beberapa pihak berseteru, di antaranya Pemerintah DKI Jakarta, Komisi D DPRD DKI Jakarta, PT. Godang Tua Jaya, dan Komisi A DPRD Bekasi. Tata kelola kolaborasi dalam pengelolaan sampah diakui memiliki persoalan yang cukup kompleks.

Sementara itu, saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menginisiasi kebijakan kolaborasi terkait pengelolaan sampah yang terangkum dalam proyek *Intermediate Treatment Facilities (ITF)*. Kegiatan ini diyakini menjadi jurus ampuh dalam mengatasi kompleksitas persoalan sampah di Jakarta.

Fokus penelitian yang dilakukan Maurits ini, mengkaji bagaimana tata kelola kolaboratif tersebut, meliputi model desain kelembagaan, serta faktor pendukung dan hambatan baik internal maupun eksternal. Secara empiris tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah yang diterapkan Pemerintahan DKI Jakarta, yaitu dengan melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam hal ini PT. Jakro. Selain itu ada pula pihak swasta, masyarakat, DPRD, dan *stakeholders* terkait.

Kolaborasi antarpihak ini merupakan wujud dari beragam pendekatan yang diterapkan untuk pengambilan keputusan dalam memecahkan berbagai persoalan. Dalam hal ini Dinas



Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta sebagai unit kerja yang menangani persampahan. Kolaborasi itu berupa pelibatan dalam forum diskusi, dialog, maupun rapat-rapat perumusan kebijakan.

Namun dalam pelaksanaannya, sering kali aktor yang diundang dalam forum itu tidak hadir atau hanya diwakili oleh staf. Akibatnya, rapat sosialisasi untuk membangun pemahaman bersama menjadi tidak efektif karena tidak merepresentasikan organisasi tersebut. Meski begitu, data-data pendukung seperti bahan paparan narasumber mudah didapatkan. Sehingga, ini memudahkan Dinas Lingkungan Hidup memahami alur dan tahapan kolaborasi.

Selain itu, pembangunan ITF juga belum banyak tersampaikan dengan baik kepada pemerhati lingkungan. Akibatnya menimbulkan pertanyaan terkait dampak proyek tersebut. Salah satu yang dikhawatirkan adalah mengenai dampak lingkungan yang imbasnya kepada khalayak.

Dengan temuan hasil kajian ini, kebijakan yang dapat disarankan adalah mengoptimalkan koordinasi dan sinergitas dalam memecahkan berbagai hambatan dan kendala dalam penyelenggaraan ITF. Termasuk mengenai isu yang dipersoalkan para pemerhati lingkungan. “Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai hambatan dan kendala, maka dibutuhkan dialog dan rapat-rapat lanjutan antar-*stakeholders* untuk mendapat pemahaman bersama,” kata Maurits.

Dalam membangun visi misi bersama terkait pembangunan, desain organisasi tata kelola kolaborasi jangan lagi bersifat konvensional atau non kemitraan. Dalam era pemerintahan *good governance*, dan *open government*, tata kelola itu harus dipahami sebagai bentuk kerja sama kemitraan sehingga terbangun semangat bersama, yakni berorientasi kepada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Maurits menawarkan desain kelembagaan yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintahan DKI Jakarta, yang diberi nama MAURITS model. Kata MAURITS sendiri, singkatan dari (*Modern, Authority, Understanding, Review, Innovation Process, Transparency, Sustainable Development Goals*). Dirinya berharap dengan model itu dapat menciptakan kemajuan dalam kolaborasi yang dihadapi pemerintah daerah, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

■ MUJAENI

LAPORAN UTAMA

# SEIRAMA MENYUSUN RENSTRA

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BPP KEMENDAGRI PERIODE 2020-2024 TENGAH DISUSUN. ARAH DOKUMEN ITU AKAN MEMPERDALAM LANJUTAN KEBIJAKAN YANG SUDAH TERTUANG PADA RENSTRA PERIODE SEBELUMNYA. KOMITMEN PERANGKAT KERJA DIBUTUHKAN UNTUK MEWUJUDKANNYA.



**M**EMASUKI masa pemerintahan baru periode 2019-2024, Kementerian dan lembaga—termasuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)—tengah disibukkan dengan agenda penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra). Dokumen itu merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang juga identik sebagai wadah janji politik presiden terpilih. Keberadaan Renstra penting sebagai pemandu penerapan kebijakan bagi masing-masing kementerian maupun lembaga. Setiap tahunnya, poin-poin yang tertuang di dalam dokumen tersebut juga bakal diterjemahkan menjadi Rencana Kerja (Renja).

Untuk menyusun Renstra di tingkat kementerian, para komponen Kemendagri termasuk Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri, beberapa kali menggelar forum pertemuan. Kegiatan itu sudah dilakukan jauh sebelum RPJMN disahkan. Meski belum mengantongi RPJMN, baik kementerian dan lembaga memang sudah menyiapkan kerangka dokumen Renstra. Begitu pula dengan Renstra di tingkat komponen, seperti BPP Kemendagri. Upaya itu dilakukan karena masa tenggang penerbitan RPJMN dan Renstra hampir berbarengan, meski secara alur penyusunannya menggunakan skema berjenjang.

Meski begitu, Kepala BPP Kemendagri, Dodi Riyadmadji, memastikan secara keseluruhan penyusunan itu tetap menunggu RPJMN rampung. Diperkirakan dokumen RPJMN terbit pada akhir Desember 2019. Sementara untuk kegiatan pada 2020, BPP Kemendagri mengacu pada transisi Renstra sebelumnya, ke dokumen yang baru. Dodi menekankan, Renja yang disusun itu harus mengikuti hasil persetujuan Menteri Dalam Negeri dan Komisi II DPR, yang telah berlangsung pada November kemarin dan alokasi anggaran yang didapat. Dia juga menginstruksikan agar kegiatan yang disusun mempertimbangkan ting-

kat pencapaiannya. “Untuk yang 2020 saya minta tolong pada kawan-kawan semua untuk menyusun rencana kegiatan yang mampu menggambarkan dari rencana kerja yang sudah disetujui Komisi II DPR,” kata Dodi, saat memimpin rapat arah kebijakan dan strategi BPP Kemendagri 2020-2024, Senin (2/12).

Kepala Bagian Perencanaan BPP Kemendagri, Moh Noval Labadjo, menjelaskan penyusunan Renstra BPP Kemendagri 2020-2024 tidak terlepas dari ulasan Renstra sebelumnya. Kegiatan itu melibatkan sejumlah pihak, termasuk pusat penelitian dan pengembangan (puslitbang) BPP Kemendagri. Jika data itu sudah terkumpul secara lengkap, selanjutnya bakal dipaparkan di tingkat pimpinan. Baik penyusunan maupun ulasan dilakukan secara bersamaan, mengingat batas penyelesaian Renstra tidak berlangsung lama. Noval mengatakan, dari ulasan itu nantinya akan terlihat aspek mana saja yang perlu dibenahi. Misalnya, terkait target yang sudah dicanangkan pada Renstra sebelumnya. Target yang dinilai terlalu berat dengan aksi pelaksanaannya, maka sudah seharusnya disesuaikan. “Hasil *review* Renstra sekarang (2015-2019) itu akan menjadi input pada penyusunan Renstra 2020-2024,” kata Noval.

Noval menyadari, target yang tercantum dalam Renstra 2015-2019 belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam program kerja secara maksimal, baik oleh puslitbang maupun bagian sekretariat. Meski isu-isu yang menjadi prioritas Kemendagri sebenarnya sudah tersusun di dalam Renstra sesuai ruang lingkup masing-masing puslitbang. Ia menyebutkan, kegiatan kelitbangannya mestinya mengakomodasi isu strategis tersebut. Contohnya puslitbang dapat merumuskan regulasi di bidang pemerintahan dalam negeri yang dapat menjangkau jauh di dalam Renstra. Kegiatan itu misalnya, dengan mengulas implementasi regulasi UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang lima tahun ke belakang belum pernah tersentuh.



Visi mewujudkan BPP Kemendagri sebagai poros perumus kebijakan Kemendagri yang berkualitas dan inovatif dirasa belum sepenuhnya tercapai. Oleh karenanya, tujuan itu perlu terus dikejar salah satunya dengan membenahi indikator yang lebih terukur, dan membangun komitmen dari para pemangku kepentingan. Noval berharap, seluruh kepala puslitbang dapat mengikuti berbagai dinamika yang terjadi saat penyusunan Renstra agar terbangun pemahaman bersama.

Pemahaman dan komitmen menjadi salah satu kunci capaian Renstra. Di samping memang pemahaman itu juga menjadi tantangan tersendiri, seiring silih bergantinya tenaga kerja yang mengisi ruang di BPP Kemendagri pada tahun berjalannya Renstra. Tidak menutup kemungkinan, pegawai yang baru duduk di BPP Kemendagri tak perhatian terhadap dokumen tersebut. “Apakah Renstra itu ditengok? Saya khawatir *nggak* ditengok,” kata Noval.

*Media BPP* pada edisi April 2019 sempat merekam bagaimana nasib Renstra BPP Kemendagri yang saat itu berada di pengujung tahun. Pada perjalanannya penerapan Renstra kerap dipengaruhi oleh berbagai dinamika yang terjadi. Misal, adanya pemangkasan anggaran yang memengaruhi kegiatan yang sudah dicanangkan. Selain itu, ada penambahan program prioritas yang mesti dijalankan BPP Kemendagri. Sedikit banyak, dinamika itu memengaruhi capaian Renstra. Namun, kerja-kerja yang dilakukan diyakini tetap mengacu pada tugas fungsi BPP Kemendagri, bahkan dapat turut mendorong program prioritas nasional, misalnya terkait peningkatan daerah berinovasi.

#### Arah Renstra 2020-2024

Sementara itu, ihwal arah kebijakan Renstra BPP Kemendagri 2020-2024, Noval menyebutkan, tidak terlalu banyak berubah dari Renstra sebelumnya, terutama pada segi substansi. Namun,

dari aspek kedalamannya arah kerja Renstra yang tengah disusun ini lebih dipertajam. Misalnya terkait kebijakan inovatif yang mesti dilakukan Kemendagri. Pada Renstra mendatang muatannya ditekankan agar seluruh Puslitbang BPP Kemendagri terdorong menghasilkan rekomendasi yang inovatif. Menurutnya, hal itu tidak hanya menjadi tugas Puslitbang Inovasi Daerah, melainkan tanggung jawab kerja ketiga puslitbang lainnya. “Di bidang ruang lingkup masing-masing (perannya),” katanya.

Pembahasan mengenai penyusunan kerangka sasaran strategis Kemendagri sudah digelar dengan sejumlah komponen. Hasil dari itu kemudian ditindaklanjuti oleh masing-masing komponen dalam menyusun sasaran strategis pada dokumen Renstra komponen. Noval mengatakan, untuk 2020-2024 BPP Kemendagri kebagian enam dari sepuluh pembangunan prioritas yang dimiliki Kemendagri. Enam program

prioritas itu seperti penguatan SDM, pembangunan infrastruktur, peyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, pembinaan stabilitas politik dalam negeri, serta peningkatan pelayanan publik dan kemudahan berusaha.

“Dari sasaran strategis nanti turun menjadi arah kebijakan Kemendagri, nanti diterjemahkan pada masing-masing program kegiatan sampai pada indikator pengukuran,” kata Noval.

Noval mencontohkan, indikator sasaran strategis BPP Kemendagri yang mencanangkan hasil kelitbangannya yang berkualitas. Indikator pengukuran itu, misalnya indeks termanfaatkannya hasil-hasil kelitbangannya yang diukur melalui sejumlah parameter. Karenanya, saat ini BPP Kemendagri tengah membangun instrumen pengukuran tersebut.

Indeks pemanfaatan kelitbangannya itu, kata Noval, berisi sejumlah variabel untuk mengukur tingkat kepuasan komponen atas hasil kerja BPP Kemendagri. Secara singkat, kerja variabel itu mengukur beberapa aspek di bidang kelitbangannya, seperti kualitas, kemanfaatan, serta relevansinya dengan kebutuhan komponen Kemendagri. Sebagai pengguna hasil kelitbangannya BPP Kemendagri, keberadaan komponen berperan penting sebagai responden dari variabel tersebut. “Misalnya kebutuhan Dirjen Pol Purnitu bagaimana kita memberikan input terhadap penguatan ideologi Pancasila, tetapi yang kita lakukan adalah penelitian tentang wawasan kebangsaan yang cakupannya terlalu luas, sehingga kurang selaras dengan kebutuhan,” kata Noval mencontohkan.

Penilaian itu juga mencakup rumusan perencanaan pemuatan topik-topik kelitbangannya. Kajian yang secara judul sudah memenuhi kriteria komponen, bukan berarti langsung mendapat nilai maksimal. Sebab, bisa saja kajian tersebut secara konten justru melenceng dari apa yang dibutuhkan komponen. Misalnya, kajian itu menghasilkan kesimpulan yang sebenarnya sudah dapat diketahui tanpa perlu di-



kaji. Hal semacam itu perlu dihindari BPP Kemendagri. “Kalau kita meneliti sesuatu yang sudah tahu hasilnya, ya ngapain (diteliti),” terang Noval.

Dengan penerapan indeks tersebut, Noval berpesan agar BPP Kemendagri jangan dulu kecewa jika nilai pemanfaatan hasil kelitbang belum berada di angka yang memuaskan. Sebab, harus diakui hasil kelitbang BPP Kemendagri masih dirasa belum maksimal. Namun, melalui pengukuran itu justru memudahkan BPP Kemendagri untuk berbenah dan memetakan sejumlah aspek yang dinilai belum maksimal.

Selain indeks pemanfaatan kelitbang, BPP Kemendagri juga memiliki dua aspek lainnya yang mesti diukur. Pertama, indeks inovasi daerah yang berguna untuk mengukur tingkat persentase pemerintah daerah yang berinovasi. Kedua, mewujudkan litbang daerah dengan kategori utama untuk menggambarkan pembinaan yang dilakukan BPP Kemendagri kepada litbang daerah, dalam meningkatkan kompetensi dan kapasitasnya untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsinya. Meski, tugas itu tidak sepenuhnya diemban BPP Kemendagri, tetapi melibatkan pihak terkait. “Pastinya semua itu bukan hanya peran BPP Kemendagri, terutama inovasi, litbang daerah, itu ada peran beberapa K/L terkait, ter-

utama Kemenristek,” kata Noval.

Untuk penguatan BPP daerah, BPP Kemendagri perlu merespons terkait dampak pembangunan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Sebab, saat Rakornas Litbang Pemerintahan Dalam Negeri 2019, banyak dari daerah yang menanyakan hal tersebut. Mereka meminta adanya pertemuan untuk membahas terkait kebijakan yang perlu diambil setelah BRIN terbentuk.

Sementara itu, Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Gatot Tri Laksono, mengatakan untuk meningkatkan kemanfaatan hasil kelitbang melalui beberapa rumusan. Ia menyebutkan, dalam melakukan kajian judul memang harus disesuaikan dengan kebutuhan komponen. Kajian juga dapat berasal dari penghimpunan data di lapangan yang memang dianggap krusial. Selain itu dapat pula mengevaluasi regulasi kebijakan yang dikeluarkan Kemendagri, baik penerapan sampai pada kendalanya. “Itu intinya memberikan masukan ke pimpinan, nanti tinggal pimpinan meneruskannya ke komponen terkait,” kata Gatot.

Gatot mengaku dalam melakukan kerja-kerja kelitbang selalu menjadikan Renstra sebagai acuan. Masih adanya hasil kelitbang BPP Kemendagri

yang belum dimanfaatkan, Gatot menduga kegiatan itu tidak selaras dengan kebutuhan yang sudah diprogramkan komponen. Meski forum untuk menyerap kebutuhan komponen pada kenyataannya memang ada. Ia menyebutkan, mestinya komponen tetap berkabar kepada BPP Kemendagri jika memiliki program yang membutuhkan kajian. Jika anggaran BPP terbatas, kajian itu dapat diantisipasi dengan skema kerja sama anggaran dari komponen terkait. Skema tersebut yang sampai saat ini diakui masih belum berjalan. “Anggaran BPP Kemendagri sendiri kan terbatas dengan banyaknya persoalan yang harus dilakukan kajian,” lanjut Gatot.

Selain itu, untuk mengupayakan kebermanfaatan dari kajian yang dilakukan, Puslitbang BPP Kemendagri telah menerapkan beberapa upaya, misalnya dengan menghimpun banyak masukan. Seperti yang dikatakan Kepala Bidang Administrasi Kewilayahan Puslitbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, dan Kependudukan Agung Wijaya pada Maret lalu, Dia menyebutkan, upaya itu misalnya melalui Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) yang diadakan Bagian Perencanaan dengan melibatkan komponen. Dari forum itu dihimpun sejumlah usulan isu kajian yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan pada pembahasan Rakortek tingkat Puslitbang. Forum ini juga kembali melibatkan komponen terkait untuk memahami pandangan satu sama lain. Judul kajian yang dipilih pun diakui tetap berdasarkan pada hasil koordinasi dengan komponen.

Namun, terkait kelanjutan dari rekomendasi hasil kajian itu tidak diketahui secara pasti apakah ditindaklanjuti atau sebaliknya. Meski Agung mengetahui rekomendasi yang diusulkan itu mendapat disposisi dari Menteri Dalam Negeri. Akan tetapi, BPP Kemendagri juga tidak memiliki wewenang memaksa komponen untuk menjalankan hasil kajian tersebut. Perihal tidak adanya wewenang itu diamini Puslitbang lainnya.

■ MUJAEINI



## LAPORAN UTAMA

## PENTINGNYA MEMPERKUAT SDM

*Penguatan sumber daya manusia menjadi catatan pembenahan arah kebijakan BPP Kemendagri 2020-2024. Hal itu selaras dengan agenda menghasilkan kerja-kerja yang berkualitas.*

**B**AGI SEBUAH instansi yang memiliki tugas dan fungsi, keberadaan sumber daya manusia (SDM) berperan penting dalam mewujudkan kerja-kerja yang berkualitas. Sebab, hasil kerja itu sering bergantung pada kondisi SDM. Hal ini disadari oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri). Kepala Bagian Perencanaan BPP Kemendagri, Moh Noval Labadjo, menyinggung soal keberadaan SDM saat memaparkan arah kebijakan BPP Kemendagri 2020-2024 di depan seluruh komponen Kemendagri, Jumat (11/10). Kegiatan tersebut merupakan rangkaian agenda

dari penyusunan dokumen Rencana Strategis Kemendagri 2020-2024.

Noval menjelaskan, untuk menunjang tugas fungsi BPP Kemendagri dibutuhkan adanya penguatan SDM terutama untuk jabatan fungsional keahlian. Langkah itu dapat dilakukan dengan mendorong tenaga tersebut meningkatkan kapasitasnya, baik melalui pendidikan formal, pelatihan, bimbingan teknis, seminar nasional/internasional maupun lainnya.

Pembenahan kapasitas SDM BPP Kemendagri juga dapat dilakukan saat pengadaan tenaga tambahan atau formasi untuk pejabat fungsional peneliti. Noval menyarankan, penempatan itu

harus didasarkan pada kompetensi dan minat calon tenaga baru. Bahkan, hal itu perlu ditanyakan kepada yang bersangkutan saat hendak bergabung. Dirinya menyebutkan, penempatan SDM yang kurang tepat dan tidak sesuai minat akan berdampak pada manajemen kelitbang yang tidak optimal, dan membuat kinerja BPP Kemendagri menjadi tak sesuai harapan. “Kalau orang mau masuk BPP Kemendagri tanya benar-benar kamu cinta litbang tidak?” kata Noval.

Saat ditemui pada kesempatan berbeda, Noval menuturkan kendala yang dialami saat hendak melakukan penguatan SDM di BPP Kemendagri. Kendala itu dapat berasal dari internal

BPP Kemendagri maupun di luar instansi. Dari luar instansi misalnya, masih terbatasnya anggaran yang didapatkan BPP Kemendagri, sehingga tidak memungkinkan mengadakan kegiatan yang menunjang kualitas SDM. “Teman-teman di Biro Perencanaan perhitungannya mungkin tidak menjangkau pada penguatan SDM BPP Kemendagri, atau kurang tersedianya alokasi anggaran di BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) untuk mendorong penguatan SDM BPP Kemendagri,” kata Noval.

Sedangkan kendala internal misalnya, BPP Kemendagri sudah memiliki anggaran yang memadai tetapi justru tidak memberikan alokasi untuk urusan peningkatan SDM. Noval menyoroti pembagian anggaran di BPP Kemendagri yang sering mengalokasikan nominal secara tetap meski suatu urusan itu tidak lagi menjadi prioritas pekerjaan. Padahal, anggaran yang diberikan itu, sebenarnya dapat dialihkan untuk penguatan SDM. “Misal, tadinya lima rupiah, kita kurangi cukup tiga rupiah, dua rupiahnya kita alokasikan untuk penguatan SDM.” ujar Noval mencontohkan.

Saat ini anggaran untuk penguatan SDM diakui memang masih sangat terbatas. Bahkan, kata Noval, untuk mengirim tenaga kerja agar mengikuti pelatihan pun tidak tersedia. “Mestinya kita memang harus menyisihkan untuk penguatan SDM, tetapi alokasi kita sangat terbatas,” terang Noval.

### Perlu dukungan

Ihwal penguatan SDM, Kepala **Subbagian Sistem dan Prosedur Serta Evaluasi Kinerja ASN BPP Kemendagri**, Rachman Kosasih menuturkan, hal itu bergantung pada desain besar Kemendagri melalui Biro Kepegawaian dalam memperkuat SDM yang dimiliki. Desain itu selanjutnya diaplikasikan melalui BPSDM Kemendagri. BPP Kemendagri menurutnya hanya mengikuti program penguatan SDM yang sudah dicanangkan Biro Kepegawaian. “Misal, semua pegawai komponen harus mengikuti pendi-



dikan dan pelatihan ini, pasti kita akan mengikuti,” kata lelaki yang kerap disapa Deden tersebut, Jumat (1/11).

Meski ide penguatan SDM yang diusulkan BPP Kemendagri bagus, akan menjadi percuma jika tidak mendapat dukungan dari kedua pihak tersebut. Karenanya, perlu komitmen dan visi misi yang jelas dalam memperkuat SDM sesuai kebutuhan Kemendagri. “Di kitanya sudah bagus, di sananya sudah bagus, akan nyambung *kan*?” kata Deden.

Keberadaan SDM merupakan aset yang dimiliki sebuah instansi seperti Kemendagri. Dukungan memperkuatnya menjadi kebutuhan yang krusial. Namun, selama ini dukungan itu masih belum signifikan sehingga perlu ditingkatkan demi kemajuan instansi.

Terkait peran internal, BPP Kemendagri tidak bisa berbuat banyak dalam mendukung peningkatan SDM. Deden mencontohkan, saat perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil, BPP Kemendagri selalu mengajukan kriteria yang dibutuhkan. Namun, para kandidat yang sesuai dengan kriteria tersebut diambil oleh komponen lain. Hal serupa juga terjadi saat BPP Kemendagri memiliki SDM yang berkualitas. Komponen lain sering melirik dan menarik pegawai tersebut untuk bermigrasi.

Senada dengan Noval, terbatasnya anggaran yang dimiliki BPP Kemendagri menjadi persoalan agenda penguatan SDM tidak berjalan maksimal. Dengan kondisi demikian, kata Deden, dukungan dari Biro Kepegawaian dan BPSDM sangat dibutuhkan.

Deden menyebutkan, masih kurangnya dukungan dari instansi mengharuskan para pegawai bersikeras meningkatkan kapasitasnya secara mandiri. Hal itu misalnya dengan menempuh pendidikan di lembaga tertentu. Namun karena dari kantong pribadi, tidak sedikit dari mereka mempertimbangkan besaran biaya yang dikeluarkan dan seringkali menyampingkan kualitas lembaga pendidikan. “Masuk pendidikan abal-abal yang penting murah dan dapat sertifikat, tetapi kualitasnya bagaimana?” tanyanya meragukan.

Kondisi demikian menjadi persoalan, tetapi di sisi lain instansi juga tidak memberikan dukungan untuk peningkatan kapasitas. Deden mengatakan, menjamin pendidikan para pegawai agar belajar di tempat yang berkualitas

dapat dilakukan dengan memberi beasiswa dan bekerja sama dengan lembaga terkait. “Ini masalah kemauan dari pimpinan, mau *nggak* kita benar-benar meningkatkan SDM yang ada,” terang Deden.

Meski dengan anggaran terbatas, BPP Kemendagri sempat menggelar kegiatan penguatan SDM. Namun karena rendahnya anggaran, kegiatan itu diadakan dengan sistem paket hemat, artinya menggunakan tempat dan waktu yang terbatas. Dengan demikian, sasaran yang ingin dicapai menjadi tidak maksimal.

Menyadari minimnya anggaran, Deden mengaku, saat masih menjabat sebagai Kepala **Subbagian Pembinaan Jabatan Fungsional** dirinya kerap me-

ngajukan kerja sama dengan beberapa pihak terkait. Meski upaya ini masih belum membuahkan hasil, tetapi akan terus ditempuh sebagai bagian dari ikhtiar.

### Pemetaan kondisi SDM

Sementara itu, menurut Deden untuk memperkuat SDM dapat dimulai dengan melakukan pemetaan kapasitas dan kebutuhan. Pemetaan tidak melulu mengacu pada aspek kemampuan yang tinggi, tetapi juga dapat melihat kebutuhan mendasar seperti keahlian berbahasa asing—terutama bahasa Inggris—dan komputer. Masih lemahnya dalam dua hal itu mesti diakui dialami hampir seluruh Kemendagri termasuk BPP, sehingga kebutuhannya perlu difasilitasi. “Kalau *nggak* kursus di luar berarti *kan* kursus di BPSDM,” katanya.

Deden menyebutkan, yang tak kalah penting dari penguatan SDM di BPP Kemendagri adalah memerhatikan kapasitas para peneliti. Sebab, mereka merupakan bagian penting dari kerja-kerja kelitbang yang dilakukan BPP Kemendagri. Ia menganalogikan, peneliti di BPP Kemendagri serupa dokter di sebuah rumah sakit. Rumah sakit berpredikat bagus, katanya, adalah yang memiliki dokter yang berkualitas. Begitu pula BPP Kemendagri yang didukung oleh para peneliti. “Minimal dia bisa menuliskan,” kata Deden.

Ia mengatakan, pendidikan formal bagi peneliti mesti diperhatikan, sebab peneliti diwajibkan bergelar magister. Hal itu mengacu pada Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia No 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti. Kalau tidak mengikuti ketentuan itu, delapan tahun sejak 2018 mereka bakal diberhentikan sebagai peneliti. Oleh karenanya, jika tidak ada bantuan dari instansi, maka para peneliti akan kesulitan dan berangsur-angsur berkurang jumlahnya. “Penambahan terakhir peneliti (di BPP Kemendagri) itu pas 2017, itu pun cuma satu orang,” kata Deden.



Meski begitu, kegiatan untuk tenaga kerja di bidang lainnya juga diperlukan sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing. Deden mencontohkan, Bagian Keuangan yang dapat diberi pemahaman ihwal pengelola keuangan maupun aplikasi keuangan. Begitu pula bagian lain seperti Rumah Tangga, yang juga dapat dibekali dengan materi pengelolaan aset.

Menurut data yang diterima *Media BPP*, kegiatan mendorong SDM yang kompeten menjadi agenda tata kelola dan reformasi birokrasi Kemendagri

2020-2024. Agenda itu berdampingan dengan kegiatan lain seperti membangun budaya organisasi yang baik, teknologi informasi yang terintegrasi, sarana dan prasarana yang memadai, serta pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Deden menyambut baik jika SDM menjadi bagian penting untuk diperkuat. Tetapi ia menekankan, agar agenda itu tak hanya berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi dikawal sampai

pelaksanaannya. Bukti dari komitmen itu, kata Deden, melalui penganggaran pengembangan SDM dengan nilai yang layak, terutama dari pusat.

“Oke mau melakukan pembinaan ini, anggarannya apa? Wah nggak ada berarti *kan nggak* ada komitmen,” katanya.



Menanggapi pemetaan itu, Kepala Subbagian Penilaian Kompetensi dan Penataan Jabatan, Biro Kepegawaian, Aji Fauji Farsa, mengatakan pengelolaan SDM

di Kemendagri mengacu pada sistem penilaian kompetensi dan penilaian kinerja. Sistem penilaian kompetensi itu (*assessment*) bakal menghasilkan nilai yang mengacu pada standar setiap jabatan sesuai Permenpan RB No 38 Tahun 2017 tentang Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara.

Ia mencontohkan, pejabat eselon III yang memiliki sejumlah kualifikasi kompetensi yang mesti dipenuhi dapat terlihat ketercapaiannya dari penilaian itu. Misalnya, pada aspek kompetensi komunikasi ternyata nilainya masih di bawah standar. Maka, data itu menjadi bekal Biro Kepegawaian dalam menyusun kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat), yang terangkum dalam dokumen *Human Capital Development Plan* (HCDP). “Jadi diakumulasi dari seribu PNS yang punya *gap* kompetensi itu berapa orang dan di kompetensi apa saja. *Nah* hasil itu menjadi bahan masukan pengembangan SDM,” kata Aji. Di luar hasil *assessment*, Biro Kepegawaian juga menampung usulan kebutuhan diklat dari komponen, termasuk BPP Kemendagri.

Aji mengungkapkan, dokumen HCDP itu kemudian disampaikan kepada BPSDM selaku unit kerja yang melaksanakan diklat. Biro Kepegawaian hanya bertugas sebagai pihak pengusul daftar diklat yang perlu dilakukan. Pihaknya juga tidak berwenang memaksakan daftar HCDP itu dijalankan secara penuh. Menunaikan daftar diklat yang ada di dokumen HCDP merupakan kebijakan BPSDM. “Kalau di sana *kan* sudah beda satkernya (satuan kerja), kita *nggak* bisa intervensi, karena sifatnya lebih ke rekomendasi,” tutur Aji.

Terkait kebutuhan penguatan SDM di masing-masing komponen, Aji menuturkan, aturan Permenpan RB No 38 Tahun 2017 telah mengklasifikasikan kompetensi ke dalam tiga aspek, yaitu manajerial, sosiokultural, dan kompetensi teknis. Untuk kompetensi manajerial dan sosiokultural diatur oleh Kemenpan RB yang berlaku secara umum di seluruh kementerian dan

lembaga pemerintahan. Sedangkan kompetensi teknis, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi. Saat berita ini ditulis, Biro Kepegawaian tengah menyusun kebutuhan penguatan kompetensi teknis, yang nantinya bakal diajukan ke Kemenpan RB untuk disetujui.

Aji menyebutkan, kompetensi teknis itu bersifat secara umum yang mencakup satu kementerian. Misalnya, berdasarkan penilaian, eselon III di Kemendagri membutuhkan penguatan kompetensi teknis di bidang tertentu. Maka bidang tersebut *lah* yang menjadi catatan penguatan seluruh pejabat eselon III Kemendagri. “*Oh* dia butuh kompetensinya penyusunan kebijakan, penyusunan produk perundang-undangan, atau evaluasi kebijakan, itu kita petakan secara umum,” tutur Aji mencontohkan.

Menanggapi jabatan peneliti yang minimal harus bergelar magister, Aji menjelaskan ada beberapa skema kebijakan Kemendagri untuk mempermudah pegawainya di bidang pendidikan, seperti pemberian tugas belajar dan izin belajar. Tugas belajar yakni kebijakan memperbolehkan pegawai yang sekolah untuk meninggalkan tugas dan jabatan dengan catatan ia mendapat beasiswa baik dari Kemendagri maupun instansi lainnya. Sedangkan izin belajar, yakni inisiatif pegawai untuk melanjutkan pendidikan dengan biaya sendiri, dan mendapat izin serta persetujuan pimpinan, dengan catatan tidak meninggalkan tugas. “Silakan itu ditempuh masing-masing pegawai,” kata Aji.

Namun, untuk skema bantuan dari internal Kemendagri, kata Aji, BPSDM sempat menerapkan bantuan biaya pendidikan dengan nominal tertentu. Meski saat dikonfirmasi ke BPSDM bantuan ini sudah tidak lagi dikurangkan. Di samping itu, Biro Kepegawaian juga sempat mengadakan program beasiswa yang didukung dari bank dunia. Tetapi program itu berhenti sejak beberapa tahun lalu. Untuk akses pendidikan, saat ini Biro Kepegawaian

“SISTEM PENILAIAN KOMPETENSI ITU (ASSESSMENT) BAKAL MENGHASILKAN NILAI YANG MENGACU PADA STANDAR SETIAP JABATAN SESUAI PERMENPAN RB NO 38 TAHUN 2017 TENTANG KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA

hanya membantu menginformasikan berbagai peluang beasiswa dari banyak sumber ke pegawai Kemendagri. “Kalau ada beasiswa dari K/L lain atau lembaga donor kita infokan kepada pegawai,” katanya.

### Membangun *e-learning*

Kepala Subbag Monitoring dan Evaluasi BPSDM, Chandra Varenda Yoga, menjelaskan ihwal penguatan SDM di internal Kemendagri. Ia mengaku dalam kurun waktu lima tahun terakhir kegiatan itu kerap terbentur berbagai alasan dari peserta, seperti tidak diizinkan atasannya karena ada tugas penting, melakukan perjalanan dinas, atau ikut rapat yang waktunya berbarengan dengan agenda penguatan SDM. Akibatnya mereka sering berhalangan hadir.



Merespons situasi itu, BPSDM akan menerapkan metode penguatan kompetensi berbasis elektronik atau disebut *e-learning*. Melalui layanan itu pegawai dapat mengikuti pengembangan kompetensi dengan memanfaatkan komputer atau gawai yang dimiliki. Dengan begitu, penguatan SDM dapat dilakukan jarak jauh tanpa harus bertatap muka. “Sehingga keinginan dari Biro Kepegawaian yaitu 20 JP (jam pelajaran) pengembangan kompetensi per tahunnya dapat terlaksana,” tutur Chandra. Target yang diatur pada PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil itu tidak dapat tercapai jika tetap menggunakan metode konvensional.

Untuk menyusun materi *e-learning*, belum lama ini BPSDM diundang dalam rapat analisis kebutuhan diklat yang diadakan Biro Kepegawaian. Forum itu berangkat dari data kebutuhan diklat yang telah dihimpun Biro Kepegawaian. Kebutuhan itu kemudian didiskusikan, dan jika dimungkinkan bakal dikerucutkan dengan skema penggabungan dengan tetap memuat sejumlah materi pengajaran. Langkah

itu berlaku bagi usulan diklat yang muatannya serupa.

Data yang sudah dianalisis itulah yang rencananya akan dimasukkan ke dalam materi *e-learning*. Materi itu kata Chandra bersifat umum, seperti tata naskah dinas, protokoler, reformasi birokrasi, atau sejumlah materi lainnya. Supaya kegiatan itu dapat mencakup seluruh PNS di Kemendagri. Sistem itu, kata Chandra, tengah diuji coba pada pegawai pemerintah daerah. Jika sistemnya dianggap stabil, rencananya tahun depan mulai diterapkan di internal Kemendagri. “Kebutuhan diklat dari Biro Kepegawaian diinfokan ke kami, kemarin mereka masih menerima dulu belum *ngasih* ke kami, nanti kami konsolidasikan sama mereka, *oh* ternyata dari 50 diklat ini bisa diperkecil jadi 15 diklat,” katanya mencontohkan.

Chandra menjelaskan tugas fungsi BPSDM mengikuti Permendagri No 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Menurutnya tugas dan fungsi BPSDM mencakup tiga aspek, yaitu standarisasi, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi. “Tugas kita itu menyusun standarnya, melaksanakan sertifikasinya, sampai kita

“**JIKA PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN DIUBAH MENJADI BEASISWA PENUH AKAN MENJADI KECIL, KARENA ALOKASI ANGGARANNYA RENDAH**”



melaksanakan pengembangan kompetensinya,” kata Chandra. Tugas itu tidak hanya mencakup pegawai internal Kemendagri, melainkan juga pegawai tingkat daerah, baik provinsi, kabupaten/kota.

Standarisasi memiliki dua hasil yakni Standar Kompetensi Kerja Pemerintahan Dalam Negeri (SKKPDN) dan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri (SP2DN). Setiap jabatan memiliki standar kompetensi yang disusun melalui pendekatan *sistem regional model competency standar* (RMCS). Mulai dari pejabat eselon I sampai staf standar kompetensinya termuat di dalamnya. Dari jabatan itu akan dikelompokkan dan disesuaikan perangkat pembelajarannya. “Misalnya jabatan kepegawaian cocoknya (perangkat pembelajarannya) untuk tata naskah terkait dokumen kepegawaian dan lain-lain,” terang Chandra.

Sedangkan untuk mendapat sertifikasi, pegawai mengikuti beberapa tahapan seperti menjawab soal, tes wawancara, dan ujian terkait bidangnya masing-

masing. Chandra mencontohkan sertifikasi untuk jabatan Satpol PP, yang dilengkapi dengan misalnya cara pengamanan masa atau penertiban keamanan. Untuk menunjang sertifikasi di daerah, BPSDM telah membentuk Lembaga Sertifikasi Pemerintahan Dalam Negeri (LSPDM). Sementara bagi pengembangan kompetensi sebagian besar berupa diklat. Ketiga aspek itu dilakukan saban tahun anggaran. “Tiga aspek ini dijalankan (setiap tahun), karena kita dari mulai runutan Renstra dan Renja kaitannya sama tiga itu,” terang Chandra.

Chandra menambahkan, bagi beberapa jabatan tidak dapat disertifikasi BPSDM karena pembinaannya berada di pihak berbeda. Seperti jabatan widyaiswara yang pembinaannya di bawah Lembaga Administrasi Negara (LAN), serta peneliti yang dinaungi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Chandra mengaku, dorongan BPSDM ke LIPI untuk meningkatkan kompetensi peneliti BPP Kemendagri belum ada. Sebab dirinya khawatir

standar kompetensi di luar Kemendagri itu mengacu pada aturan lain seperti dari Kemenpan RB. Jika begitu, menurutnya, tidak bisa diintegrasikan dengan BPSDM.

Kendati demikian, usulan diklat dari Biro Kepegawaian yang mengacu pada aturan Kemenpan RB tetap ditampung. Menurut Chandra pada dasarnya dua aturan itu memiliki konsep yang sama, meski metode perolehan datanya yang berbeda. “Biro Kepegawaian itu pasti mengikuti Kemenpan RB karena tugas fungsinya memang begitu, kalau di kita (BPSDM) mengikuti Permendagri No 11 Tahun 2018 itu,” kata Chandra. Adanya dua regulasi yang menjadi rujukan Kemendagri, katanya, juga dilakukan Kementerian Keuangan yang melakukan standar kompetensi dengan pendekatan RMCS dan aturan Kemenpan RB.

Kaitannya dengan sertifikasi, BPSDM lebih banyak memfasilitasi pemerintah daerah. Hal itu katanya sesuai dengan perangkat sertifikasi yang dia-

dopsi dari Permendagri No 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan. Berbeda dengan Biro Kepegawaian yang hanya melakukan *assessment* di lingkungan Kemendagri. Namun Chandra mengaku, tahun depan BPSDM mendapat amanat untuk menyeimbangkan pengembangan tersebut di kedua aspek itu.

### Bantuan pendidikan

Sementara untuk mendukung pegawai Kemendagri di bidang pendidikan, BPSDM sempat memberikan skema bantuan dengan mengalokasikan anggaran untuk pegawai yang mengantongi izin belajar dengan syarat dan ketentuan. Namun bantuan itu sudah tidak lagi diberikan karena menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pemberian itu dinilai janggal. Sebab kata BPK, sesuai aturan pendidikan PNS, izin belajar itu pendanaannya berasal dari kocek pribadi. Hal inilah yang disebut Chandra anggaran yang diajukan BPP Kemendagri ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk penguatan pendidikan tidak dapat dicairkan.

Sebelumnya BPP Kemendagri sempat mengajukan bantuan ke Bappenas untuk menyokong dana pendidikan bagi peneliti. Namun, berdasarkan aturan anggaran itu diberikan ke BPSDM selaku unit kerja yang mengelola SDM di Kemendagri. Menurut Chandra, satu-satunya jalan untuk membantu pembiayaan pendidikan bagi pegawai Kemendagri, melalui pemberian beasiswa secara penuh. Namun, sampai saat ini beasiswa semacam itu belum bisa diberikan BPSDM, meski secara kemungkinan bisa saja diadakan. Akan tetapi, lanjut Chandra, BPSDM khawatir langkah itu berbenturan dengan Biro Kepegawaian yang sering mengadakan kerja sama dengan Bappenas. Di sisi lain, jika pemberian bantuan pendidikan diubah menjadi beasiswa penuh akan menjadi kecil, karena alokasi anggarannya rendah. “Kalau diubah menjadi beasiswa, dia (anggaran) akan meningkat juga,” terang Chandra.

■ MUJAENI

# Setahun Pasca Gempa Lombok Barat

AGUSTUS 2018 gempa dengan magnitudo 7,0 yang mengguncang Wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Gempa tersebut merupakan gempa terbesar berdasarkan histori gempa di wilayah tersebut. Selang beberapa bulan setelah gempa tersebut, Indonesia kembali dihantam gempa, tsunami, dan likuefaksi di Palu, Sulawesi Tengah, serta tsunami yang menerjang Banten. Namun setahun pasca bencana tersebut, pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana di masing-masing daerah cukup berbeda-beda. Ada yang cepat bahkan ada yang terbilang lambat. Berbeda dengan penanganan bencana di daerah lainnya. Penanganan Lombok khususnya Lombok Barat dinilai jauh lebih baik.

**M**AHNAN, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Barat masih ingat betul, menyaksikan kecemasan warga pasca gempa terjadi. Informasi kebencanaan saat itu sangat minim didapat. Listrik juga terputus seketika. Akibatnya jalanan menjadi macet karena banyak warga yang berlarian untuk menyelamatkan diri ke tempat paling tinggi. Mereka termakan kabar bohong akan datangnya tsunami.



Berbeda dengan Mahnan, Udin (50), warga Dusun Batu Kantar, Desa Narmada, Kecamatan Narmada, Lombok Barat tidak akan pernah lupa saat gempa yang berkekuatan 7 magnitudo merobohkan rumahnya. Beberapa rumah tetangganya juga hancur. Ia teringat ketika seusai ritual maghrib, begitu gempa terjadi, semua warga berhamburan ke luar rumah. Sebagian rumah roboh dan rata. Beruntung tidak ada korban jiwa saat itu. Waktu yang masih petang membuat

sebagian warga segera menyelamatkan diri ke halaman rumah.

Dusun Batu Kantar adalah salah satu dusun di Kecamatan Narmada, Lombok Barat yang terkena dampak gempa berkekuatan 7 magnitudo Agustus 2018 lalu tersebut. Hampir semua rumah yang ada di dusun tersebut mengalami rusak berat. Setahun pasca gempa dusun tersebut kembali berbenah. Rumah-rumah rusak mulai dibangun kembali. Rumah yang dibangun berkonsep Rumah Instan Sederhana Sejarah (Risha) yang digagas oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Selain Dusun Batu Kantar, Media BPP juga mengunjungi Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar. Di Desa tersebut terdapat kawasan pengungsian yang ketika kami berkunjung, para pengungsi sudah tidak tampak lagi. Dua puluh dua kepala keluarga yang sempat mendiami lokasi tersebut sudah berpindah ke kediamannya semula.



Menurut Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Lombok Barat Hartono Ahmad, masyarakat sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Itu tidak lain karena rumah para pengungsi sudah diperbaiki pemerintah. Menurut Hartono, pemenuhan kebutuhan Hunian Sementara (Huntara) cukup terpenuhi meski belum maksimal dengan mendirikan tenda-tenda pengungsi atau dari terpal-terpal plastik. "Sementara untuk hunian tetap dibangun pada saat transisi darurat ke pemulihan yang dibangun oleh beberapa lembaga seperti BNI, PLN, Bank Mandiri dan pihak ketiga," ucapnya.

### Upaya pemulihan

Hartono menambahkan, terdapat lima kecamatan yang paling parah terdampak gempa di Kabupaten Lombok Barat. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Batulayar, Gunungsari, Lingsar, Narmada, dan Kuripan. Pemerintah Lombok Barat memang tengah mengupayakan pemulihan penyintas gempa di Kabupaten Lombok Barat. Menurut Mahnan, saat ini pemerintah tengah mengejar target pembangunan rumah rusak akibat gempa. Fokus utama pemerintah saat ini adalah melakukan transisi darurat ke pemulihan dan perbaikan. Masa transisi diakui Mahnan sebenarnya harus selesai per 20 Agustus 2019. Namun

karena progres pembangunan belum mencapai 100 persen maka batas waktu diperpanjang hingga 31 Desember 2019.

Perpanjangan masa transisi pemulihan dan rekonstruksi bukan tanpa alasan. Menurutnya jumlah rumah rusak bertambah kembali setelah dilakukan pendataan ulang dan melakukan verifikasi dan validasi kembali di lapangan. Misalnya, data awal pada 2018 terdapat 72.222 dengan kategori berat dan sedang. Namun setelah dilakukan validasi terdapat masyarakat yang belum terdata sebanyak 4.332 rumah. Sehingga secara keseluruhan rumah rusak mencapai 75.402. "Hingga November 2019 pembangunan rumah

rusak berat sudah mencapai 92,60%, kemudian rumah rusak sedang 91,61%, dan rumah rusak ringan sudah mencapai 97,5%," terangnya.

Untuk mengejar target pemerintah pusat hingga 31 Desember 2019, pemerintah Lombok Barat tidak tinggal diam. Beberapa terobosan dilakukan di antaranya, pemerintah melalui BPBD merekrut fasilitator sebanyak 416 orang untuk mendampingi ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas)

Mahnan menegaskan peran fasilitator bukan sekadar mendampingi, tetapi termasuk membuat desain rumah dan membantu penyusunan RAB sebagai salah satu syarat akuntabilitas pencairan bantuan. "Para fasilitator juga bertugas menyiapkan berkas administrasi yang dibutuhkan, sehingga rumah bisa segera dibangun. Segala hambatan di lapangan yang dihadapi fasilitator agar segera dilaporakan untuk segera diputuskan solusinya," tegasnya.

### Pemerataan bantuan

Pemerintah juga tegas terhadap seluruh bantuan yang masuk. Prioritas utama pemerintah adalah masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan. Begitu juga dengan bantuan yang datang dari pemerintah pusat yang difokuskan untuk penyelesaian pembangunan rumah sebelum pembangunan fasilitas lainnya.

"Pembangunan hunian tetap yang rusak berat akan diberikan dana sebesar Rp50 juta, rusak sedang Rp25 juta dan rusak ringan Rp10 juta. Seluruh bantuan yang diberikan pemerintah hanya boleh untuk perbaikan rumah, dengan pertanggungjawaban yang jelas," kata Mahnan.

Bencana Lombok juga tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. Pemerintah tidak membuka keran bantuan dari pihak luar terutama pihak asing. Hal itu dianggap menjadi salah satu cara agar penanganan bencana terkoordinasi dengan baik. Pemerintah Lombok Barat juga mengupayakan administrasi dan verifikasi bantuan

yang masuk juga tertib dan dapat disalurkan secara merata.

"Setiap bantuan yang masuk dan keluar kita dicatat dengan jelas. Bahkan jika bantuan yang masuk melalui Lombok Barat, kita stop dan diupayakan pemerataan di daerah-daerah terdampak. Posko bantuan juga ditempatkan di lokasi yang bisa menjangkau beberapa daerah terdampak bencana," ucap Hartono.

Pendistribusian bantuan juga dilakukan satu pintu. Cara tersebut dilakukan untuk meminimalisasi penyalahgunaan yang dilakukan oknum. Begitu juga dengan tidak dibukanya bantuan asing agar penanganan bencana lebih efektif. Bencana tsunami dan Sumatera Utara menjadi contoh, tidak terkontrolnya bantuan asing yang masuk. Enggannya sejumlah donatur asing untuk menyerahkan bantuan, terutama berupa uang melalui pemerintah, menyebabkan dana bencana rawan dikorupsi.

### Pemulihan ekonomi

Pasca bencana tentu bukan hal mudah bagi para penyintas gempa memulihkan pendapatannya kembali. Untuk itu, beberapa upaya telah dilakukan seperti memberikan bantuan jaminan hidup (jadup) bagi korban bencana gempa. Sebelumnya, Kementerian Sosial RI (Kemensos) memberikan bantuan jaminan hidup bagi korban bencana gempa NTB yang dibayarkan setelah berakhirnya status masa transisi darurat. Besaran dana jadup yang akan ditransfer ke Kota Mataram Rp 4,5 miliar lebih, dengan jumlah sasaran 2.063 KK atau 7.642 jiwa. Satu jiwa diberikan Rp10 ribu per hari selama 60 hari atau dua bulan.

Pemerintah daerah juga mendorong masyarakat terlibat dalam membangkitkan kembali sektor pariwisata yang menjadi unggulan Lombok Barat. Misalnya beberapa desa wisata dikembangkan. Desa-desanya tersebut mengangkat potensi yang ada. "Se-



hingga geliatnya sudah mulai kelihatan, walau belum pulih 100%. Misalkan, jika kita lihat tingkat kunjungan wisatawan sudah mencapai 80%," ujar Mahnan.

Bencana di Lombok menjadi pelajaran berharga, terutama terkait kesi-

apan pemerintah dalam menghadapi bencana. Kesiapan logistik yang siap serta lambatnya mobilisasi bantuan diakui pemerintah Lombok Barat masih menjadi permasalahan serius yang harus segera dipecahkan. Ini menjadi kunci agar penanganan bencana di masa mendatang lebih efektif.

■ SAIDI RIFKY

## Melancong ke Tanah Minang

*Sumatera Barat kental akan budaya dan sejarahnya. Hingga saat ini beragam peninggalan itu masih lestari, dan menuntun laku setiap generasi.*

**B**EBERAPA orang mendekati seongkah batu berbentuk tubuh manusia yang seolah sedang bersujud di atas pasir pantai Air Manis, Padang, Sumatera Barat. Mereka sesekali memegang bagian batu, lalu mengabadikan momen tersebut dengan mengambil gambar dari ponsel yang dibawa. Batu itu memang bukan sembarang batu. Batu itu diyakini jelmaan Malin Kundang, anak durhaka dalam legenda setempat.

Konon, Malin Kundang adalah anak Minang yang pergi merantau ke tanah seberang. Sukses dengan usahanya, Malin pulang ke kampung halaman. Lalu ibunya mengutuk Malin menjadi batu karena durhaka dengan tidak mengakuinya sebagai seorang ibu. Malin menjadi cerita rakyat yang dituturkan turun temurun di kalangan masyarakat Minang. Bahkan, ceritanya tersohor sampai ke penjuru negeri. Jika mendengar anak durhaka, pikiran langsung terarah ke nasib Malin

Kundang. Lewat cerita itu, tidak sedikit guru di sekolah yang mengajarkan siswanya agar tidak berlaku durhaka kepada orang tua, jika tidak ingin bernasib nahas seperti Malin.

Di sekitar batu Malin terdapat gentong, tiang roboh, rantai, dan tirai yang semuanya berbahan serupa batu. Jika diamati lebih jelas, semua benda-benda itu beserta batu Malin, berada di atas geladak sebuah kapal yang hancur. Bentuk geladak itu dapat terlihat jika dilihat dari atas ketinggian tertentu.

Namun, tidak sedikit pihak yang meragukan kebenaran cerita tersebut dan menganggap bebantuan itu sengaja dibuat. Terlepas dari itu, cerita Malin telah memberikan banyak pelajaran kepada generasi bangsa perihal bagaimana berlaku hormat kepada orang tua. Tak hanya itu, batu Malin Kundang juga menjadi daya tarik wisatawan untuk berbondong-bondong mengunjungi pantai Air Manis.

Namun, meski sebagai tempat yang banyak dituju wisatawan, batu Malin terlihat terbengkalai. Seolah menerima kutukan berkali lipat, Malin yang menjadi batu itu kurang terawat dengan baik. Di sekitar batu tidak ada pagar pembatas atau papan imbauan yang bikin pengunjung berhati-hati dan turut menjaga keberadaan batu. Sangat disayangkan jika batu Malin Kundang berangsur-angsur terkikis bukan hanya karena faktor alam, tetapi juga ulah tangan yang tak bertanggung jawab. Perhatian pemerintah pusat maupun daerah diperlukan untuk menjaga tempat tersebut. Terlebih tempat itu menjadi salah satu destinasi wisata unggulan yang berdampak pada perekonomian masyarakat sekitar.

Selain pantai Air Manis, Kota Padang juga memiliki destinasi wisata lain, salah satunya jembatan Siti Nurbaya. *Media BPP* sempat menikmati keelokan jembatan tersebut, dari samping bawah jembatan. Selain berlatar jembatan Siti



Nurbaya, mata pengunjung juga akan dimanjakan dengan suasana sungai berhiaskan perahu-perahu nelayan yang disandarkan pada dermaga.

### Beranjak ke Tanah Datar

Selepas mengitari Kota Padang, *Media BPP* melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Tanah Datar yang juga terkenal dengan ragam budaya dan sejarahnya. Perjalanan itu melalui jalur Kabupaten Solok dengan tujuan mampir ke Danau Singkarak yang menjadi salah satu wisata alam di Kabupaten Tanah Datar. Sepanjang perjalanan, suguhan keindahan alam yang hijau terhampar luas dengan kondisi jalan berbukitan.

Namun, saat sampai di tujuan, kabut cukup tebal menutupi pemandangan sekitar danau terluas di Sumatera Barat tersebut. Keindahan danau itu menjadi tidak terlihat jelas. Meski begitu, kecewaan kami terbayar karena berhasil mengantongi beberapa plastik ikan bilih, yang didapat dari pasar tak jauh dari danau tersebut. Ikan bilih paling dicari masyarakat ketika mengunjungi Danau Singkarak, karena terasa gurih bila telah dimasak. Ikan bilih merupakan ikan endemik yang hanya ditemukan dan menjadi populasi ikan terbanyak di danau terbesar di Sumatera setelah Danau Toba.

Perjalanan ke Kabupaten Tanah Datar banyak diisi dengan kunjungan ke tempat-tempat bersejarah. Tempat pertama yang kami kunjungi adalah Istana Basa Pagaruyung, atau sering disebut Istana Pagaruyung. Istana ini terletak di Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kota Batusangkar. Bangunan ini menjadi salah satu destinasi wisata budaya yang cukup terkenal dan menjadi menu wajib jika berkunjung ke Tanah Datar.

Meski sebagai tempat yang sarat akan nilai sejarah, Istana Pagaruyung yang berdiri saat ini hanyalah bentuk replika. Sebab, bangunan aslinya terbakar beberapa waktu silam. Menurut catatan, istana ini pernah tiga kali terbakar yakni pada 1804, 1966, dan terakhir 2007. Menurut Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang) Kabupaten Tanah Datar, Menzarti, pembangunan ulang itu tetap merujuk pada bangunan aslinya. "Dulu habis (terbakar) karena memang bangunan ini sebagian

besar berbahan kayu," kata Menzarti yang mendampingi perjalanan *Media BPP*.

Dengan hamparan halaman yang luas, bangunan Istana Pagaruyung berdiri begitu megah. Bangunan yang menggunakan arsitek khas Minangkabau ini memiliki tiga lantai. Lantai pertama berupa ruangan luas memanjang yang dilengkapi etalase berisi barang-barang bersejarah. Selain itu, ada pula tujuh kamar dan sebuah singgasana di bagian tengahnya. Menzarti menyebutkan, kamar-kamar itu



diperuntukkan bagi anak-anak Raja yang telah menikah. Namun, lanjut Menzarti, jika anak tersebut sudah berkembang maka ia akan memisahkan diri dengan membangun rumahnya sendiri. "Kalau orang Minang, untuk awal-awal menikah kita tinggal di rumah Ibu, sampai kita mampu bikin rumah sendiri," katanya.

Sedangkan di lantai dua, bangunan itu berisi ruangan dengan Anjungan Pangerinan, yaitu kamar anak perempuan raja yang belum menikah. Naik ke lantai tiga, pengunjung akan mendapati ruangan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan alat-alat kebesaran Raja, seperti mahkota kerajaan yang dulunya disimpan dalam sebuah peti khusus.

Jika melihat di sekitar halaman istana terdapat bangunan kecil dengan jarak yang lebih tinggi dari permukaan tanah. Tempat itu dinamai *rangkiang*. Nama itu berasal dari kata ruang *hinyang*, yang merupakan ciri khas dari rumah gadang masyarakat Minangkabau. Kepala Subbidang Inovasi dan Teknologi Baperlitbang Kabupaten Tanah Datar, Marfiayeni, menyebutkan jika tempat itu



berfungsi untuk menyimpan hasil bumi, atau serupa lumbung padi.

Usai dari Istana Pagaruyung, *Media BPP* beranjak ke kompleks Istana (makam) Rajo Alam yang lokasinya tidak jauh dari bangunan istana. Menurut laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Raja Alam merupakan salah satu dari *Rajo Tigo Selo* yang merupakan

sebuah intitusi tertinggi dalam Kerajaan Pagaruyung, atau dalam *tambo* adat disebut *Limbago Rajo*. Tiga orang raja itu masing-masing terdiri dari Raja Alam, Raja Adat, dan Raja Ibadat yang berasal dari satu keturunan. Raja Alam, merupakan raja tertinggi di antara lainnya, yang bertugas mengatur urusan pemerintahan secara keseluruhan.

Kompleks makam ini terdiri dari 13 buah

makam dengan ukuran panjang bervariasi. Meski diyakini sebagai tempat bersemayamnya orang-orang besar dari Pagaruyung, tetapi pada nisan tidak tertera nama atau petunjuk yang jelas, untuk menunjukkan kepunyaan masing-masing makam.

Tempat lain yang dikunjungi adalah Situs Prasasti Kubu Rajo I dan II. Prasasti Kubu Rajo I terpat pada batu persegi, ditulis dengan huruf Jawa Kuno berbahasa Sansakerta. Masih dari laman Kemendikbud, isi yang termuat dalam prasasti Kubu Rajo I berupa keterangan geneologis atau garis keturunan Raja Adityawarman. Dalam prasasti itu menyebutkan, "*Adwaya-warmma mpu-tra kanakamedinindra*" yang berarti Adwayawarma berputra Raja Tanah Emas. Adwayabrahma dapat diidentifikasi sebagai Adwaya-warman. Dari catatan sejarah dan naskah Jawa Kuno, diketahui bahwa Adityawarman merupakan keturunan kerajaan Melayu Dharmasraya dari seorang Ibu Melayu bernama Dara Jingga dan seorang bangsawan Kerajaan Singasari bernama Adwayabrahma.

Sementara itu, Prasasti Kubu Rajo II disebut sebagai Prasasti Surya karena ditulis dikelilingi pahatan matahari yang terletak pada bagian tengah batu. Tulisan pada prasasti ini sudah tidak begitu jelas, namun berdasar sumber yang sama, tulisan itu juga berasal dari bahasa Jawa Kuno dan Sansakerta. Beberapa kata yang berhasil dibaca antara lain menyebut "*rama*" yang berarti ketua desa atau mungkin makna lain yang disesuaikan konteks kalimatnya. Selain itu, "*pura*" dan "*sthana*" yang berarti tempat peristirahatan di istana, serta "*srima*" yang merupakan penggalan dari kata *sri maharaja*.

Usai dari Prasasti Kubu Rajo I dan II, *Media BPP* beranjak ke lokasi bersejarah lainnya. Kali ini *Media BPP* menyinggahi tempat yang dinamakan Batu Batikam, terletak di Jorong Dusun Tuo, Nagari Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar. Batu Batikam memiliki arti batu yang tertusuk. Batu yang berbentuk segitiga terbalik itu, bagian atasnya berlubang seperti dikenai tikaman senjata tajam. Konon, lubang itu merupakan bekas dari tusukan keris Datuk Parpatiah Nan Sabatang dan Datuk Katumanggungan.

Menurut kepercayaan setempat, keduanya berseteru perihal adat. Perseteruan itu berujung pada kesepakatan berdamai ditandai dengan menikamkan keris pada sebuah batu. Hasil dari perdamaian itu melahirkan kesepakatan untuk menggunakan sistem kekerabatan berdasarkan pada garis keturunan Ibu. Menzarti menuturkan, seorang Ibu memang mendapat posisi istimewa dalam sebuah keluarga. Jika memunyai anak, meski bapaknya bersuku, anak tersebut tetap akan mengikuti suku ibunya.

Saat ini oleh pemerintah lokasi Batu Batikam dijadikan sebagai situs cagar budaya dengan luas 1.800 meter persegi. Batu Batikam dikelilingi batu mirip tempat duduk. Tempat duduk itu sebagai simbol permusyawaratan dalam meleraikan persoalan.

Masih wisata bernuansa batu, kali ini *Media BPP* menjajal batu yang tak kalah populernya di Kabupaten Tanah Datar, yakni batu Angkek-angkek. Kata angkek-angkek memiliki makna angkat-angkat dalam bahasa Indonesia. Konon setiap kali diangkat, batu ini memiliki berat yang berbeda tergantung niat si pengangkatnya. Kuatnya seseorang tidak menjamin mampu mengangkat batu tersebut. "Beratnya batu ini tergantung doa, niat, atau motivasi seseorang," kata Adi keturunan Datuk Bandar Kayo penemu batu.

Namun Adi menekankan, jika Batu Angkek-angkek bukanlah sarana meminta atau mengabulkan suatu harapan. Sebab banyak yang salah mengartikan batu itu mampu mengabulkan atau mengaburkan permohonan. Ia berpesan, agar batu Angkek-angkek hanya dijadikan sebagai media motivasi dalam menggapai harapan.

Adapun cara mengangkatnya adalah pengunjung duduk menghadap batu Angkek-angkek. Kedua tangan meraih bagian batu. Sebelum mengangkat, pengunjung dipersilakan merapal doa yang dibacakan dalam hati. Saat berhasil terangkat, batu hanya diperkenankan sampai di atas paha. *Media BPP* sempat menjajal mengangkatnya. Dalam kesempatan yang sama, kami mengalami kegagalan. Pada kesempatan pertama batu itu tidak terangkat karena terasa berat. Namun saat percobaan yang kesekian, batu itu terangkat dan lebih ringan dari usaha sebelumnya.

Secara usia batu Angkek-angkek diperkirakan lebih dari 500 tahun. Namun menurut penelitian teranyar, umur batu itu sekira 3500 tahun. Temuan ini dibuktikan dengan adanya aksara paku pada batu yang muncul pada 1500 tahun sebelum maschi. Meski terdapat aksara yang tersemat, namun makna yang terkandung di dalamnya belum terkuak.

Menurut penuturan Adi, batu Angkek-angkek ditemukan saat pemasangan tiang utama rumah gadang yang sekarang menyimpan batu tersebut. Namun rumah yang ditempati itu telah mengalami beberapa kali renovasi. Konon,



kata Adi, saat pemasangan tiang utama, batu itu terkena linggis yang menyisakan goresan pada batu. Usai peristiwa itu, gejala alam terjadi seperti gempa lokal, petir di siang bolong. Kejanggalan ini membuat nenek moyang kalut dan kembali ke Nagari Tuo Pariangan sebagai tempat persinggahan pertamanya dari Gunung Merapi.

Setelah beberapa waktu, mereka menyebar ke segala penjuru. Datuk Bandaro Kayo si penemu batu, menempati sebuah tempat, yang setelah dibersihkan ternyata lokasi itu bekas pemancangan tiang yang dulu mengenai sebuah batu. Pengangkatan benda itu kemudian dilakukan. Batu Angkek-angkek saat ditemukan berjumlah sepasang. Namun yang berhasil diangkat ke permukaan hanya lah sebagian. Sedangkan bagian lainnya ambles ke dalam tanah saat dilakukan penggalian. "Sampai sekarang kita tidak pernah cari-cari lagi," katanya.

Secara kasat mata batu ini lebih mirip logam kuningan atau tembaga dengan warna kuning sedikit kecoklatan. Beberapa bagian serupa terklupas dan menyisakan warna hitam. Saat dilakukan penelitian, batu ini memiliki berat yang berubah-ubah. Anehnya lagi, saat didekatkan magnet kadang menempel dan tidak jarang sebaliknya.

Selepas menjajal batu Angkek-angkek, *Media BPP* lantas menyambangi Nagari Tuo Pariangan yang disinyalir sebagai tempat asal-usul nenek moyang ma-

syarakat Minangkabau, seperti yang dituturkan Adi. Saat menuju Nagari Tuo, *Media BPP* menyempatkan diri mampir ke Rumah Gadang Kampai Nan Panjang. Sebuah rumah adat milik Datuk Penghulu. Menzarti bercerita jika rumah tersebut tidak menggunakan paku dalam proses pembangunannya. Beratap ijuk dan berinding kayu berwarna hitam, rumah ini diperkirakan sudah berdiri 300 tahun yang lalu. Beberapa kali rumah itu sempat mengalami pemugaran, namun tidak menghilangkan bentuk aslinya.

Setelah dari Rumah Gadang Kampai Nan Panjang, *Media BPP* melanjutkan perjalanan. Sesampainya di Nagari Tuo Pariangan, *Media BPP* disambut deretan rumah gadang. Meski ada pula rumah dengan gaya arsitek modern. Di tempat ini, juga dimakamkan Tantejo Gurhano, seorang arsitek bangunan Balairung Sari Tabek, yaitu tempat berkumpul tokoh masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Bangunan itu berusia ratusan tahun, dan sampai sekarang masih digunakan untuk berembuk.

Seorang penduduk Nagari Tuo Pariangan, Feri, mengamini nenek moyang masyarakat Minangkabau memang tinggal di puncak Gunung Merapi termasuk Nagari Tuo Pariangan yang kemudian menyebar ke berbagai penjuru. Penyebaran masyarakat Minang terbagi ke tiga daerah, yakni Luak Tanah Datar, Luak Agam, dan Luak Lima Puluh Kota. Ketiga tempat itu memiliki beberapa wilayah, seperti Luak Tanah Datar yang secara administratif melingkupi Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang. Sedangkan Luak Agam, meliputi Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam. Kemudian Luak Lima Puluh Kota meliputi Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota. "Itu yang asli dari atas (gunung merapi)," kata Feri.

Namun, kondisi sekarang yang begitu mudah untuk berpindah, membuat sebaran masyarakat Minang tidak dapat dilihat hanya berdasarkan wilayah. Di beberapa yang tidak disebutkan tadi, masyarakat Minang juga bermukim. "Kalau di Padang, tanya kamu orang Padang, dia jawab bukan, saya orang Minang," kata Feri mencontohkan.

Nagari Tuo Pariangan merupakan daerah yang masih kental dengan ajaran leluhurnya. Feri menjelaskan, ma-



syarakat Minang memegang teguh paham *Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* (adat bersendi syariat dan syariat bersendi kitab Allah SWT). Dan Masyarakat di Nagari Tuo Pariangan mengamini ajaran tersebut. Ia mencontohkan, masyarakat Nagari Tuo yang masih melestarikan kebiasaan mandi di tempat umum. Aktivitas itu tidak dijalankan dengan sembarangan, tetapi harus sesuai dengan peraturan. Tempat pemandian itu juga dipisahkan antara perempuan dan laki-laki. Adapun alir yang mengalir ke tempat pemandian berasal dari sumber mata air alami. "Dari pegunungan, ada yang panas dan dingin," katanya.

Selain itu, budaya tegur sapa sesama warga saat bertatap muka juga masih dijalankan. Saling tegur sapa itu biasanya menggunakan panggilan khas Minang, sesuai dengan umur yang disapa. "Dengan tetangga, atau orang luar (pendatang) itu juga sama," katanya. Ia menekankan, pengunjung harus beradaptasi dengan adat yang berlaku di tempat sekitar.

Berkat keindahan alam, dan adat istiadatnya Nagari Tuo Pariangan dipilih sebagai salah satu desa terindah di dunia oleh majalah *Travel Budget*, majalah pariwisata New York, Amerika Serikat.



Semenjak kabar itu merebak, Nagari Tuo Pariangan terus berbenah karena tidak sedikit wisatawan yang datang karena rasa penasarannya. Kehidupan masyarakat yang semula hanya bertani, beberapa di antaranya kini mencoba peruntungan dengan membuka warung-warung kecil untuk menjamu para wisatawan.

### Wisata kuliner

Selain terkenal dengan budaya dan sejarahnya, Sumatera Barat juga kaya akan wisata kuliner. Potensi alamnya menumbuhkan berbagai tanaman yang menyajikan kuliner khas daerah tersebut. Salah satu kuliner yang wajib dicicipi selain sate padang, adalah sajian kopinya. Jika Anda berkunjung ke Nagari Tabek Patah, Kabupaten Tanah Datar sempatkanlah untuk menyambangi sebuah kedai kopi bernama Kiniko. Usaha ini sudah dirintis sejak 1982, meski awalnya belum berbentuk kedai seperti sekarang. Namun, sejak awal Kiniko fokus mengembangkan kopi lokal dengan

mengirimkannya ke berbagai daerah.

Seiring berjalannya waktu Kiniko berkembang. Pengunjung bisa menikmati kopi di belakang kedai dengan nuansa alam. Salah satu seduhan yang unik adalah, Kopi Kawa Daun. Minuman ini bukan berasal dari biji kopi, melainkan daun kopi yang diseduh serupa teh. Rohis yang turut mendampingi perjalanan *Media BPP* dan Menzarti, mengajak untuk mencicipi hidangan tersebut. Menurut Rohis, Kawa Daun merupakan laku kreatif masyarakat Minang menghadapi para penjajah. Konon, saat masa penjajahan, masyarakat Minangkabau nyaris tidak menikmati biji kopi meski tumbuh subur di tempat tersebut. Sebabnya, saat panen tiba biji-biji kopi itu dibawa ke negara penjajah. Agar tetap menyeduh kopi, masyarakat setempat menyiasatinya dengan memanfaatkan daun kopi. Selain menyajikan cita rasa yang khas, Kawa Daun juga dipercaya memiliki kasiat bagi tubuh. "Bisa mengobati untuk penyakit rematik," kata Rohis.

Selain menikmati seduhan kopi, pengunjung juga dapat melihat langsung proses produksi kopi, mulai dari penggilingan sampai pengemasan. Yolandra salah seorang pegawai menjelaskan, kopi yang diolah adalah jenis robusta. Kopi-kopi itu didapatkan dari petani sekitar kedai. Tidak hanya itu, para pekerja juga direkrut dari masyarakat setempat. "Dulu sampai 55 lebih karyawan, sekarang tinggal 22," kata lelaki yang baru bekerja setahun di Kiniko.

Di bagian depan kedai Kiniko menyajikan beragam oleh-oleh khas Kabupaten Tanah Datar, termasuk olahan kopinya. Jadi pengunjung tidak perlu khawatir jika hendak membawa buah tangan khas Kabupaten Tanah Datar. Selain dari wisatawan lokal, Kiniko juga banyak menerima wisatawan dari mancanegara, salah satunya Malaysia.

Selain kopi, kuliner lain yang mesti dicoba adalah buah durian. Jika musim panen tiba, di sekitar Kota Padang termasuk Kabupaten Tanah Datar, buah berkulit duri itu bakal dibandrol murah dan mudah sekali didapatkan. Meski belum memasuki musim panen, saat berkunjung kedua tempat tersebut *Tim Media BPP* beruntung sempat mencicipinya.

■ MUJAENI

LEBIH DEKAT

**MOHAMMAD HELMI ABIDIN**, Koordinator Pengurangan Risiko Bencana dan Ketahanan Bencana, United Cities and Local Government Asia Pacific (UCLG Aspac)

## MENUNTUN DAERAH PAHAM BENCANA

*Bencana yang diakibatkan alam, pun ulah manusia menjadi ancaman serius bagi penduduk bumi. Memahami ancaman sekaligus mengurangi risikonya menjadi sebuah keharusan. Upaya itulah yang digaungkan Mohammad Helmi Abidin. Bergabung dengan organisasi United Cities and Local Government Asia Pacific (UCLG Aspac) sejak 2016, lelaki kelahiran Probolinggo itu aktif menuntun daerah-daerah termasuk di Indonesia, agar sadar bencana dan paham cara mengurangi risikonya. Misinya adalah menerapkan agenda-agenda global terkait kebencanaan di berbagai daerah. Menurut Helmi, bencana bisa terjadi di mana saja, tanpa mengenal ruang dan waktu. Manusia tidak bisa terus menghindarinya, tetapi justru harus memahami agar mampu mengurangi risikonya.*

**K**ETERTARIKAN Helmi dengan isu pengurangan risiko bencana berawal dari pengerjaan tugas akhir saat menempuh gelar sarjana. Kala itu, kajian Helmi mengidentifikasi daerah rawan longsor di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Helmi memberikan informasi terkait titik jalur mana saja yang rawan longsor. Dengan begitu, wisatawan dapat terhindar atau lebih waspada jika melewati jalur tersebut. Berkat kajiannya, pada 2007 dia juga sempat diundang Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ke Istana. Dia berhasil lolos pada ajang pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat nasional berkat buah pikirnya.



**Tempat Tanggal Lahir :**

Probolinggo, 11 April 1986

**Jabatan :**

Koordinator Pengurangan Risiko Bencana dan Ketahanan Bencana, United Cities and Local Government Asia Pacific (UCLG Aspac)

**Pendidikan :**

S2 Manajemen Bencana di Istanbul Technical University  
S1 Pendidikan Geografi di Universitas Negeri Surabaya

Helmi menyadari informasi terkait bencana mesti disebarluaskan secara luas, sekali pun daerah itu berada di luar radius dengan dampak terparah. Helmi masih ingat, ketika menyaksikan daerahnya sempat terkena hujan abu akibat meletusnya Gunung Bromo. Namun saat peristiwa itu berlangsung, rupanya warga belum ada persiapan karena minimnya informasi. Padahal hujan abu dapat mengakibatkan penyakit pernapasan. “Itu sebelum tahun 2010, tetapi kalau lihat sekarang pemerintah *early warning system*-nya sudah sedikit lebih bagus,” kata Helmi, saat ditemui (6/11/2019).

Sejak 2016 hingga 2019 bersama organisasinya Helmi sudah melakukan berbagai kegiatan di lima negara, seperti Filipina, Nepal, Bangladesh, India, dan Indonesia. Kelima negara itu dipilih berdasarkan tingginya risiko bencana dengan jumlah penduduk yang melimpah. Di Indonesia sendiri pada 2016-2017, UCLG Aspac telah memfasilitasi sekira 13 daerah terkait pengurangan risiko bencana sekaligus pengenalan program *sendai framework*. “Di situ juga dibantu bagaimana kota tersebut mampu membuat dokumen rencana aksi pengurangan risiko bencana,” katanya.

*Sendai Framework* merupakan kesepakatan global yang berlaku hingga 2030, dengan misi pengurangan risiko bencana dan kota tangguh. Dalam program itu terdapat sejumlah target yang mesti dicapai. Guna mencapai target itu ada sejumlah skema yang dilakukan, seperti menyusun langkah-langkah dasar terkait kiat menjadikan kota yang lebih tangguh dalam menghadapi bencana. Selain itu, membuat program kampanye kota tangguh yang dilakukan *United Nations for Disaster Risk Reduction (UNDRR)*, yakni lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa yang konsen pada isu kebencanaan.

Berkat dukungan dari UNDRR pula, pada awal 2019, jumlah peserta

di Indonesia terkait pengurangan risiko bencana berbasis *sendai framework* bertambah. Melalui kerja sama dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Akapsi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), UCLG Aspac kembali mengundang 21 daerah. Para peserta diarahkan untuk mengidentifikasi risiko bencana yang ada di daerahnya menggunakan kerangka *sendai framework*, sehingga dapat diterapkan dalam rencana pembangunan. “Ini loh ada kerangka kerja *sendai framework* di mana ini bisa menjadi landasan pmda atau kota untuk membuat



ADA KERANGKA KERJA SENDAI FRAMEWORK, DI MANA INI BISA MENJADI LANDASAN PEMDA ATAU KOTA UNTUK MEMBUAT RENCANA AKSI DALAM MENGIDENTIFIKASI RISIKO BENCANA, DARIPADA KITA FOKUS MENYIKAPI BENCANA TERSEBUT ATAU TAHAP REHABILITASI SAJA

rencana aksi dalam mengidentifikasi risiko bencana, daripada kita fokus menyikapi bencana tersebut atau tahap rehabilitasi saja,” kata Helmi.

Dalam menjalankan programnya, Helmi juga kerap bersinergi dengan sejumlah pihak lain seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). UCLG Aspac juga bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemen-

dagri). “Kita melibatkan mereka terutama bagaimana Pemda dapat selalu di-update terkait kebijakan-kebijakan pemerintah nasional terutama dalam aspek kebencanaan, dan yang paling terbaru itu terkait standar pelayanan minimum terkait bencana,” kata Helmi.

Agenda yang dilakukan Helmi sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia dalam merespons bencana, seperti dengan adanya Perpres No 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu, dan Peraturan Kepala BNPB No 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Namun, sejumlah regulasi yang sudah diarahkan pemerintah masih belum sepenuhnya dilakukan daerah. Padahal, lanjut Helmi, hampir seluruh daerah di Indonesia berada di wilayah rawan bencana. Termasuk Kalimantan yang dicanangkan sebagai tempat pindahnya ibu kota. Meski banyak yang mengatakan daerah itu terhindar dari ancaman gempa dan tsunami. Namun kata Helmi, sejumlah ancaman lainnya tetap mengintai, seperti kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta longsor. “Aspek bencananya bukan hanya alam, tetapi juga non alam yang diakibatkan oleh manusia itu juga besar terjadi di Kalimantan,” tuturnya.

**Belum konsen pengurangan**

Dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, Indonesia dinilai masih konsen pada isu penanganan saat terjadi dan setelah bencana. Seperti berbondong-bondong membangun ulang kerusakan yang ditimbulkan. Namun, dalam aspek pengurangan risiko bencana, negara yang berada di wilayah cincin api pasifik ini masih kurang. Kondisi ini menjadi tugas besar bersama. Helmi bersama organisasinya terus melakukan advokasi dengan melibatkan langsung kepala daerah. Terlebih dalam *sendai framework* terdapat target

meningkatnya jumlah negara yang menerapkan strategi pengurangan risiko bencana. Target itu bakal diminta laporannya oleh UNDRR pada 2020. "UCLG sebagai salah satu perwakilan asosiasi pemda terbesar di dunia, kita akan diminta laporannya oleh UNDRR," tutur Helmi.

Meski konsen dalam pengurangan risiko bencana, Helmi juga kerap terlibat dalam membantu daerah yang sedang merehabilitasi berbagai kerusakan yang diakibatkan bencana. Antara lain saat bencana gempa dan tsunami yang melanda Palu, Sulawesi Tengah pada 2018 yang bekerja sama dengan sejumlah pihak.

Masih minimnya kesadaran pemerintah daerah ihwal pengurangan risiko bencana disinyalir akibat terbatasnya pemahaman. Selama ini cara berpikir yang digunakan adalah bahwa bencana memang mesti dihadapi, dan segera menanggulangnya usai peristiwa itu berlangsung. Padahal, berbagai risiko yang dimiliki, sebenarnya dapat dikurangi sehingga antisipasinya lebih maksimal. Dengan upaya itu, dapat menekan berbagai kerugian baik dari aspek materil, maupun jumlah korban yang berjatuh. "Satu kapasitasnya tidak ada, kedua kesadaran dari pemangku kepentingan atau *top leader* seperti walikota, bupati, gubernur yang masih rendah," kata Helmi.

Rendahnya kesadaran kepala daerah itu ditunjukkan dengan masih sedikitnya yang terlibat dalam kegiatan kampanye pengurangan risiko bencana. Hal itu diduga karena hasil dari kerja itu tidak terlalu tampak. Mereka lebih memilih terlibat dalam program yang hasilnya lebih terlihat secara langsung, misal saat bencana atau membangun setelah bencana. "Tetapi kalau seperti kampanye, bagaimana melibatkan masyarakat, mengeluarkan kebijakan daerah terkait ini pelarangan ini, itu takutnya kontra dengan masyarakat, contohnya daerah ini tidak boleh dibangun



bandara atau infrastruktur karena rawan bencana," katanya.

### Peran Kemendagri

Kemendagri sebagai komando dari pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pengurangan risiko bencana. Secara tidak langsung juga mengkoordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), karena sebenarnya BNPB tidak memiliki turunan di daerah. Peran Kemendagri itu misalnya memantau daerah yang berada pada wilayah rawan bencana. Kemudian dari tingkat kerawanan dapat dilihat pengalokasian anggarannya apakah sudah sesuai kebutuhan pengurangan risiko bencana, atau sebaliknya. Selain itu, Kemendagri juga dapat memformulasikan kebijakan di tingkat nasional supaya terhubung ke daerah. Banyak program nasional terkait kebencanaan yang belum diterapkan secara baik oleh daerah.

Hal itu misalnya program standar pelayanan minimum khusus kebencanaan yang dibuat Kemendagri. Andai program ini terkawal secara baik, dan mampu menekankan kepada daerah betapa pentingnya program ini, Helmi

memastikan pemerintah daerah akan melaksanakannya.

Sementara itu, Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri juga dapat mengambil peran melalui kajiannya. Misalnya, dapat menampilkan daerah yang memiliki tingkat kerawanan disandingkan dengan tata kelola serta regulasi yang ada. Selain itu, jika mendapati daerah yang mengaku kekurangan anggaran, kajian BPP juga bisa diarahkan pada pencarian sumber anggaran alternatif. "Peran-peran seperti ini yang diharapkan, dan kadang-kadang pemerintah daerah tidak punya kapasitas," katanya.

Ia menyebutkan, kejadian bencana di Indonesia tidak lebih besar dari peristiwa yang terjadi di beberapa negara seperti Filipina, Cina, atau daerah lainnya di Asia Pasifik. Namun, jika dilihat dari kerugian secara ekonomi, Indonesia pada 2018 berada di angka yang tinggi karena terjadi bencana besar antara lain di Lombok dan Palu. Besarnya kerugian yang dikantongi itu, disumbang dari terbatasnya persiapan pengurangan risiko serta masih rendahnya kapasitas pemerintah daerah dan masyarakatnya.

■ MUJAJENI

## Kemendagri Sukses Selenggarakan Rakornas Forkopimda

**K**EMENTERIAN Dalam Negeri sukses menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Indonesia Maju. Rakornas antara Pemerintah Pusat dan Forkopimda tersebut bahkan disebut-sebut sebagai Rakornas terbesar dan terpenting yang pernah dialami Presiden Joko Widodo. Pujian itu dialamatkannya saat membuka Rakornas secara resmi.

"Apresiasi juga datang dari Bapak Presiden dan juga para Menteri. Pak Presiden menyampaikan bahwa Rakornas tersebut merupakan Rakor terbesar dan terpenting yang pernah beliau laksanakan. Di masa lima tahun pertama (Pemerintahan) belum pernah terkumpul sebanyak itu dengan Forkopimda," kata Mendagri Tito Karnavian saat penyerahan DIPA di Sasana Bhakti Praja Gedung C Kemendagri, Jakarta.

Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di Sentul *International Convention Center*, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11). Jokowi hadir didampingi sejumlah jajaran Kabinet Indonesia Maju termasuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Pada kesempatan itu, Presiden memberi catatan kepada pemerintah daerah seperti pentingnya merubah mental pegawai, kerja cepat, dan mendukung iklim investasi yang kondusif.

Forum Rakornas itu dihadiri berbagai pemangku kepentingan baik dari pe-



merintah pusat maupun tingkat daerah. Hadir dalam kesempatan itu gubernur, walikota, bupati, sekretaris daerah, pimpinan DPRD, serta pimpinan kejaksaan, kepolisian, TNI, dan pengadilan baik tingkat provinsi, kabupaten/kota. Dalam sambutannya, Presiden menyebutkan, pertemuan itu terlengkap karena dihadiri sejumlah pihak. Dia berharap dari pertemuan ini dapat menyelaraskan program pemerintah dari tingkat pusat maupun daerah. "Kita ingin semuanya bisa sambung satu garis dari pusat sampai ke daerah," kata Jokowi.

Jokowi menekankan, pentingnya membangun hubungan harmonis dari Forkopimda. Hubungan itu misalnya menjalin komunikasi antara gubernur dengan pihak terkait, seperti pangdam, kehati, kepala pengadilan tinggi. Hal serupa juga perlu dilakukan bupati/walikota, baik dengan dandim maupun kapolres. "Hubungan itu sangat memengaruhi tensi yang ada di daerah," katanya. Kalau ada salah satu pihak yang disebut Jokowi tadi tidak rukun, hal itu akan menjadi kendala dalam menghadapi persoalan di daerah. Ia juga mengingatkan agar masalah sekecil apapun jangan dianggap hal remeh karena bisa menjadi besar.

Presiden menceritakan, bagaimana sejumlah negara mengalami konflik akibat adanya *discontent* dari perubahan pola komunikasi di masyarakat. Misalnya demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Hong Kong akibat isu ekstradisi dan persoalan hukum. Peristiwa itu berdampak pada kondisi ekonomi di negara tersebut menjadi buruk. "Negara ini (Hong Kong) menuju resesi dari sebelumnya ekonominya sangat bagus," kata Jokowi.

Terkait dengan persoalan hukum, Jokowi menginginkan agar para penegak hukum mengedepankan langkah preventif. Kejanggalan yang sudah terlihat sejak awal, sebaiknya lebih dulu dihalaui bukan menunggu pelanggaran itu terjadi lalu baru ditindak. "Jelas-jelas itu keliru sejak awal diingatkan *dong*," katanya. Ia juga menekankan agar para penegak hukum tidak mencari-cari kesalahan kebijakan yang diambil oleh pemangku kepentingan jika memang tidak ada niat jahat.

### Kerja cepat

Sementara itu, Presiden menekankan pentingnya kerja cepat, seperti saat pengadaan lelang barang dan jasa yang harus dilakukan di awal tahun. Jangan sampai kebijakan itu ditunda pada akhir tahun karena akan mempe-

ngaruhi kualitas barang dan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Presiden mengatakan, saat ini pola pengadaan barang dan jasa masih belum baik, sehingga itu perlu diperhatikan. “Kenapa sih kita tidak mulai yang namanya lelang barang dan jasa dimulai bulan Januari kenapa terus kita menunggu-nunggu sampai September baru lelang, ada apa ini?” tanya Jokowi heran.

Guna menjadikan langkah lebih cepat, Presiden juga memerintahkan agar pemerintah daerah tidak banyak membuat regulasi. Menurutnya Indonesia sudah memiliki banyak peraturan. Melimpahnya regulasi itu dapat mengurangi kecepatan dalam bergerak dan memutuskan kebijakan. Padahal, lanjutnya, negara besar sekali pun ingin lebih fleksibel dalam merespons setiap perubahan. “Semua diatur malah kita terjerat sendiri, hati-hati stop sudah, *dikit-dikit* diatur,” katanya.

Untuk menyederhanakan regulasi, Jokowi bakal mengajukan *omnibus law* ke DPR. Ada sejumlah regulasi yang akan direvisi menjadi lebih ringkas. Ia bercerita, negara Amerika yang memiliki kebijakan ihwal pembuatan regulasi. Di Negara itu jika ada menteri yang hendak membuat satu peraturan menteri, maka dia harus menghapus dua peraturan menteri sebelumnya. Presiden berencana membuat aturan serupa, hanya saja jumlah yang mesti dihapus sebelum membuat aturan baru lebih banyak, yakni 10 peraturan menteri. “Kebanyakan peraturan kita pusing sendiri, inilah model ke depan hampir semua menuju ke situ, fleksibilitas itu yang paling penting,” kata Jokowi.

### Agenda besar

Selain itu, Jokowi menjelaskan dua agenda besar Indonesia yang membutuhkan kerja sama baik pemerintah pusat dan daerah. Pertama, terkait pentingnya menciptakan lapangan kerja karena jumlah pengangguran masih banyak. Lapangan kerja itu dapat tumbuh salah satunya dengan menjaga iklim investasi. Karenanya, Presiden meminta semua pihak dapat mendukung urusan yang terkait dengan



investasi. Ia menegaskan, investasi yang datang ke sebuah daerah bukan hanya menjadi urusan kepala daerah, melainkan juga pihak keamanan yang menjamin keamanan investor. Dalam mengurus perizinan kepastian hukum juga mesti dijaga, jangan sampai terjadi pungutan liar dan semacamnya.

Menurut Presiden, saat ini Indonesia masih kalah dengan sejumlah negara. Gagalnya realisasi investasi karena pelayanan yang masih buruk. Ada sejumlah perusahaan yang henggang dari suatu negara, tetapi tidak memilih berlabuh di Indonesia. Jokowi menduga hal itu akibat masih ruwetnya proses perizinan, baik di pemerintah pusat maupun daerah.

Jokowi menginstruksikan agar pemerintah menutup mata dalam menandatangani perizinan jika ada investasi yang orientasi hasil produksinya untuk diekspor. Hal serupa juga berlaku bagi investasi yang menghasilkan produk yang masih belum bisa dipenuhi dalam negeri. “Atau investor datang untuk membangun barang-barang substitusi impor, barang-barang yang sekarang ini kita masih impor kemudian dia mau bangun di sini, kemudian tutup mata tanda tangan secepat-cepatnya,” kata Jokowi.

Guna mempermudah alur birokrasi, Jokowi kembali menggulirkan wacana pemangkasan eselon III dan IV. Dirinya mengaku pernah mengikuti proses administasi yang lambat karena jenjang birokrasi terlalu banyak. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka kecepatan tidak akan didapat. Namun Jokowi menjamin pemangkasan itu bukan ingin mengurangi pendapatan pegawai. “Tetapi ini merubah struktural ke fungsional, bukan memotong pendapatan,” katanya.

Dalam memberdayakan pelaku usaha lokal, Jokowi mengingatkan agar investor yang datang ke daerah harus melibatkan usaha-usaha kecil di daerah. Jangan sampai investasi itu hanya dinikmati oleh pengusaha-pengusaha dari ibu kota.

Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda merupakan gelaran yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri untuk memaparkan program pemerintah pusat kepada daerah. Upaya itu untuk memahami berbagai program yang sudah dicanangkan pemerintah pusat kepada daerah. Tito menyebutkan, pemerintah daerah merupakan bagian dari pihak yang menentukan keberhasilan dari visi misi Presiden. “Hampir semua persoalan menyangkut pemerintah

daerah,” kata Tito.

Ia mengatakan, Presiden memiliki lima visi besar, yakni pembangunan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan, keberlanjutan pembangunan infrastruktur, menyederhanakan izin investasi untuk membuka lapangan kerja, serta reformasi birokrasi. “Birokrasi yang lebih sederhana terutama kembali untuk membuka investasi,” katanya.

Meski berlaku otonomi daerah yang memberikan wewenang kepala daerah membuat programnya masing-masing. Namun, lanjut Tito, sebagai satu sistem kenegaraan, pemerintah daerah juga harus menampung rencana besar pemerintah pusat.

### Stabilitas keamanan

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Dodi Riyadmadji memimpin sebagai moderator. Tema stabilitas keamanan menjadi isu yang dibahas. Salah satu yang menjadi narasumber dalam sesi tersebut adalah Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Di hadapan sekira 2.693 peserta Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda, mulai dari Pangdam, Danrem, Dandim, Kapolda, Kapolres, Kajari dan Kajati se-Indonesia, Hadi menyampaikan pentingnya menjaga stabilitas keamanan agar tetap terjaga dengan baik. “Bericara masalah stabilitas keamanan tentunya kita berbicara soal tren aspek ancaman, di mana ancaman saat ini dengan berkembangnya revolusi industri 4.0 begitu mudah,” katanya.

Menurut Hadi Tjahjanto, sifat ancaman di era revolusi industri 4.0 ada tiga. Pertama adalah Eskalatif yaitu tiba-tiba muncul menjadi ancaman yang begitu besar. Kedua adalah *mixed*, bergabung kadang-kadang menjadi dua dan tiga. Ketiga adalah dalam tempo yang singkat. “Kita tidak membayangkan apa yang terjadi, tiba-tiba di Medan terjadi bom bunuh diri,” ucapnya.

Panglima TNI juga mencontohkan pada 2019 stabilitas keamanan di Ibu



kota Jakarta sedang terganggu karena adanya aksi unjuk rasa atau demonstrasi, tiba-tiba Papua bergejolak sedangkan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) masih berjalan. “Jadi ada tiga bentuk ancaman yang saat itu harus diselesaikan bersama-sama. Artinya apa, ancaman itu pola bermacam-macam dan dalam tempo yang cepat,” ujarnya.

Untuk menjaga stabilitas keamanan dari ancaman tersebut kuncinya adalah kerja sama yaitu sinergitas TNI dan Polri termasuk dengan Pemerintah Daerah. “Kalau stabilitas keamanan terjaga, pembangunan di wilayah akan dapat dilaksanakan dengan baik,” tegasnya.

### Prioritas para menteri

Selain Panglima TNI Hadi Tjahjanto, acara juga dihadiri para menteri kabinet Indonesia Maju sebagai narasumber, dari mulai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar hingga Menteri Pariwisata dan Ekraf Wishnutama Kusubandio.

Wishnutama, misalnya, mengatakan kekuatan pariwisata Indonesia sejatinya terletak pada kebudayaan dan adat istiadatnya. Menurut Tama, kebudayaan setiap daerah memuat kearifan lokal yang sangat unik. Hal tersebut menurutnya punya nilai jual yang tinggi.

“Ada yang tidak sadar justru kelebihan Indonesia adalah budayanya, kearifan lokal, keunikan, dan alam. Ini jadi tantangan bagaimana menjaga ini semua agar menjadi daya jual yang tinggi,” ujar Tama

Ia mencontohkan, salah satu negara yang berhasil menjadikan kebudayaan sebagai andalan bagi sektor pariwisata adalah Bhutan. Sebuah negara kecil yang terhimpit di wilayah Himalaya tersebut berhasil menjaga kebudayaannya dan akhirnya menarik banyak wisatawan.

“Bhutan punya daya jual tinggi karena bisa menawarkan kepada wisatawan budaya yang betul-betul terjaga. Adat istiadat yang betul-betul terjaga. Alam yang terjaga. Itu sesuatu yang jadi nilai jual di masa sekarang,” ujarnya.

Tak hanya Bhutan, menurut Tama, Maldives juga melakukan hal yang sama. Kepulauan yang punya panorama laut yang eksotis tersebut tidak pernah fokus untuk melakukan pembangunan infrastruktur. Alih-alih melakukan pembangunan secara fisik, Maldives justru tampil memukau wisatawan seluruh dunia karena berhasil menjaga alamnya.

Hal inilah yang diinginkan Tama agar bisa diwujudkan di Indonesia. Untuk itu, menurutnya tantangan paling besar bagi pariwisata Indonesia saat ini adalah keberhasilan mengkonservasi budaya serta alam yang ada. Menjaga kedua hal tersebut tetap otentik dan menarik, khususnya bagi wisatawan mancanegara.

“Pariwisata di masa depan yang bisa dijual, yang punya tren positif adalah *ecotourism* dan juga *sport tourism*. Itu yang membuat daya tarik. Ditambah lagi dengan alam yang sangat unik. Itu daya tarik luar biasa,” terangnya.

■ SAIDI RIFKY/MUJAJENI

## Lubang Hitam Lebih Besar dari Matahari Ditemukan

**T**EMUAN terbaru mengenai lubang hitam raksasa dipublikasikan dalam jurnal Nature Volume 575 edisi November 2019, dengan judul "A Wide Star-Black-Hole Binary System from Radial-Velocity Measurements". Adapun para peneliti yang terlibat dalam penelitian tersebut adalah Jifeng Liu, Haotong Zhang, dan Xiangqun Cui. Para peneliti tersebut berasal dari National Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China

Liu dkk telah menemukan "lubang hitam monster" yang begitu besar, yang secara teori tidak seharusnya ada. Teori itu kini terbantahkan oleh LB-1, lubang hitam "monster" yang ditemukan. Dalam temuannya memaparkan, Lubang hitam tersebut terletak sekira 15 ribu tahun cahaya, lubang hitam ini memiliki massa 70 kali lebih besar dari matahari. "Lubang hitam dengan massa seperti itu seharusnya tidak ada di galaksi kita, menurut sebagian besar model evolusi bintang saat ini," kata Liu Jifeng dalam artikel jurnal tersebut.

Lubang hitam *Stellar* diyakini umumnya tersebar di seluruh alam semesta, tetapi mereka sulit dideteksi karena mereka biasanya tidak memancarkan sinar-X - hanya melakukannya ketika mereka melahap gas dari bintang yang telah berkelana cukup dekat.

Liu dkk mencoba pendekatan yang berbeda. Alih-alih mencari sinar-X yang dipancarkan oleh lubang hitam, tim mencari bintang-bintang yang mengorbit beberapa objek tak terlihat, yang ditarik oleh gravitasinya. Upaya mereka membuahkan hasil - mereka melihat bintang raksasa delapan kali lebih berat dari matahari, mengorbit di sekitar yang ternyata adalah LB-1.

Untuk memudahkan dalam penelitian lubang hitam di galaksi Bima Sakti, Liu beserta tim memutar otak dengan menggunakan Large Sky Area Multi-

Object Fiber Spectroscopic Telescope (LAMOST) di China. Teknologi tersebut dimanfaatkan untuk menemukan bintang yang hampir mati. Hingga pada akhirnya, teknologi ini menuntun tim peneliti dalam menemukan bintang raksasa berwarna biru.

Setelah itu, tim melanjutkan pengamatannya dengan bantuan teleskop Gran Telescopio Canarias di Spanyol. Tak hanya itu, peneliti juga memanfaatkan Keck Observatorium di AS. Penggunaan teknologi ini berperan penting dalam mengungkap sifat alami yang dimiliki oleh temuan para ilmuwan tersebut.

Dari serangkaian penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa bintang tersebut berusia 35 juta tahun lalu. Bintang ini memiliki massa sebesar 8 kali massa matahari. Selama hidupnya, bintang ini mengorbit lubang hitam setiap 79 hari. Penghitungan ini didasarkan pada orbit yang dikenal dengan lingkaran yang mengejutkan. Bintang ini diperkirakan memiliki pengaruh yang besar terhadap pembentukan lubang hitam di galaksi Bima Sakti sehingga ukurannya bisa sebesar ini.

Jika dilihat dari ukuran tipis LB-1, peneliti juga menyebut bahwa pembentukan tak hanya melibatkan satu bintang saja. Meski begitu, ada juga dugaan sebaliknya yang menyebut bakal ada dua lubang hitam dengan ukuran yang lebih kecil dan saling mengorbit. Kemungkinan lain yang juga memengaruhi kemunculan lubang hitam monster tersebut yaitu supernova fallback. Hanya saja, ilmuwan tak pernah membuktikannya.

Dalam penelitian lubang hitam di galaksi Bima Sakti yang masih misterius ini, ternyata ilmuwan juga menemukan black hole lain. Diketahui bahwa lubang hitam ini terbentuk karena tabrakan dua *black hole* dalam GW150914.

SAIDI RIFKY

## Hubungan Kopi dengan Risiko Kematian

**M**AKANAN yang seimbang dan sehat menjadi kunci kebugaran dan tetap sehat. Kadang kala makanan juga memiliki pengaruh dengan panjang dan pendeknya usia. Makanan yang baik dengan pola hidup sehat sebagai penyumbang utama kebugaran manusia, dan bahkan tetap awet muda. Namun kadang kala, menjalankan pola hidup sehat dengan konsumsi makanan sehat tidak bisa dilakukan dengan sederhana. Perlu waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk mengaplikasikannya. Namun ternyata, ada cara lainnya yang sederhana untuk tetap awet muda dan sehat, yakni dengan rutin minum kopi.

Dalam sebuah studi The New England Journal of Medicine, penelitian terbaru yang berjudul *Coffee Drinking and Mortality* menunjukkan, minum kopi terbukti membantu seseorang hidup lebih lama. Dalam arti, asupan kopi secara teratur dikaitkan dengan risiko kematian yang lebih rendah.

Freedman dkk dalam penelitiannya menyimpulkan, kopi mengandung ratusan senyawa berbeda, beberapa di antaranya menawarkan manfaat kesehatan yang penting. Seperti antioksidan dalam kopi bisa melindungi tubuh terhadap stres oksidasi yang disebabkan radikal bebas.

Bersama rekan penelitiannya ia mengidentifikasi sekira 1.000 antioksidan dalam biji kopi dan ratusan lainnya. Antioksidan melawan peradangan, termasuk radang sendi, aterosklerosis dan beberapa jenis kanker. Bahkan, kopi menetralkan radikal bebas, yang terjadi secara alami, yang mengarah pada penyakit kronis.

Penelitian Freedman dkk juga mengungkap hubungan antara konsumsi kopi dan risiko kematian. Penelitiannya melibatkan 229.119 pria dan 173.141 perempuan berusia antara 50 hingga 71 tahun.

Studi ini mengamati, mereka yang minum kopi paling



banyak memiliki kemungkinan lebih kecil untuk meninggal. Hasilnya, para responden masing-masing memiliki risiko 12 persen dan 16 persen penurunan kematian dini. Bahkan hanya minum satu cangkir per hari bisa menurunkan risiko kematian dini 5 hingga 6 persen.

Penelitian menunjukkan, minum kopi dikaitkan dengan penurunan risiko kematian akibat penyakit jantung, penyakit pernapasan, stroke, diabetes, infeksi, cedera dan kecelakaan. Namun, peneliti menekankan, kontribusi konsumsi kopi untuk meningkatkan kesehatan masih belum jelas. Temuan ini juga tidak membentuk hubungan sebab-akibat.

"Saya pikir temuan ini benar-benar penting untuk menunjukkan bahwa penelitian kami adalah penelitian observasional. Artinya, kita hanya meminta berapa banyak mereka minum kopi dan kemudian mengamati," kata pemimpin riset, Neal Freedman, dari U.S. National Cancer Institute di Rockville, Md.

Freedman mengungkapkan, peminum kopi umumnya cenderung merokok lebih banyak - merupakan penyebab utama kematian. "Kami menemukan bahwa peminum kopi cenderung menghadapi risiko kematian yang lebih tinggi. Tapi ketika kita tidak menghubungkannya dengan rokok, kami menemukan hubungan terbalik" ujarnya.

Freedman merekomendasikan, setiap orang sebaiknya berkonsultasi dengan dokter sebelum memulai untuk minum kopi lebih banyak. Pasalnya, riwayat kesehatan pribadi dapat memengaruhi seberapa banyak jumlah konsumsi kopi yang boleh Anda terima.

SAIDI RIFKY



## MENGUNGKAI PERADABAN PIKIR "KAFFE COGITO"

JIKA dewasa ini kita mengungkai awal era modern atau modernitas abad XV hingga abad XXI, tentu muncul jarak antargenerasi yang berlipat. Berapa ratus tahun jarak antara awal era modern dan pijakan abad XXI sekarang ini? Rentang jarak tersebut hanya mampu ditempuh melalui diskusi-diskusi cerdas dalam kerangka pikir filsafat, misalnya tentang *postmodernisme*, *postsekularisme*, dan *posthumanisme*.

Denyut nadi modern ditandai dengan penghargaan terhadap rasionalitas, akselerasi berbagai cabang sains, laju industri, kran demokrasi dan HAM, serta penghambaan sekularitas (kebutuhan duniawi semata). Hebatnya, pemikiran modern ini membentuk pemahaman manusia tentang realitas, pengetahuan, dan nilai-nilai, sehingga mencapai taraf wawasan dunia yang melahirkan beragam masyarakat dan kebudayaan di muka bumi.

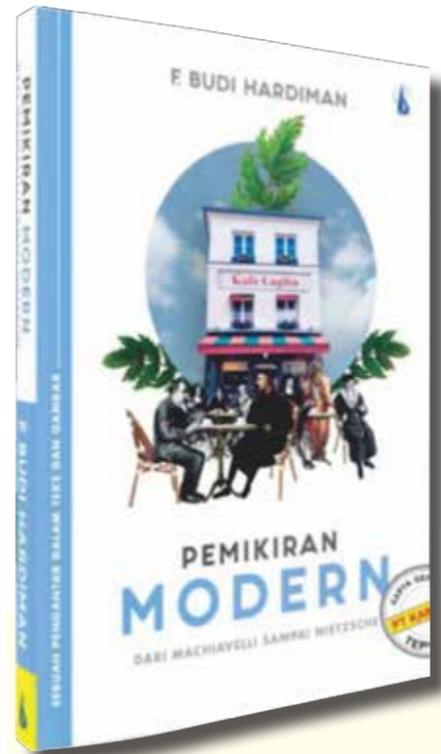
Sejak awal buku ini telah menuliskan bahwa sebelum era modern hingga abad XXI ini terhamparlah satu zaman yang disebut Abad Pertengahan. Adakah ciri khususnya? Begitu berpengaruh terhadap eksistensi hidup kali ini?

Abad Pertengahan berciri teosentris. Abad modern berciri antroposentris. Perbedaan minat zaman inilah yang membuat kilatan pikir lintas generasi lintas zaman senantiasa menarik. Ambil satu contoh, karena melihat segalanya (termasuk Tuhan) dari kacamata manusia, pemikiran modern

disebut aras pikir antroposentris. Sudut pandang ini berbeda dengan minat zaman sebelumnya (Abad Pertengahan) yang berpikir secara teosentris. Perbedaan cara pandang tersebut membuat pergeseran dari teosentris ke antroposentris dan terjadi kontinu berangsur-angsur. Pergeseran ini pun diwarnai gerakan-gerakan kontra-intelektual dan politis.

Budi Hardiman memantik teks utama buku ini dengan jabaran tesis sebab-akibat. Bahwa klaim rasionalitas modern dimulai dengan perlawanan terhadap metafisika dan sistem wawasan dunia religius Abad Pertengahan. Kemudian memuncak pada kemenangan rasionalitas pada zaman Pencerahan abad XVIII. Akhirnya, rasionalitas pun tumbang pada akhir abad XIX dalam awal cengkeraman filsafat Nietzsche.

Buku ini lebih menitikkan uraian segi mentalitas pikir ketimbang mengurut-urut kesejarahannya. Maksud segi mentalitas adalah memaparkan fundamen pemikiran yang menjadi landasan peradaban Barat modern. Segi baiknya, buku ini lebih mudah dipahami oleh pembaca yang tidak tahu seluk-beluk filsafat. Bayangkan, jangka waktu yang dibahas dalam buku ini meliputi 4 abad. Oleh karena itu, bentangan pemikiran sangatlah rumit dan penuh tikungan warna-warni. Untuk mempermudah paparan, 10 bab buku ini ditata dalam dua garis besar, yaitu aliran atau zaman filsafat dan tokoh.



### Pemikiran Modern dari Machiavelli sampai Nietzsche

**Penulis** : F. Budi Hardiman

**Penerbit** : Kanisius

**Cetak** : 1 November 2019

**Tebal** : xii + 300 halaman

**ISBN** : 978-979-21-6231-8

**Harga** : Rp95.000

### Apa pentingnya kita membaca buku ini?

Ada sekitar 50 filsuf yang diterakan. Hanya 18 filsuf dibahas terperinci dalam 7 aliran atau isme. Perinciannya seperti Renaisans (N. Machiavelli, G. Bruno, F. Bacon); Rasionalisme (R. Descartes, B. Spinoza, G.W. Leibniz, B. Pascal); Empirisme (T. Hobbes, J. Locke, G. Berkeley, D. Hume); Idealisme (J.G. Fichte, W.J. Schelling, F. Hegel); Materialisme (L. Feuerbach, Karl Max); Positivisme (A. Comte); Vitalisme (F. Nietzsche).

Para filsuf yang diulas dalam buku ini dapat membantu kita untuk mencerna dasar-dasar mentalitas yang terdalem dari peradaban modern bukan hanya di Eropa, melainkan juga di dalam kebudayaan lain yang getol melangsungkan modernisasi. Sains, teknik, ekonomi kapitalistis, negara hukum, dan demokrasi modern berpangkal dari sebuah pemahaman filosofis yang menjadi dasar modernitas kita, yaitu subjektivitas (rasionalitas), ide kemajuan, dan kritik.

Terhitung dari Machiavelli hingga Nietzsche, 50-an filsuf mengembangkan tiga dasar modernitas itu dalam berbagai ajaran, mulai dari humanisme renaisans, rasionalisme, empirisme, kritisisme, idealisme, materialisme, hingga vitalisme. Penulis mengingatkan bahwa gagasan para filsuf tersebut sering dicurigai sebagai bujuk subversif oleh penguasa. Dianggap bidah oleh kaum ortodoks agama. Bahkan, dipandang sinting oleh para medioker yang tidak pernah menyangsikan kewarasan akal sehat.

Kita ambil hikmahnya, tanpa gagasan-gagasan mereka mungkin umat manusia tidak akan sampai pada kematangan berpikir tentang diri pribadinya, alamnya, masyarakatnya seperti tersaji dalam ilmu-ilmu modern sekarang ini. Kini saatnya masyarakat tidak hanya puas menguasai sains dan

teknologi, tetapi harus memahami secara kritis alam pikiran yang menjadi dasar adab modern agar dapat diterapkan dengan bijaksana.

Menjadi kendali pikir masyarakat abad XXI adalah kritik filsuf Nietzsche tentang "kematian Allah" dan nihilisme (hlm. 270). Di antara para filsuf modern, Nietzsche tergolong pemikir ekstrem yang mengajarkan dan menghayati ateisme. Sejak muda, ia menjadi ateis. Ia menjadi murid Profesor Ritschl di Leipzig. Waktu itu berusia 21. Secara gamblang, ia mengumumkan ateisnya dalam aforisme 125 buku *Pengetahuan Ceria*.

Ia menceritakan orang gila yang membawa sebuah lentera menyala ke tengah-tengah pasar dan terus-menerus

“**ORANG-ORANG ZAMAN ITU TIDAK MEMAHAMINYA SAMPAI DATANG ZAMAN KEGILAAN UNIVERSAL, YAKNI PENEMUAN KESADARAN BAHWA MANUSIA TELAH KEHILANGAN ALLAH**”

berseru, "Aku mencari Allah! Aku mencari Allah!" Orang-orang di pasar menertawakannya. Tetapi si gila itu malah melompat ke tengah-tengah mereka sembari berteriak, "Ke manakah Allah? Aku memberi tahu kalian. Kita sudah membunuhnya. Kita semua pembunuh.... Tidakkah kita menghirup ruang kosong? Allah sudah mati. Dan kita telah membunuhnya."

Dalam perumpamaan tersebut, Nietzsche melukiskan dirinya sebagai orang gila itu. Ia tidak hanya mengumumkan ateisme, tetapi juga meramalkan datangnya zaman ateis-

tis. Kegilaan ini adalah kehilangan Allah. Orang-orang zaman itu tidak memahaminya sampai datang zaman kegilaan universal, yakni penemuan kesadaran bahwa manusia telah kehilangan Allah. Ia menyambutnya dengan girang sebab kematian Allah adalah kebebasan manusia. Tak ada larangan atau aturan lagi.

"Kematian Allah" membuat manusia kehilangan arah, sendiri, dan sepi. Inilah jerat nihilisme Nietzsche. Ini pula ramalannya untuk kehidupan manusia yang akan datang. Hilangnya kepercayaan ini juga menghilangkan kepercayaan manusia terhadap segala nilai. Ia pun membuat tulisan ramalan tentang dirinya sendiri.

Nietzsche sangat berpengaruh dalam sastra, teologi, psikologi, pun sosiologi. Dalam filsafat Barat, pengaruhnya sangat kental dalam pemikiran Heidegger, Jaspers, Foucault, dan Derrida. Imbasnya, dalam diskusi seputar tema filsafat posmo, ia jagonya. Ia dianggap sebagai seorang filsuf yang menggiring filsafat modern hingga ke batas-batasnya. Akibatnya, para filsuf kini tidak hanya bicara tentang "kematian Allah", tetapi juga "kematian manusia", dan "tamatnya filsafat".

Tak ada gading yang tak retak. Buku ini retak pada satu peristilahan tentang romantisme (hlm. 111). Sebenarnya acuan yang sah adalah romantisme. Romantisme cenderung berarti picians. Romantisme digaungkan JJ Rousseau (Prancis). Gerakan romantisme ini berlangsung di bidang kesusastraan, kebudayaan, kesenian, filsafat, dan lebih mengutamakan segi emosional dan kepekaan afeksi serta petualangan fantasi manusia daripada segi rasionalitasnya. Dimensi afektif menonjol. Filsafat Timur memengaruhinya. Romantisme mulai sejak tahun 1770-an hingga dasawarsa pertama abad XIX. Terkesan tercakup dalam zaman Pencerahan.\*

\*ANTON SUPARYANTA, Alumni FIB UGM, kontributor naskah tentang pendidikan-seni-budaya-sastra di beberapa harian pagi (Jawa Pos, Koran Jakarta, Lampung Post, Riau Pos, Solopos, Suara Merdeka, Radar Madura, Kabar Madura, KR, Minggu Pagi, buletin rohani, majalah INSPIRASI KAS Semarang, majalah Pewara Dinamika UNY), jurnal daring BASABASI.CO, portal sastra LITERA.CO.ID, majalah sastra SIMALABA.COM, dan majalah NEOKULTUR.



**STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER**

**Sutradara:**

J.J. Abrams

**Pemain:**

Daisy Ridley,

John Boyega,

Carrie Fisher,

Mark Hamill,

DLL

**Produksi:**

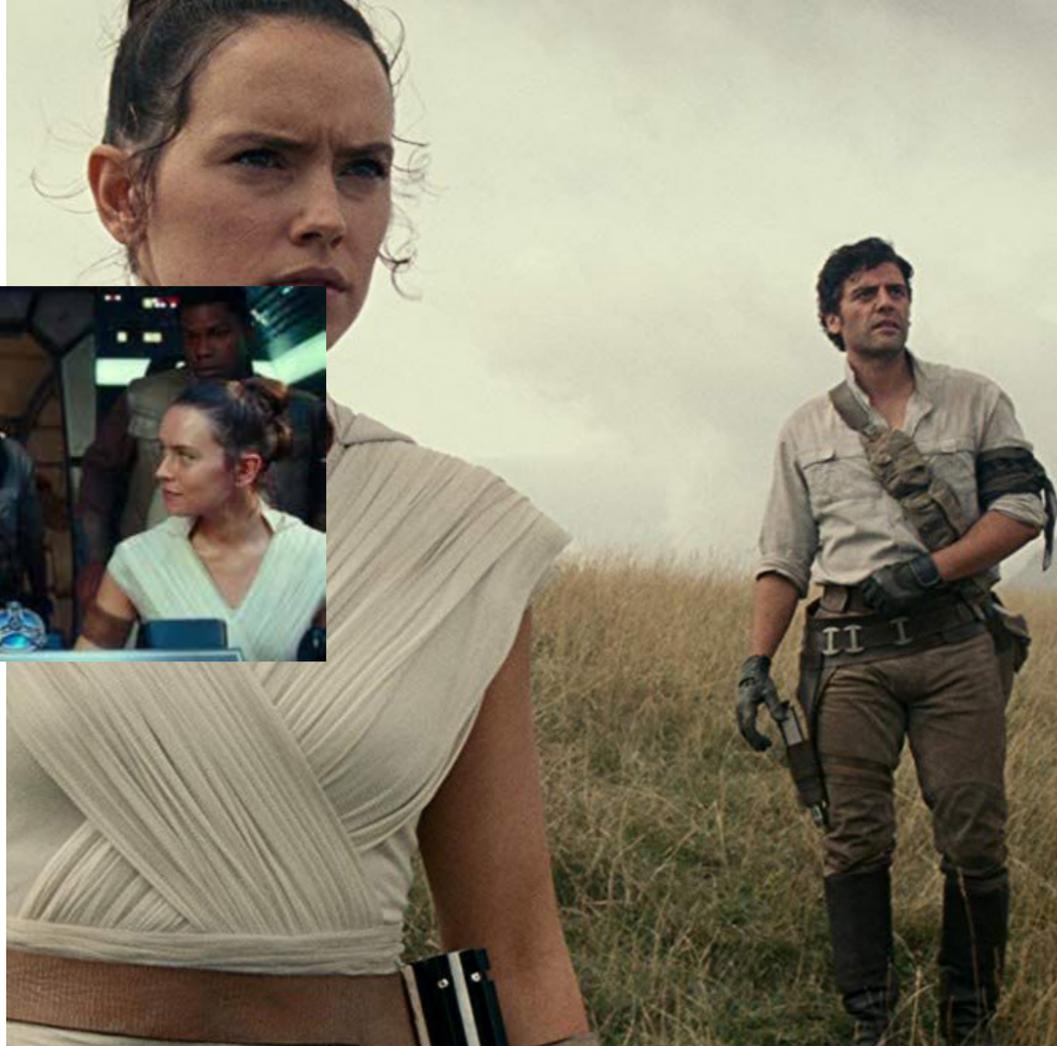
Lucasfilm Ltd.

Walt Disney Studios

**Tayang:**

20 Desember 2019

(Amerika Serikat)



## Laga Pamungkas Perang Bintang

**F**IKSI perang antar-galaksi kembali hadir lewat film *Star Wars* episode IX: *The Rise Of Skywalker*, dan menjadi salah satu film yang paling dinanti di 2019, episode kali ini sekaligus menjadi penutup saga *Star Wars* yang eksis sejak 1977.

Dengan sejarah panjang selama 40 tahun dan pengaruh budaya yang luar biasa dari sebuah fenomena, Disney mengingatkan mengapa *Star Wars* sangat berharga.

Lucasfilm dan Disney memanfaatkan lebih dari 40 tahun warisan kisah *Star Wars* dengan sebuah trailer terbarunya untuk bab penutup dari kisah utama.

Kali ini, J.J. Abrams dipercaya sebagai sutradara, menggantikan Rian Johnson yang banyak menuai kritik dari para fans. Plot film akan mengambil tema kejadian setelah satu tahun perang antara First Order dan Resistance pada episode sebelumnya. Kylo Ren (Adam Driver) yang menjadi pemimpin baru First Order, terus berusaha membangun hegemoni di galaksi dengan menumpas pergerakan bawah tanah yang dilakukan oleh pasukan Resistance.

Selain menyajikan aksi perang bintang, episode pamungkas kali ini tentunya akan banyak mengungkap fakta menarik, seperti asal usul tokoh utama Rey (Daisy Ridley) yang ma-

sih misterius. Rey memiliki bakat luar biasa dalam mengendalikan *force*, namun belum diketahui, siapa sebenarnya orang tuanya, dari mana dia mendapatkan bakat mengendalikan *force*, dan apakah dia akan beralih ke dunia *dark side*.

Selain itu, *Star Wars* episode IX juga akan menceritakan hubungan Rey dengan tokoh Kylo Ren yang ternyata memiliki keterkaitan telekinesis begitu kuat.

Trailer terbaru dari *Star Wars: The Rise of Skywalker* membangkitkan kekuatan, semangat, dan emosi kisah *Star Wars* yang telah terhubung.

Dalam teaser film yang sudah dirilis juga menampilkan sosok Luke Skywalker yang hadir sebagai *force ghost*. Luke mengatakan ke-

pada Rey bahwa “Kami sudah mewariskan segala hal yang kami tahu. Sekarang, peninggalan dari ribuan generasi hidup bersamamu.” Hal ini memunculkan pertanyaan apakah Rey akan menjadi seorang jedi baru, setelah klan jedi dibantai habis oleh The New Republic dan First Order.

Yang tidak kalah menarik dalam episode kali ini adalah kemunculan Super Villain, Palpatine a.k.a Dart Sidious, yang ternyata masih hidup dan membangun pasukan star destroyer untuk merebut galaksi. Kehadiran Palpatine dan armadanya melawan Resistance akan menjadi laga epik yang akan memuaskan kerinduan para fans.

Sementara itu, Finn (John Boyega) dan Poe Dameron (Oscar Isaac), akan kembali menjadi pemeran

pendukung, selain kehadiran tokoh ikonik *Star Wars*, seperti Lando Calrissian (Billy Dee Williams), droid C3PO, dan R2D2.

Skoring film masih dipercayakan kepada komposer John Williams. Latar belakang musik yang dihadirkan oleh John dalam setiap episode *Star Wars*, selalu mampu memukau dan ikonik. *Star Wars: The Rise Of Skywalker* akan berdurasi 155 menit sekaligus menjadi film *Star Wars* dengan durasi terpanjang yang tentunya akan dapat memuaskan penonton. Para fans juga dibuat penasaran siapa yang akan bangkit. Mari saksikan keseruan petualangan Rey dan para pasukan Resistance pada penayangan perdananya pada 20 Desember 2019.

■ AJI NUR CAHYO

# Sebuah Gagasan

Hari Taqwan Santoso\*

**N**AMANYA Ngaliman dan sudah dua puluh tiga tahun ini dia menjabat sebagai Kepala Dusun. Namun istilah “kepala dusun” kurang populer di desa. Orang lebih akrab dengan “kamituwo”. Dan dari semua kamituwo di desanya, Ngaliman adalah yang paling muda.

Usianya juga selisih lebih dari sepuluh tahun dari para kamituwo yang lain. Sebab, sewaktu menduduki jabatan itu untuk pertama kalinya dia masih berusia dua puluhan awal sementara yang lain sudah tiga puluhan. Oleh karena itu, jika para kamituwo lain dipanggil dengan “Pak Wo” diikuti nama masing-masing, Ngaliman dipanggil “Kang Wo Ngaliman”.

Hari Minggu, seluruh instansi pemerintah termasuk kantor desa libur. Tentu saja. Kang Wo Ngaliman tidak punya tanggungan apa-apa dari Pak Lurah sehingga ia bisa leluasa bermain dengan burung-burung *lovebird* peliharaannya. Pukul enam pagi, matahari masih belum terlalu panas. Kang Wo Ngaliman menurunkan kurungan-kurungannya satu-persatu lalu mulai menyuapi burung-burung di dalamnya dengan ulat hongkong. Paruh-paruh merah mungil mereka dengan penuh semangat menyambut ulat-ulat hongkong yang meronta dalam jepitan telunjuk dan jempol Kang Wo Ngaliman. Sekali gigit kepala ulat hongkong itu putus, sementara sisa badannya masih menggeliat untuk beberapa saat. Si burung tampak mengunyah-ngunyah cepat dan setelah menelan makanannya, dia maju sedikit dengan gerakan melompat meminta tambah. Kang Wo Ngaliman tahu burungnya lapar dan senang diberi makan ulat hongkong, dia julurkan jari penjepitnya lebih jauh ke dalam kurungan melalui sela-sela jerujinya sehingga paruh si bu-



<https://spectator.imgix.net>

rung bisa menyapai ulat itu dengan mudah.

Ulat dilumat, burung pun bercicit kegirangan. Kang Wo Ngaliman mengulangi langkah-langkah ini sampai semua burungnya cukup kenyang. Lalu dia memandikan mereka menggunakan *sprayer* berisi air bersih. Kenyang dan merasa segar, burung-burung itu menggetar-getarkan tubuhnya. Butir-butir air mengham-

bur. *Kamituwo* itu kemudian menjemur mereka selama beberapa saat sebelum mengembalikan ke tempat semula.

Ia lalu menyuruh istrinya membuatkan segelas kopi sementara dia sendiri mulai menyalakan sebatang rokok sambil duduk-duduk santai mendengarkan kicauan-kicauan riang *lovebird-lovebird* miliknya. Habis setengah batang, kopinya datang. Kopi panas, rokok, dan kicauan *lovebird* adalah tiga pilar utama yang menyangga surga dunia di hati sang kamituwo. Kalau sudah ada ketiga hal itu, bahkan istrinya pun seringkali dikesampingkan.

Asap rokok Kang Wo Ngaliman mengepul ke awang-awang sesekali. Bersamaan dengan itu melayang pula pikirannya. Dia teringat tawar-menawar antara dirinya dengan pedagang burung di sebuah pasar hewan di Yogyakarta. Dia memperoleh *lovebird-lovebird* itu dari sana. Waktu itu dia sedang studi banding bersama beberapa kamituwo lain se-kecamatan. Selama tiga hari di Yogyakarta dia menginap di salah satu hotel bintang tiga dekat pasar hewan yang bersangkutan. Hari terakhir, dia menyempatkan diri untuk melihat-lihat burung sebelum pulang siangnya. Dia pun membeli beberapa ekor *lovebird*.

Mengingat itu, Kang Wo Ngaliman bersyukur serta ber-

terima kasih pada pemerintah pusat yang telah menggelembungkan kucuran Dana Desa. Berkat penggelembungan tersebut perangkat desa tingkat kepala dusun bisa melakukan studi banding ke Yogyakarta yang jarak tempuh ke sana dari desanya memakan waktu setengah hari. Dia juga bisa merasakan nyamannya hotel bintang tiga. Terlebih lagi, tak ada seorang pun warganya yang pernah bertanya apa hasil studi banding itu. Mereka bahkan tidak tahu kalau kegiatan itu ada berkat menggelembungnya Dana Desa yang dikucurkan pemerintah pusat. Jadi apa pun hasilnya, asal ada laporan tertulis, dia tidak merasa punya tanggungan apa pun karena tidak akan ada yang menagih.

“Semoga pada periode selanjutnya Dana Desa ditambah lagi,” gumam Kang Wo Ngaliman sambil tersenyum lebar. Mungkin, pikirnya, kalau itu terjadi dia bisa ikut lebih banyak studi banding lagi bahkan sampai ke luar negeri.

Di tengah lamunan mengasyikkan itu terdengar suara sepeda motor dua tak bersama asap dan baunya yang khas. Kang Wo Ngaliman mendadak tersadar dari lamunannya dan buru-buru menampakkan raut wajah masam. Suara motor itu begitu mengganggu telinganya dan dia khawatir asapnya akan meracuni *lovebird-lovebird* yang sangat dia sayangi. Namun raut wajah ini tidak ditangkap oleh mata si pengendara. Setelah dia mematikan mesin, dia memarkir motor butut itu di halaman rumah sang kamituwo dengan seulum senyum lebar. Perempuan paruh baya itu turun dari jok, mengambil bingkisan di kait yang terpasang di dek motornya lalu menghampiri kepala dusunnya dengan memberi salam hormat.

“Yu Pariyem ta. Mari masuk,” ajak Kang Wo Ngaliman dengan nada datar. Dia masih kesal karena asap dan suara motor perempuan yang baru datang itu, tapi karena melihat dia membawa bingkisan “SOP” tidak tertulisnya mengatakan bahwa dia harus menyambut Yu Pariyem dan mempersilakannya masuk. Di desa, warga yang tanpa angin dan hujan mendatangi perangkat dengan membawa bingkisan itu pasti mempunyai keinginan di luar hak-hak mereka sebagai warga, permintaan-permintaan yang dari situ si kamituwo bisa mengambil keuntungan. Misalnya untuk mengurus akta kelahiran atau kartu keluarga, masih banyak warga di desa tempat tinggal Kang Wo Ngaliman yang kebingungan dengan prosedurnya. Apalagi kalau sampai harus datang ke kabupaten. Oleh

karena itulah orang-orang seperti Kang Wo Ngaliman ada untuk “membantu” mereka mengurus urusan-urusan itu. Warga yang kebanyakan berpendidikan rendah itu, tentu saja tidak mau repot dan lebih memilih bergantung pada orang-orang seperti Kang Wo Ngaliman ini. Pokoknya asal bayar, terima jadi dan urusan selesai.

Sang kepala dusun masuk lebih dulu, diikuti perempuan dengan rahang persegi yang disebut Yu Pariyem tadi. Mereka berdua duduk di ruang tamu, Yu Pariyem meletakkan bingkisannya di atas meja. Hening sejenak, lalu perempuan itu mulai angkat bicara.

“Begini, Kang Wo Ngaliman. Kedatangan saya kemari, pertama-tama adalah untuk bersilaturahmi, ingin tahu kesehatan Kang Wo Ngaliman sekeluarga...” ucapnya dengan tata bahasa yang baku dan formal, khas orang-orang di desanya.

Kang Wo Ngaliman yang tidak seratus persen berkenan dengan kehadiran perempuan itu pun langsung memotong, “Cukup, cukup... Langsung saja ke intinya.”

Yu Pariyem tersenyum, dia juga sebenarnya bukan orang yang suka berbasa-basi. “Anu... Saya mau menjual tanah yang di tepi jalan raya itu, Kang.”

“Hm...” Kang Wo Ngaliman tahu tanah mana yang dimaksud. Namun dia masih belum paham sangkut paut antara tanah itu dengan dirinya.

“Lantas, apa hubungannya denganku? Kalau pembalikan nama surat tanah, itu kan urusan pembeli. Atau, maksud Sampeyan minta dicarikan pembeli, bagitu?”

“Emm... Bukan begitu Kang. Saya sudah punya pembeli, seorang bos besar dari kota. Dia bahkan berani membeli mahal tanah saya itu, katanya sangat cocok untuk bisnis di masa depan. Makanya saya bermaksud untuk segera menyetujui tawaran itu.”

Dahi Kang Wo Ngaliman mengerenyit. Dia semakin tidak paham.

Melihat itu Yu Pariyem segera melanjutkan. “Tanah saya itu kan berdampingan dengan tanah Mbok Sumi, janda renta yang hidup sebatang kara tanpa sanak saudara dan sudah pikun itu. Calon pembeli tanah saya juga bermaksud membeli tanah itu sekalian, tapi berhubung keadaan Mbok Sumi tidak memungkinkannya untuk *urun rem-*

“  
DI DESA, WARGA YANG  
TANPA ANGIN DAN HUJAN  
MENDATANGI PERANGKAT  
DENGAN MEMBAWA  
BINGKISAN ITU PASTI  
MEMPUNYAI KEINGINAN  
DI LUAR HAK-HAK MEREKA  
SEBAGAI WARGA,  
”

bug' dan tidak punya ahli waris yang sah, dia memutuskan untuk membeli tanah saya saja. Ini kesempatan yang sangat langka, sayang sekali kalau tidak diambil. Jarang sekali ada orang kaya raya dari kota pergi ke desa untuk membeli tanah dengan harga yang begitu tinggi. Dan melihat ini saya punya sebuah gagasan."

Yu Pariyem berhenti sejenak.

"Seandainya saya menggeser batas tanah saya ke arah tanah milik Mbok Sumi barang dua atau tiga meter, saya pasti dapat untung banyak. Toh bos dari kota itu juga belum tahu secara rinci batas-batas tanah saya. Soal menggeser patok itu sangat gampang, tapi mengubah tulisan yang ada di surat tanah, itu lain ceritanya."

"Maksudnya, Sampeyan minta saya mengubah surat tanah Sampeyan, begitu?"

Yu Pariyem sengaja tidak menjawab. Dia hanya tersenyum sambil tersipu-sipu.

Tertarik, Kang Wo Ngaliman pun bertanya, "Memangnya dihargai berapa tanah Sampeyan itu?"

Yu Pariyem menyebutkan nominal yang cukup besar untuk permeter tanah yang dimaksud. Angkanya hampir-hampir tidak wajar. Benar saja apa yang dikatakannya tadi, bahwa kesempatan seperti ini sangat langka sampai-sampai Kang Wo Ngaliman pun mengiyakan seketika. "Baik. Aku setuju. Tapi aku minta enam puluh persen!"

Mata Yu Pariyem terbelalak seketika. Dia memang sudah berniat untuk memberikan sebagian uangnya nanti pada si kamituwo. Tapi dia tidak menyangka laki-laki sialan itu akan meminta banyak. Ini namanya pemalakan. Meski dalam hati mengumpat-umpat, Yu Pariyem menampakkan wajah santai. Dia berada dalam saat-saat menentukan, kalau dia salah mengambil langkah maka gagasannya tadi tidak akan terlaksana. "Waduh. Mbok ya jangan begitu Kang. Saya ini kan orang kecil. Bagaimana kalau tiga puluh persen. Toh itu juga banyak."

Si kamituwo tahu dirinya unggul. Karena itu dia membalas dengan suara bulat. "Enam puluh persen atau tidak sama sekali. Mengubah surat tanah itu butuh wewenang

<sup>1</sup> Bernegosiasi.

\*HARI TAQWAN SANTOSO, tinggal di Yogyakarta. Aktif sebagai volunteer Global Village untuk Habitat for Humanity Yogyakarta. Pernah menerbitkan novel The Jazab Boy (Diva Press, 2012), Mandaraka (RWTC, 2017) Antologi Puisi Teruntuk Mentari dan Rembulan (Bebook Publisher, 2016), Sajak-Sajak Rembulan Biru (WA Publisher, 2017). Penulis dapat dihubungi lewat wa : 08987766859 atau email : narasoma7@gmail.com.

yang jauh lebih besar dari wewenang seorang Kepala Dusun seperti aku. Aku harus meminta bantuan beberapa orang kawan lagi, yang tentu saja tidak gratis. Paling-paling nanti aku cuma dapat lima persen. Lagipula, empat puluh persen untuk Sampeyan kan sudah banyak, daripada tidak dapat apa-apa. Hayo?"

Sekarang ganti dahi Yu Pariyem yang mengrenyit. Dengan berat hati dia terpaksa setuju. "Baiklah kalau begitu, Kang."

"Satu lagi. Aku butuh kedua surat tanah yang mau diubah, punya Sampeyan dan punya Mbok Sumi. Bisa?"

"Beres, Kang."

...

Memang, jabatan Kepala Dusun belaka tidak bisa disalahgunakan untuk mengubah surat tanah. Tapi berkat beberapa orang kenalan, Kang Wo Ngaliman berhasil melakukannya. Jual-beli tanah itu segera dilakukan, Yu Pariyem dan Kang Wo Ngaliman mendapat bagiannya masing-masing. Namun, Mbok Sumi yang terkenal pikun itu ternyata masih ingat batas-batas tanahnya dengan tanah Yu Pariyem.

Begitu melihat patok tanah miliknya bergeser beberapa meter, dia langsung mendatangi rumah Yu Pariyem dan marah besar di sana. Mereka bertengkar hebat dan beradu mulut seperti kesetanan. Namun pada akhirnya Mbok Sumi harus mengalah karena bagaimana pun surat tanahnya mengatakan lain. Generasi yang tahu batas-batas pasti tanah itu sudah meninggal, sementara para warga yang masih hidup tidak begitu menaruh perhatian padanya. Sehingga tidak ada yang tahu pasti tentang batas tanah yang sebenarnya. Jadi, bagaimana pun Mbok Sumi tetap kalah, apalagi dia tidak punya ahli waris atau kerabat. Meski tidak mau menyerah, tapi satu-satunya langkah tersisa yang bisa dia lakukan adalah berteriak "Maling tanah! Maling tanah! Maling tanah!" setiap kali dia lewat di depan rumah Yu Pariyem.

Berhasil mendapat untung besar dari kejadian ini, Kang Wo Ngaliman memutuskan untuk melanjutkan pekerjaan kotor itu.

KOMIK BANG PEPE  
MARKUP LEMAIBON



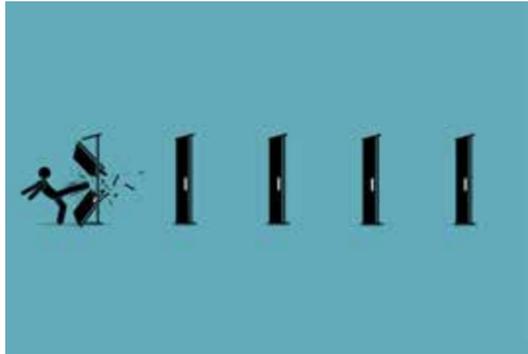
## Inovasi di Era Disrupsi

DUNIA kini tengah mengalami guncangan besar. Sebagaimana diilustrasikan dengan baik oleh Paul Gilding dan Francis Fukuyama dalam bukunya “*The Great Disruption*”, konvergensi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) membentuk akumulasi perubahan budaya yang dramatis dan meningkatnya persaingan global.

Dalam kasus yang ada, perubahan budaya itu dapat dilihat dari kemenangan bisnis-bisnis baru dalam memenangkan pertarungan global. Keberhasilan perusahaan *Alibaba.com* sebagai *marketplace* tapi tak memiliki barang dagangan. *Gojek* sebagai sebuah perusahaan yang bergerak dalam dunia transportasi tetapi tidak memiliki kendaraan, kita juga dapat melihat *Traveloka*, sebagai perusahaan penyewaan hotel tapi tidak memunyai hotel, atau dalam hal lain kita dapat melihat *rapper* Rich Brian sebagai musisi asal Indonesia di kancah musik internasional dengan hanya belajar bahasa Inggris di media *Youtube*. Fenomena ini dinamakan dengan *disruptive innovation*, di mana era disrupsi telah mendorong dunia global berpikir tentang bagaimana menerapkan pengetahuan “masa depan” dalam kondisi “sekarang”.

Senapas dengan adanya era disrupsi, seharusnya tata kelola pemerintahan dalam negeri mengikuti jejak *disruptive innovation* oleh dunia global. Di mana tata kelola dan pelayanan publik yang buruk dan lambat, dapat digantikan dengan inovasi tata kelola dan pelayanan publik yang baik dan cepat (*good governance*).

Namun demikian, di tengah maraknya persaingan global, laporan inovasi Indonesia menurut *Global Innovation Index 2018* menunjukkan Indonesia masih pada peringkat 85 dari 126 negara (*World Economic Forum, 2018*). Peringkat di regional Asia Tenggara, posisi inovasi Indonesia masih jauh di bawah Malaysia, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, serta Filipina. Sedangkan di bidang kemudahan berusaha, berdasarkan data *Ease of Doing Business 2018*, Indonesia memperoleh *ranking* lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya. Peringkat kemudahan be-



<https://obrieneg.com>

rusaha atau *Ease of Doing Business* Indonesia turun satu peringkat dari 72 ke 73 tahun ini. Catatan kelam pelayanan di daerah juga masih perlu diperbaiki. Laporan Ombudsman RI 2018 mengenai pelayanan di daerah, menjelaskan pemenuhan komponen standar pelayanan di 107 pemerintah kabupaten (pemkab) menunjukkan, sebanyak 44,86% atau 48 pemkab masuk dalam zona merah dengan predikat kepatuhan rendah.

Dengan banyaknya tekanan itu, pemerintah sebenarnya telah mulai mereformasi pemerintahannya. Sejak diberlakukannya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) dan PPP No 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, peraturan ini tengah berusaha meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan daya saing daerah. Reformasi pemerintahan pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur.

### Inovasi di pemerintahan daerah

Pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintah adalah inovasi daerah. Konsep baru dalam ide yang inovatif tidak harus baru sama sekali. Seperti apa yang tertuang dalam PP No 38 tahun 2017 yang menyebutkan inovasi adalah perubahan keseluruhan atau sebagian.

Tujuan dari adanya inovasi untuk menyelesaikan persoalan yang ada di daerah. Jika melihat persoalan di daerah khususnya perkotaan, di Indonesia pertumbuhan urbanisasi perkotaan terus mengalami peningkatan yang signifikan. Tidak jarang, semakin banyaknya penduduk tinggal di kota, permasalahan kota seperti urbanisasi, kemiskinan, kualitas lingkungan hidup, kapasitas daerah untuk pengelolaan kota, menjadi perhatian pemerintah dalam menyelesaikannya.

Pada tingkat kota, Kota Surabaya dianggap berhasil dalam mengembangkan konsep *smart city*-nya. Upaya Pemerintah Kota Surabaya membangun sebuah kota cerdas akhirnya berbuah manis. Pada 2011, Kota Surabaya di-

anugrahi predikat kota cerdas yang diperoleh pada ajang *Smart City Award 2011*. *Smart City Awards* merupakan penghargaan yang diberikan kepada kota yang sukses membangun sistem teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Surabaya juga membangun *Surabaya Single Window* (SSW) sebagai inovasi layanan perizinan. SSW di Surabaya merupakan layanan perizinan satu pintu untuk mengurus 24 surat perizinan, mulai dari izin membuat perusahaan, izin reklame, sampai izin mendirikan bangunan (IMB). Rentang waktu penyelesaian izinnya pun dibuat cepat dan transparan antara 14 hingga 30 hari yang sebelumnya memerlukan waktu berbulan-bulan. Selain untuk memangkas sistem birokrasi yang rumit, sistem perizinan ini juga meminimalkan kemungkinan adanya pungutan liar.

Selain Surabaya, Kota Bandung juga melakukan program inovasinya. Konsep kota cerdas Bandung dinamai dengan “Bandung *Smart City 1.0*”. Setidaknya ada empat hal kerangka dasar sebelum membangun kota cerdas Bandung yang diinisiasi oleh Ridwan Kamil. Keempat elemen tersebut meliputi pelayanan publik, perbaikan kinerja aparatur, membangun interaksi warga dengan pemerintah daerah, serta keterbukaan akses data. Keempat hal tersebut menjadi pilar bagi pembangunan kota cerdas di Bandung. Sedangkan untuk mendukung terwujudnya kota cerdas, Ridwan Kamil melakukan pendekatan berbasis komunitas dan gotong royong kepada *stakeholder*.

Sedangkan di daerah lainnya Kabupaten Klungkung, Bali mencoba mengubah sampah warga menjadi listrik. Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS) meraih penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik. Dalam metodenya, sampah diolah menjadi dua teknik. Pertama *peuyeumisasi* dan kedua *briketisasi*. *Peuyeumisasi* adalah teknik mengubah sampah menjadi gas menggunakan alat *bio activator*; kemudian gas tersebut digunakan sebagai bahan bakar menggerakkan generator untuk memproduksi listrik. Sementara *briketisasi* adalah teknik mengubah sampah menjadi bahan bakar briket, kemudian briket tersebut dapat dijual kepada pihak Indonesia Power. Selain itu, Kabupaten Klungkung juga mendapatkan penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi 2018 yang diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia.

Adi Suhendra

Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kementerian Dalam Negeri



Fenomena di atas adalah fenomena *disruption innovation* pada dunia pemerintahan dalam negeri. Pemerintahan dalam negeri sudah sepatutnya membuat modal sebagai investasi perubahan tata kelola pemerintahan di daerah. Pemerintahan daerah sebagai ujung tombak pelayanan memulai inovasi-inovasi mereka pada sektor manajemen internal dan pelayanan kepada masyarakat. Sebenarnya model pemerintahan dalam negeri yang mampu beradaptasi dalam era disrupsi adalah dengan menggunakan upaya-upaya inovatif dan bagaimana cara untuk mendefinisikannya.

Selain itu, pemerintahan dalam negeri di daerah jangan hanya bergantung pada upaya digitalisasi. Ada baiknya selain tetap pada penggunaan informasi dan teknologi, diperlukan perpaduan antara inovasi teknologi dan inovasi sosial, sebagai bentuk upaya poros jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri, meningkatkan pelayanan publik, menegakkan demokrasi dan menjaga integrasi bangsa.

Adaptasi (*Adaptation*) sebagaimana gagasan Talcot Parson adalah langkah pertama untuk memulai perubahan. Sebuah sistem ibarat makhluk hidup, artinya agar dapat terus berlangsung, sistem harus dapat menyesuaikan diri di era disrupsi.

Adapun langkah kedua adalah Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*). Sistem di Kementerian Dalam Negeri harus mendefinisikan dan mencapai tujuan-tujuan utamanya. Jika dalam visi Kementerian Dalam Negeri adalah ingin menjadi poros jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri, meningkatkan pelayanan publik, menegakkan demokrasi dan menjaga integrasi bangsa. Maka perumusan pencapaian harus dilakukan dengan cara-cara inovatif.

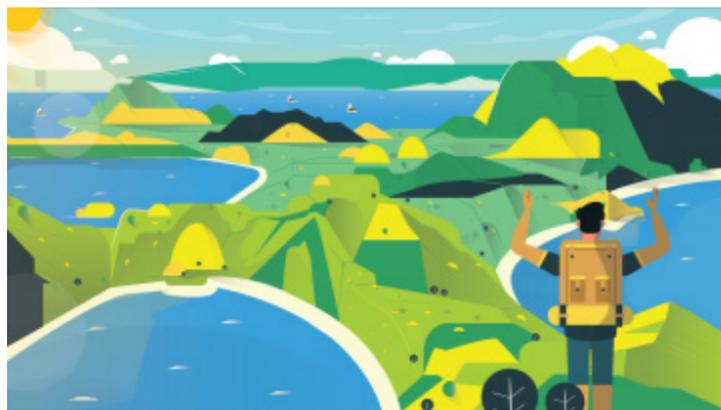
Sedangkan ketiga adalah integrasi (*integration*). Sistem harus mengatur hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Ia pun harus mengatur hubungan antar ketiga *imperative* fungsional, yakni *adaptation*, *goal*, dan *latensi*. Keempat adalah pemeliharaan pola (*latensi pattern maintenance*) sistem di Kementerian Dalam Negeri harus mampu melengkapi, memelihara, dan memperbaiki motivasi individu dan pola-pola budaya inovatif dengan mempertahankan motivasi tersebut.

## Pengembangan Wisata Super Prioritas

**P**ERUSAHAAN aplikasi pemesanan tiket berlibur dunia, *Hopper*, baru saja merilis 10 top destinasi wisata dunia pilihan milenial 2019. Hasilnya, Denpasar, Bali menduduki peringkat ke-4 destinasi paling ngetren setelah Bora-Bora, St Martin dan Aspen Colorado. Posisi Bali mengalahkan Kahului di Hawaii, Dublin di Irlandia, St Lucia, Tokyo, Palm Spring dan Anchorage, Alaska. Dalam keterangannya, *Hopper*, menyebutkan bahwa pada aplikasinya terdapat fitur *Watch a Trip*, di mana para traveler dapat memasukkan destinasi yang paling diinginkan untuk nantinya *Hopper* akan memberikan notifikasi ketika ada penawaran diskon tiket atau apapun hal yang terkait.

Sebelumnya, pencapaian lain yang membanggakan juga didapat ketika *publisher* ternama Inggris, *Rough Guides*, memilih Indonesia menjadi negara terindah ke-6 di dunia, setelah Afrika Selatan, Italia, Selandia Baru, Kanada dan Skotlandia. Posisi tersebut relatif sangat prestisius bahkan melebihi status beberapa negara indah di Asia lainnya seperti India yang nangkring di posisi ke-13 ataupun Vietnam yang menyusul di peringkat 20. Indonesia dianggap unggul karena daya tarik suasana pedesaan, rasa ketenangan pulau-pulau terpencil serta puncak gunung yang menjulang. Selain itu, adat istiadat, ragam kuliner serta lebih dari 500 jenis dialek bahasa membuat kagum para *traveler* yang mengisi *polling* penilaian.

Bali, Lombok, Nias, Yogyakarta dan banyak pulau wisata lainnya memang terkenal hingga ke manca-negara. Banyak pesohor dunia bahkan memiliki relasi pribadi dengan pengelola wisata di daerah tersebut. Namun demikian, untuk lebih mengangkat citra daerah secara keseluruhan, pemerintah menciptakan program pengembangan "10 Destinasi Wisata Bali Baru" yang membentang mulai dari Danau Toba, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo Tengger Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi dan berakhir



<https://media.beritagar.id>

di Kepulauan Morotai. Untuk tahap awal, prioritas terdiri dari Wisata Danau Toba, Borobudur, Bromo/Tengger/Semeru serta Mandalika.

### Pusat destinasi

Jenis wisata lainnya juga memberikan kebahagiaan ketika Indonesia ditetapkan sebagai destinasi wisata halal (*halal tourism*) terbaik dunia 2019. Anugerah tersebut disematkan oleh *Global Muslim Travel Index* (GMTI) 2019 mengungguli 130 destinasi dari seluruh dunia. Lembaga pemeringkat *Mastercard-Crescent* tersebut menempatkan Indonesia pada *ranking* pertama standar GMTI dengan skor 78 bersama dengan Malaysia yang sama-sama berada di *ranking* teratas. Dalam keterangannya, Indonesia dianggap sebagai satu-satunya negara yang paling progresif dalam mengembangkan destinasi *halal tourism*.

Prestasi ini tentu sangat progresif jika ditilik dari progress pencapaian tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2015 saja Indonesia masih berada di peringkat ke-6, kemudian perlahan naik ke posisi 4 pada tahun 2016. Tahun 2017 sudah merengsek di nomor 3 dan *ranking* 2 di tahun 2018. Upaya paling nyata Indonesia untuk memperbaiki posisi di antaranya membuat *Indonesia Muslim Travel Index* (IMTI) yang mengacu pada standar GMTI.

Laporan GMTI ini memetakan posisi masing-masing negara berdasarkan empat kriteria penilaian yaitu akses, komunikasi, lingkungan, dan layanan. Rujukan ini juga diadopsi di dalam penilaian IMTI khusus untuk skala nasional. Dalam banyak teori, pasar wisata halal merupakan salah satu segmen pariwisata dengan tingkat pertumbuhan tercepat di seluruh dunia. Diproyeksikan pada 2016 kontribusi sektor pariwisata halal melonjak hingga 35 persen menjadi US\$ 300 miliar terhadap perekonomian global atau meningkat dari US\$ 220 miliar pada 2020. Pangsa ini tentu sangat sayang jika dilewatkan begitu saja.

Tak salah jika pemerintah kemudian begitu serius menyusun program kebijakan pengembangan pariwisata ini. Berbagai jenis pariwisata *digeber* secara massif baik wisata konvensional maupun wisata halal. Sebagai contoh, setelah sebelumnya sukses dengan *tagline* 'Kenali Negerimu Cintai Bangsamu', pemerintah terus bergerak dengan visi '10 Destinasi Wisata Bali Baru'. Kampanye ini diharapkan mampu menjadi akselerator dalam menggerakkan sumber daya domestik sekaligus mendorong pengembangan pariwisata menjadi industri utama. Perkembangan ini juga diselaraskan dengan tema-tema utama pembangunan lainnya seperti pengentasan kemiskinan, gender, pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif.

Dari ke-10 lokasi tersebut, 4 destinasi dipilih sebagai prioritas awal pengembangan: Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo serta Mandalika. Sebagai bentuk percepatan, pemerintah menetapkan kriteria super prioritas terhadap 4 destinasi tersebut untuk kemudian pengelolaannya dilembagakan menjadi Badan Otorita Pariwisata (BOP). BOP Danau Toba disahkan dengan dasar Peraturan Presiden (Perpres) No 49 Tahun 2016, sementara BOP Borobudur via Perpres No 4 Tahun 2017. Tahun lalu, Perpres No 32 Tahun 2018 memfasilitasi BOP Labuan Bajo sedangkan Mandalika diregulasikan ke dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 52 Tahun 2014 dalam format Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

BOP itu sendiri akan bergerak dalam skema Satker Pemerintah yang nantinya akan dikelola dengan bentuk Badan Layanan Umum (BLU). Dasar hukum pembentukan BLU untuk BOP Dana Toba sudah selesai dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No 344/KMK.05/2019, sementara BOP Borobudur, Labuan Bajo dan Mandalika belum selesai dasar kerangka regulasinya. Keseluruhan modalitas tersebut sangat bermanfaat dalam mengakselerasi percepatan pembangunan destinasi wisata selain Bali karena pasca penetapan, seluruh infrastruktur yang dibutuhkan baik pendanaan maupun aspek non-pendanaan akan bergerak secara paralel.

Pola ini akan membawa dampak yang signifikan, minimal mereduksi lintasan konflik dan kewenangan yang begitu pelik. Karena memiliki status super prioritas, langkah yang harus diambil memang harus keluar dari pakem yang selama ini dijalankan. Yang wajib dijaga bersama adalah tata kelola dan kesiapan rencana bisnis masing-masing pemangku kepentingan termasuk deliniasi dari tanggung jawab multi pihak. Jangan sampai hal-hal tersebut pada gilirannya justru menjadi penghalang abadi pengembangan pariwisata di Indonesia ke depannya.

Diversifikasi jenis atraksi juga menjadi kata kunci lainnya. Yang terbaru, pemerintah menggali potensi melalui pengembangan wisata *geopark* sebagai kekayaan alam baru di Indonesia yang tiada duanya. Lewat Peraturan Presiden (Perpres) No 9 tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*), masyarakat akan semakin dikenalkan kepada indahnya kekayaan *geopark* sebagai pertemuan tiga lempeng tektonik yang membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan keragaman geologi (*geodiversity*) paling sempurna. Menjadi makin tak ternilai ketika keragaman geologi tersebut mengandung nilai warisan geologi (*geoheritage*) yang bercampur dengan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) dan keragaman budaya (*cultural diversity*) membentuk menjadi sebuah destinasi tujuan wisata yang berkelanjutan.

Daerah juga dapat menetapkan status *geopark* masing-masing. Beberapa kriteria yang mendasari: memenuhi aspek *geodiversity/biodiversity* dan *cultural diversity*, memiliki pengelola yang jelas dan sudah rampung penyusunan rencana induknya. Status *geopark* sendiri terdiri dari status nasional dan UNESCO *Global Geopark*. *Geopark* nasional ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan geologi sementara UNESCO *Global Geopark* diusulkan kepada Sekretariat UNESCO.

Yang membanggakan, tercatat sekira 40 buah *geoheritage* ada di Indonesia, enam diantaranya sudah mendapatkan pengakuan sebagai *geopark* warisan dunia. Keenam *geopark* tersebut di antaranya: 1) *geopark* Danau Toba yang terbentuk dari erupsi Gunung Toba Purba; 2) *geopark* Gunung Rinjani dengan ikon utamanya Segara Anak yang memukau; 3) *geopark* Gunung Batur yang disahkan pertama kali sebagai warisan dunia oleh UNESCO; 4) *geopark* Ciletuh salah satu *geopark* terbaru yang akan disahkan; 5) *geopark* Gunung Sewu di Yogyakarta; serta 6) *geopark* Merangin di Provinsi Jambi dengan daya tarik utama *fossil* flora berusia lebih dari 350 tahun yang silam.

Seluruh *progress* positif tersebut sekiranya wajib disambut dengan sukacita oleh masyarakat dan seluruh elemen bangsa lainnya. Tak lupa semua elemen kemudian mendukung sesuai dengan tugas dan peran masing-masing. Masyarakat sebagai penikmat wisata, jadilah wisatawan yang baik dan berbudaya. Para penyelenggara wisata, ciptakan paket wisata yang mampu mengangkat nilai-nilai luhur budaya Indonesia. Jika semua pihak kemudian bersepakat dengan mimpi ini, maka status Indonesia sebagai pusat destinasi wisata dunia dengan segala jenis keragamannya tentu dapat diwujudkan.

Joko Tri Haryanto

Peneliti Badan Kebijakan Fiskal  
Kementerian Keuangan-RI



## Omnibus Law

**P**RESIDEN, melalui Menteri Keuangan, akan melakukan perombakan terhadap 72 undang-undang (UU) dengan menggunakan skema *omnibus law*. Skema itu diyakini bakal memangkas aturan perizinan investasi yang tumpang tindih di tingkat pusat dan daerah. Intinya, pemerintah ingin memperbaiki perizinan investasi demi menggaet lebih banyak investor guna menyeimbangkan defisit neraca transaksi berjalan (*current account deficit/CAD*) Indonesia.

*Omnibus law* secara sederhana bisa diartikan sebagai konsep pembuatan *beleid* yang menggabungkan sejumlah aturan menjadi satu UU yang akan dijadikan payung hukum baru. *Omnibus law* juga dapat dianggap sebagai UU "sapu jagat" yang dapat digunakan untuk mengganti beberapa norma hukum dalam beberapa UU. Mekanisme ini dianggap lebih efektif dan efisien dalam proses pembuatan dan revisi UU. Konsep *omnibus law* memang lazim diterapkan di negara-negara dengan konsep hukum Anglo Saxon, seperti Amerika Serikat. Namun, bukan berarti tidak dapat diterapkan di Indonesia.

Praktik *omnibus law* senyatanya pernah dilakukan Irlandia dalam merampingkan (konsolidasi) peraturan perundangannya. Dengan hanya lewat satu UU *omnibus* Irlandia berhasil menghapus sekira tiga ribuan UU. Capaian Irlandia dianggap sebagai rekor dunia praktik *omnibus law*. Kewenangan yang muncul dari skema *omnibus law* memang relatif aman dari kepentingan politik, pasalnya telah menjalani proses legislasi antara lembaga-lembaga terkait, sehingga tidak dapat diselewengkan oleh penguasa. Dalam konteks hierarki perundang-undangan inilah eksistensi konsolidasi peraturan diperlukan guna mengisi celah sistematisasi hukum perundangan.

Sejatinya, Indonesia pernah mengeluarkan kebijakan hukum yang berkonsep seperti *omnibus law*, seperti Ketetapan MPR RI No I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR Sementara dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960. Pada pokoknya kebijakan tersebut mengatur perihal ketetapan MPR mana saja yang dinyatakan berlaku dan tidak berlaku lagi. Karena itulah, pemerintah harus didukung dalam rangka penataan sistem hukum dan pembangunan hukum yang konstruktif dan sejalan dengan prinsip konstitusionalisme.

Secara yuridis memang terdapat beberapa problem hukum tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti problem sinkronisasi dan *overlapping*, baik secara horizontal yaitu antara UU yang satu dan UU sektoral lainnya di level pusat, maupun produk hukum daerah melalui Perda yang saling bertabrakan dengan UU. Begitu juga otoritas pembentukan UU oleh berbagai instansi pemrakarsa, mulai dari Kementerian Hukum dan HAM,

DPR maupun perangkat teknis lainnya sebagaimana diatur dalam UU No 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk mengidentifikasi berbagai produk peraturan perundangan yang sangat rumit dan kompleks itu dapat digunakan suatu model sistem audit elektronik, sehingga bisa diketahui dan dimengerti oleh semua pihak seperti jumlah UU, PP, Perda dan Perpres mengenai tanah, pajak, serta hutan yang cukup banyak dan sistemik. Oleh karena itu, perlu sistem audit norma hukum dengan memanfaatkan jasa yang berbasis teknologi informasi.

Dengan begitu, pemerintah bisa membangun suatu sistem yang dapat menata ulang perundang-undangan di Indonesia yang lebih akuntabel dan kredibel, serta berdaya guna dan berhasil guna. Tetapi, pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada sektor investasi dan pajak semata, melainkan juga menyisir semua bidang seperti HAM, sistem pemilu, dan lingkungan hidup dan lain-lain. Karena, konsep bernegara kita bukan hanya untuk investasi melainkan membangun kesejahteraan dan keadilan bagi semua, termasuk sistem demokrasi dan pendidikan secara keseluruhan.

Oleh karenanya, pemerintah perlu membentuk suatu Badan Khusus Pusat Legislasi Nasional (BKPLN) yang kredibel dan kapabel. Badan itu nantinya akan menjadi tempat untuk mengonsolidasikan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dari kewenangan-kewenangan yang didesentralisasikan dan UU secara terencana dan tepat sasaran, sehingga keadaan hiper-regulasi dapat diatasi.

Indonesia tidak mengenal UU payung, sebab struktur perundang-undangan di Indonesia semua UU organik sama derajat dan daya ikatnya. Untuk itu, perlu diatur dengan melakukan revisi terhadap UU No 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga mempunyai legitimasi secara yuridis. Hal ini penting untuk mengantisipasi berbagai upaya hukum oleh pihak-pihak yang akan mempersoalkannya di Mahkamah Konstitusi.

UU yang disatukan dengan peraturan lain itu harus dijelaskan secara detil, dan dipikirkan peraturan di bawahnya seperti PP sampai Perda. Untuk masalah vertikal, misalnya, jika PP yang mengacu pada UU, berarti PP tersebut harus dicabut. Jangan sampai kelak ketika *omnibus law* terjadi, masalah yang sudah diselesaikan, muncul masalah baru di tingkat PP dan ketika diselesaikan muncul masalah di tingkat Perpres. Selain itu, harus disebutkan secara detail pasal mana saja dalam UU yang tidak berlaku lagi.

■ MOH. ILHAM A. HAMUDY



# CALL FOR PAPERS



## JURNAL BINA PRAJA | MAY & NOV

THEME

### “HOME AFFAIRS GOVERNANCE”

ACCREDITED NUMBER

21/E/KPT/2018 (SINTA 2)

SUBTHEME

Regional Autonomy and Bureaucracy  
Politics and Public Administration  
Territorial Administration  
and Rural Governance  
Population and Civil Registration  
Regional Election and Regional Innovation  
Regional Fiscal Policy and Development  
Other Issues in Public Administration



### TERMS & CONDITIONS

Open to the public | Manuscripts may contain the results of empirical or nonempirical research | Manuscripts should address the theme and subthemes set by the Jurnal Bina Praja Editorial Team | Submitted manuscripts have not been published in other media | Manuscripts should have a minimum of 38000-40000 character in Indonesian or English (preferably in English) | For the writing systematics and format, see <http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/index> | A minimum of 15 references taken from primary sources (scientific journals articles, dissertations, master's theses, undergraduate theses, and/or other research reports) | Attach biodata along with complete mailing address and contact number.

INDEXED BY:



RESEARCH AND DEVELOPMENT AGENCY  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

Jl. Kramat Raya 132, Jakarta Pusat  
0821 1139 3927 | redaksijbp@gmail.com